

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Gubernur ;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a merupakan perwujudan visi, misi dan tujuan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, (Lembaran Negara Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2008.

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Lingkungan Strategis
- BAB III : Visi, Misi, dan Tujuan
- BAB IV : Pentahapan Pembangunan Daerah
- BAB V : Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB VI : Penutup

Pasal 3

Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Pembangunan 5 (Lima) Tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah.

Pasal 4

Penyusunan Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 memperhatikan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005.

Pasal 5

Terhadap kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, tetap dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2004 dan Tahun 2005 dengan mendasarkan perkembangan lingkungan strategis serta memperhatikan prioritas-prioritas pencapaian target pembanguan sesuai dengan Rencana Srategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.

Pasal 6

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 wajib dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2003
GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 109

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003-2008

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur.

Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut di atas, memuat visi, misi dan tujuan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah serta kebijakan penyelenggaraan pembangunan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan baik bagi daerah, kabupaten/kota, sektoral, lintas sektoral, lintas daerah yang sekaligus merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini diupayakan menampung aspirasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004, yang oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang didalamnya memberi arahan untuk disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan mendasarkan pada perkembangan lingkungan strategis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 7 : cukup jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TANGGAL : 12 OKTOBER 2003

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2003 - 2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut satu bulan setelah Gubernur dilantik, daerah harus sudah menetapkan RENSTRA. RENSTRA yang dimaksud adalah rencana lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. RENSTRA ini menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

Rencana Strategis 2003 – 2008 menggunakan tiga pendekatan, yaitu partisipatif, keterpaduan sistem dan kewilayahan. Ketiga pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam sistem perencanaan, tetapi juga dalam implementasi program, monitoring dan evaluasi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan fundamental pada sistem

pemerintahan daerah, yaitu dari sistem yang cenderung sentralistis menjadi sistem yang cenderung desentralistis. Perubahan sistem ini membawa implikasi pada perubahan kewenangan dan pola hubungan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota.

Demikian juga, perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal, baik dalam skala global, regional, maupun nasional, di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, sangat mempengaruhi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Propinsi Jawa Tengah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, tetapi di sisi lain sering menimbulkan ancaman bagi pembangunan Propinsi Jawa Tengah.

RENSTRA Propinsi Jawa Tengah merupakan rumusan strategis Propinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilandasi oleh kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Kemasyarakatan.

RENSTRA ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi aktual yang dihadapi dan diprediksikan masih akan dihadapi oleh Propinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kondisi aktual yang menjadi dasar penyusunan RENSTRA ini meliputi kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal di lingkup global, regional maupun nasional.

B. Keterkaitan dengan Program Pembangunan Daerah 2001-2005

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Propinsi Jawa Tengah telah memiliki produk perencanaan berupa PROPEDA 2001-2005 yang telah ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2001. Dengan demikian sampai dengan tahun 2005 Propinsi Jawa Tengah sebetulnya masih memiliki pedoman pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang termuat dalam PROPEDA tersebut.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran harus menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 PP tersebut, setiap daerah harus menetapkan RENSTRA dalam bentuk Perda dalam jangka waktu satu bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa tugas 2003 - 2008, maka perlu ditetapkan sebuah RENSTRA yang akan menjadi tolok ukur Kepala Daerah dalam melakukan pertanggungjawaban baik dalam laporan tahunan (LPJ) maupun laporan akhir masa jabatan (AMJ). Rencana Strategis ini merupakan rencana lima tahun (2003-2008) yang berisi visi, misi, tujuan, strategi dan program daerah.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, terhadap program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam PROPEDA 2001-2005 diintegrasikan dalam dokumen Rencana Strategis ini. Sedangkan kegiatan tahunan akan diperinci lebih detail dalam dokumen Rencana Tahunan Daerah.

C. Sistematika RENSTRA.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Didalamnya memuat tentang latar belakang penyusunan RENSTRA ditinjau dari aspek landasan hukum, metode pendekatan implementasi Renstra, keterkaitan RENSTRA dengan PROPEDA 2001-2005, dan memuat secara ringkas tentang sistematika penyusunan.

Bab. II Kondisi Lingkungan Strategis

Secara substansi Bab ini membahas tentang analisis lingkungan internal dari aspek kekuatan dan kelemahan, maupun analisis lingkungan eksternal dari aspek peluang dan kendala. Analisis kondisi lingstra tersebut mencakup lingkup global, regional dan nasional.

Bab. III Visi, Misi dan Tujuan

Visi, Misi dan Tujuan yang tertuang dalam Bab ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan untuk kurun waktu lima tahun mendatang yaitu periode 2004-2008.

Bab. IV Pentahapan Pembangunan Daerah

Uraian di dalam Bab ini memberikan ilustrasi ringkas mengenai tahapan pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, yaitu meliputi upaya untuk membangun landasan melalui tahapan akselerasi untuk penyelesaian program-program tahun 2003 dan pembagian pentahapan untuk pelaksanaan tahun 2004-2008.

Bab. V Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini memuat uraian tentang kebijakan dan strategi untuk masing-masing sektor pembangunan, yang di dalamnya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, potensi, permasalahan, kebijakan, tujuan, strategi serta program-program yang akan dilaksanakan sekaligus memuat uraian tentang kebijakan dan strategi dalam hal pengelolaan keuangan.

Bab. VI Penutup

Memuat tentang penegasan fungsi RENSTRA, yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran instansi dilingkungan Propinsi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai referensi bagi

masyarakat dan kalangan dunia usaha serta jajaran Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun penjabaran secara lebih lanjut.

Lampiran.

Berisi tentang matrik penjabaran yang memuat tentang permasalahan, strategi, program dan sasaran serta unit kerja pengampu untuk setiap sektor pembangunan.

BAB II

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Analisis Lingkungan Internal.

Perubahan-perubahan lingkungan internal, baik dalam skala global, regional maupun nasional harus selalu menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Strategis. Perubahan-perubahan tersebut dapat menggambarkan dua makna, pertama bermakna sebagai kekuatan dan kedua merupakan kelemahan.

1. Kekuatan

Geografis; Propinsi Jawa Tengah terletak antara 5^o40'-8^o30' Lintang Selatan, 108^o30'—111^o30' Bujur Timur dengan luas wilayah kurang lebih 32.544 km² (1,7% luas wilayah Indonesia). Wilayah ini berada pada jalur strategis lintas Sumatera – Jawa – Bali dengan batas-batas, sebelah Utara adalah Laut Jawa, sebelah Selatan Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia, sebelah Barat Propinsi Jawa Barat dan sebelah Timur Propinsi Jawa Timur.

Propinsi ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan pegunungan, dengan ketinggian yang bervariasi, memiliki sungai, waduk dan perairan umum. Iklimnya termasuk tropis basah dengan suhu rata-rata antara 19^o - 28^o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 - 90%.

Jawa Tengah juga memiliki sederetan gunung berapi yang sebagian masih aktif. Gunung berapi tersebut membentuk lapisan permukaan tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Ditinjau dari tata guna lahan, ada sekitar 1.000.000 Ha atau 30,74% merupakan lahan sawah dan 2,25 juta hektar tanah atau 69,26% bukan lahan persawahan. Potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali setahun seluas 68,05%. Selain itu, terdapat pula potensi pantai dan laut yang didukung oleh potensi hayati dan non hayati yang beranekaragam.

Potensi Pertanian dan Kehutanan; Pada tahun 2000, sektor pertanian memberikan kontribusi PDRB sebesar 25,95 %, atau berada pada urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2001 sebesar 3,90 %. Laju pertumbuhan ini lebih besar dari tahun 2000 (3,21 %). Sejak tahun 1958 Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung mengalami peningkatan dari 94,01 (1998) menjadi 91,90 (2000), 101,90 tahun 2001 dan pada bulan Juli 2002 mencapai 109,60.

Sektor pertanian dan kehutanan tetap menjadi penyumbang kedua terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan angka elastisitas sebesar 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap sumbangan sektor pertanian sebesar 1 unit dihasilkan oleh 3,5 tenaga kerja pertanian. Oleh karena sekitar 41,90% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, maka meningkatnya produktivitas tenaga kerja pertanian dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Penggunaan teknologi *sonic bloom* ternyata telah mampu memberikan kontribusi positif dalam memperpendek masa panen dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah diujicobakan. Pada tanaman jahe, produksi dapat meningkat dari 10 ton/ha menjadi 19 ton/ha, tembakau dari 1.200 kg/ha menjadi 1.916 kg/ha, sedangkan teh dari 5 ton/ha menjadi 7,5 ton/ha.

Dibandingkan Tahun 2001, produksi padi tahun 2002 meningkat sebesar 2,58% dari 8.289.927 ton menjadi 8.503.523 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari 50,22 kw/ha pada tahun 2001 menjadi 51,43 kw/ha, walaupun realisasi tanam menurun 11,24% dari 1.609.248 ha menjadi 1.504.702 ha.

Produksi sayuran, terjadi peningkatan hasil tanaman cabai dan kentang sebesar 8,27% menjadi 1.665.449 ton dan 36,58% menjadi 1.072.178 ton. Kemudian produksi daging, telur dan susu pada tahun 2002 meningkat dibandingkan tahun 2001, masing-masing sebesar 1,00%; 9,00%; dan 9,99% menjadi 181.513.973 ton daging, 125.694.031 ton telur dan 87.291.258 liter susu dibandingkan dengan produksi tahun 2001.

Sampai tahun 2007, petani tebu dapat melakukan penggantian varietas dan rehabilitasi tanaman secara bertahap. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan produksi tebu sebesar 27% dari 136.168 ton tebu pada musim giling 2001 menjadi 172.545 ton untuk musim giling 2002. Secara umum total produksi tanaman perkebunan Tahun 2002 meningkat sebesar 0,79% dari sebesar 800.920.040 ton menjadi 807.207.841 ton.

Luas Hutan rakyat Jawa Tengah adalah 220.000 Ha (6,76 %) dan Hutan Negara seluas 649.934,61 Ha (19,97 %) yang terdiri dari Hutan Lindung 73.477,88 Ha, Hutan Produksi 465.451,93 Ha, Hutan Produksi Terbatas 107.543,3 Ha, serta kawasan suaka alam 3.461,5 Ha.

Potensi perikanan dan sumber daya laut, Propinsi Jawa Tengah secara geografi memiliki garis pantai sepanjang 791,76 Km, terdiri dari

panjang Pantai Utara 502,69 Km dan Pantai Selatan 289,07 Km. Di laut Jawa, kaya akan jenis ikan pelagis dan demersal dengan potensi 796.640 ton/tahun, sedangkan Samudera Indonesia kaya akan udang, tuna, hiu, dan ikan demersal dengan potensi 1.076.890 ton/tahun. Potensi perikanan darat terdiri dari Waduk (23.545,75 Ha), Sungai (15.876,2 Ha), Rawa (3.660,2 Ha), dan Telaga (1.246,3 Ha). Jumlah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah 77 buah, dimana 67 buah di Pantai Utara dan 10 buah di Pantai Selatan. Dari TPI tersebut, terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC).

Industri Kecil Menengah (IKM)/ Usaha Kecil Menengah (UKM);

Perkembangan kinerja UKM di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang meningkat. Jumlah IKM / UKM binaan meningkat dari 40.816 unit (Tahun 2001) menjadi 41.968 unit (Tahun 2002). Jumlah aset IKM/ UKM juga meningkat dari Rp. 2,938 trilyun menjadi Rp. 7,773 trilyun. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini juga mengalami peningkatan dari 190.664 orang menjadi 193.778 orang. Pada Tahun 2002 jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam meningkat 0,09%, yaitu dari 7.049 unit pada Tahun 2001 menjadi 7.056 unit. Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi jumlah pinjaman dari Rp. 1,895 milyar menjadi Rp. 1,987 milyar dengan turn over 2,6 kali atau meningkat 4,85%. Jumlah peminjam juga meningkat 0,52% dari 2.333.789 orang pada tahun 2001 menjadi 2.345.872 orang pada Tahun 2002. Pada tahun 1992 penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari sektor ini sebanyak 17.431 orang.

Sedangkan jumlah Sentral Kulakan Koperasi (Senkuko) dan Waserda sebanyak 1.721 unit atau naik 1,80% dibandingkan tahun 2001. Fakta tersebut diikuti oleh peningkatan penyebaran outlet sebesar 6,30%, sehingga menjadi 3.826 unit. Hal tersebut meningkatkan volume usaha sebesar 22,66% (menjadi Rp. 337.700.000,) dan menyerap tenaga kerja

sebesar 5.943 orang. Dilihat dari variabel-variabel itu Jawa Tengah dikatakan relatif lebih baik dibandingkan dengan propinsi tetangga.

Pariwisata; Pada Tahun 2002, Propinsi Jawa Tengah telah memiliki Pusat Informasi Wisata di Semarang dan *Tourism Information Center (TIC)* di Kuta Bali. Sedangkan untuk memudahkan para wisatawan atau peminat pariwisata, telah diterbitkan buku pariwisata seperti *Statistik Pariwisata Jawa Tengah, Buku Paket Wisata Pecinan, Buku Kemasan Paket Wisata Ziarah, Buku Program Pariwisata 2003 dan Lima Tahun Pariwisata Jawa Tengah*. Selain itu telah pula terdapat informasi visual berupa VCD untuk obyek wisata Solo-Selo-Borobudur dan film *Under Water Karimunjawa*.

Jumlah obyek wisata di Jawa Tengah baik wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan cukup banyak dan masih potensial untuk dikembangkan misalnya obyek wisata budaya yaitu Candi Borobudur, Mendut, Prambanan, Museum Purbakala Sangiran, Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran, Museum Kereta Api, Museum Radya Pustaka, Masjid Agung Demak; obyek wisata alam yaitu Kepulauan Karimunjawa, Dataran Tinggi Dieng, Segara Anakan dan Nusakambangan, Karang Bolong, Gua Lawa; obyek wisata buatan Taman Kyai Langgeng, Taman Maerokoco dan Monumen Palagan.

Iklim kondusif untuk investasi; Perkembangan investasi selain dari aspek ekonomi, dipengaruhi juga oleh keadaan sosial politik yang kondusif dan kepastian hukum, ketenangan berusaha, regulasi yang sederhana, pelayanan masyarakat yang murah dan adil serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Besarnya realisasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat investasi sebesar US\$ 73.435.000 pada Tahun 2002, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,84% dibandingkan realisasi Tahun 2001 sebesar US \$ 66.847.000. Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi jumlah proyek pada tahun 2002 dengan

nilai investasi sebesar Rp. 777,117 milyar atau meningkat 2,75% dibanding realisasi tahun 2001 sebesar Rp. 756,172 milyar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Tengah pada sektor riil masih cukup baik. Indikator ini cukup penting dalam mengukur Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi yang prospektif di masa mendatang.

Penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di BKK/BPR BKK Jawa Tengah pada Tahun 2002 sebesar Rp. 27,570 milyar, menghasilkan peningkatan deviden yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 5,5 milyar atau meningkat 63 % dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai Rp. 3,3 milyar. Penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di BKK/BPR BKK dapat meningkatkan aset BKK/BPR-BKK menjadi Rp. 808,7 milyar atau meningkat 40,8% dibanding Tahun 2001 yang mencapai Rp. 478,7 milyar. Selain itu kredit yang disalurkan mencapai Rp. 648,2 milyar atau meningkat 42,5% dibanding tahun 2001 yang hanya mencapai Rp. 526,9 milyar.

Potensi Sumber Daya Air, Tambang dan Energi; Jawa Tengah memiliki beberapa Satuan Wilayah Sungai yang besar yaitu Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy-Ciwulan, Pemali-Comal, Serayu-Bogowonto, Jratunseluna dan Bengawan Solo dengan potensi air sebesar 57.873 juta m³, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 37,924 juta m³ (65,53%) sehingga yang belum dimanfaatkan dan terbuang ke laut masih relatif besar yaitu sebesar 19.954 juta m³ (34,36%). Potensi air bawah tanah yang dapat digunakan untuk air minum/air bersih, irigasi dan keperluan lainnya juga masih sangat besar sebanyak 532,172 juta m³.

Sumber bahan tambang relatif melimpah dan belum seluruhnya dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Bahan tambang seperti emas, tembaga, andesit dan pasir besi yang sudah diusahakan masih relatif sedikit. Sedangkan bahan galian golongan C telah cukup banyak diusahakan dan telah dapat memberikan sumbangan pada

penerimaan pendapatan daerah. Pada Tahun 2002, telah diturunkan 88 buah SIPD sehingga jumlah usaha pertambangan meningkat 9,75%. Di sektor pertambangan terdapat peluang pasar bahan galian batu andesit ke Kalimantan dan peluang ekspor "*hydrated lime*" ke New Caledonia, yang direalisasikan pada Tahun 2004 dengan target sebesar 1,2 juta ton/tahun atau senilai Rp. 330 milyar per tahun.

Permintaan energi listrik senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi. Investasi pembangunan listrik terus didorong, dan hasilnya dapat dilihat dengan mulai dibangunnya PLTU Tanjung Jati B sebesar 180 MW, PLTGU Tambaklorok dengan kapasitas 1033 MW, serta PLTP Dieng dengan kapasitas 60 MW.

Hasil Penelitian sumber-sumber energi alternatif pada desa-desa yang sulit dijangkau listrik oleh PLN, menunjukkan bahwa terdapat potensi energi listrik mikrohidro sebesar 210.158,65 MW/Tahun pada 20 lokasi di 10 Kabupaten. Sumber energi lain yang mungkin dapat dikembangkan antara lain : energi surya, energi angin dan panas bumi.

2. Kelemahan

Lemahnya struktur ekonomi ; Sebagaimana pada tingkat Nasional, struktur ekonomi Jawa Tengah relatif masih lemah. Lemahnya struktur ekonomi tersebut dikarenakan masih lemahnya keterkaitan baik antar industri hulu dan industri hilir maupun lemahnya keterkaitan antar sektor dan skala usaha besar dan kecil. Sebagian besar dari produk-produk manufaktur di Jawa Tengah masih tergantung pada bahan baku impor. Sebagian dari kebutuhan pokok masyarakat juga masih diimpor. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Jawa Tengah, karena membawa implikasi pada rentannya ekonomi daerah terhadap perubahan-perubahan eksternal.

Pada Tahun 2001 struktur ekonomi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut : kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 28,39%,

sektor pertanian sebesar 25,95%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,7%, sektor jasa-jasa 8,6%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,38%, sektor bangunan 4,04%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,67%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,96% serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,73%. Sektor dominan pada tahun 2002, tetap didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor industri sebesar 28,51%, sektor perdagangan sebesar 25,16% dan sektor pertanian sebesar 24,97%. Secara keseluruhan, kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar 77,50%.

Pertumbuhan ekonomi ; Dibandingkan dengan Tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir ini relatif lebih baik. Pada Tahun 2001 ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,32%, Tahun 2002 tumbuh sebesar 3,56% dan pada triwulan I Tahun 2003 pertumbuhan ekonomi mencapai 2,74%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengangkat kebutuhan Jawa Tengah dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal ini diantaranya disebabkan oleh peningkatan investasi yang terjadi pada Tahun 2002 (baik dari PMDN ataupun PMA) belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Demikian juga nilai ekspor beberapa produk unggulan mengalami penurunan yaitu sebesar US \$ 1,972 milyar pada Tahun 2001, menjadi US\$ 1,642 milyar pada tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dan adanya sentimen negatif negara importir akibat isu regional maupun global.

Disparitas antar wilayah ; Dilihat dari kesenjangan antar wilayah, disparitas ekonomi antar wilayah, yang diukur melalui indeks Williamson, pada tahun 1999 sebesar 0,75, tahun 2000 sebesar 0,78 dan tahun 2001 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,76. Sedangkan ketimpangan pendapatan perkapita yang diukur dengan Indeks Gini

mengalami kenaikan yaitu dari 0,2482 pada tahun 2001 menjadi 0,2827 pada tahun 2002. Disparitas ekonomi tersebut apabila tidak mendapatkan prioritas dalam penanganannya diperkirakan dapat menimbulkan konflik sosial antar golongan masyarakat.

Pengembangan investasi ; Nilai investasi PMA pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 9,85%, yaitu dari US\$ 66,847.000 menjadi US\$ 73,435,000. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami kenaikan sebesar 30%, yaitu dari Rp 582.220.560.000 pada tahun 2001 menjadi Rp. 777.117.025.000 pada tahun 2002. Iklim investasi di Jawa Tengah pada awal tahun 2003 semakin memburuk yang ditandai dengan memburuknya kondisi keamanan dan tingginya biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan tarif barang-barang publik, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan tarif telepon. Kenaikan harga barang-barang publik tersebut ternyata menimbulkan biaya tinggi bagi investasi serta menurunkan kemampuan produk-produk daerah untuk berkompetisi.

Di sisi lain kondisi pengembangan investasi pada BUMD masih menunjukkan kinerja yang belum optimal baik dari sisi manajemen, terhadap usaha, maupun dari sisi keuangan , misalnya Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas di lingkungan negara-negara ASEAN (*Asean Free Trade Area /AFTA*) yang disepakati tahun 2003 akan berpengaruh pula pada pengembangan dunia usaha dan khususnya di bidang investasi di Jawa Tengah yang pada masa sekarang sudah mulai terintegrasi masuk ke dalam tatanan perekonomian dunia.

Masih tingginya angka pengangguran ; Akhir-akhir ini terjadi rasionalisasi pegawai/buruh bagi industri-industri padat karya yang disebabkan beban hutang yang sangat besar maupun daya saing yang semakin berkurang. Akibatnya angka pengangguran pada tahun 2002 menjadi sebesar 984.234 orang. Untuk mengatasi tingginya angka

pengangguran tersebut, maka berwirausaha menjadi salah satu alternatif terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah.

Motivasi yang kuat dari masyarakat untuk berwirausaha mendapat dukungan dari dunia perbankan, baik bank umum maupun BPR, dimana dalam kurun waktu terakhir telah mampu menurunkan tingkat suku bunga kreditnya (terkait erat dengan penurunan SBI). Selain itu pemerintah daerah juga memberikan kemudahan untuk dikembangkannya koperasi serba usaha/simpan pinjam pada banyak wilayah di Jawa Tengah.

Faktor yang menjadi potensi permasalahan di masa datang berkaitan dengan berkembangnya kewirausahaan di masyarakat adalah perlunya program tata ruang yang lebih jelas, tegas dan tepat guna untuk menghindari tumpang tindih penggunaan fasilitas publik, seperti trotoar, halte, dan wilayah lainnya yang tidak diperuntukkan untuk lokasi wirausaha/berdagang.

Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 4 %/tahun diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 160.000 orang, sehingga dalam lima tahun ke depan diperkirakan dapat terserap sebanyak 800.000 tenaga kerja. Hal tersebut diasumsikan akan berdampak positif yaitu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dengan asumsi tidak terdapat tambahan pengangguran yang signifikan.

Masih banyaknya penduduk miskin ; Kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Tengah yang belum pulih benar membawa dampak masih rendahnya daya beli masyarakat, tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan pendapatan masyarakat yang tidak dapat mengikuti laju kenaikan harga barang dan jasa.

Keadaan tersebut dapat dilihat secara nyata, dimana selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin masih cukup besar yaitu 7.308.300 orang pada tahun 2002. Apabila masalah tersebut tidak ditangani secara optimal, maka dapat membawa dampak negatif di masa

datang, seperti semakin meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya kematian penduduk karena kurang gizi, memburuknya kondisi sosial dengan potensi konflik cukup tinggi, dan lain sebagainya.

Bidang pendidikan ; Menghadapi empat permasalahan utama yaitu berkaitan dengan masih rendahnya kualitas, relevansi, pemerataan dan efisiensi pendidikan. Kualitas pendidikan, masih rendah dibanding dengan tuntutan untuk berkompetisi pada era global. Ada dua kelemahan utama dari SDM Indonesia yang belum dapat diakomodir oleh bidang pendidikan yaitu kelemahan dalam akses di bidang komunikasi global dan kelemahan akses di bidang teknologi global. Hal ini disebabkan karena keterbatasan di bidang sarana dan prasarana. Relevansi, yaitu belum adanya kesesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan lulusan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan. Pemerataan, yaitu masih rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang ditandai dengan belum semua anak didik memiliki akses kepada dunia pendidikan. Efisiensi, indikasinya biaya pendidikan cenderung semakin mahal. Saat ini terjadi polemik pada masyarakat mengenai semakin mahalnya biaya pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Biaya perguruan tinggi yang semakin meningkat tajam tersebut, disebabkan oleh ditetapkannya Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) bagi UI, ITB, IPB dan UGM, selanjutnya secara bertahap akan diterapkan pada perguruan tinggi negeri lainnya. Hal ini menyebabkan perguruan tinggi semakin proaktif mencari dana untuk biaya operasional yang diperlukan, diantaranya dengan menaikkan biaya pendidikan.

Pelayanan dasar kesehatan ; Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Jawa Tengah masih menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus pada RENSTRA Jawa Tengah 2003-2008. Rasio ketersediaan tenaga medis dengan jumlah masyarakat yang dilayani masih jauh dari angka ideal, meskipun pada wilayah tertentu rasio yang ada menunjukkan hasil yang lebih baik. Sehingga pemerataan

ketersediaan tenaga medis secara proporsional menjadi salah satu prioritas utama. Selanjutnya kecenderungan semakin meningkatnya harga obat-obatan medis, menyebabkan program Jaring Pengaman Sosial bidang kesehatan tetap perlu ditingkatkan, sehingga dapat membantu masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih baik.

Belum optimalnya penanganan Penyakit Masyarakat, PMKS dan penyalahgunaan Napza; Sampai saat ini penanganan penyakit masyarakat belum memberikan hasil yang memuaskan. Perjudian, prostitusi, dan gangguan ketertiban masih menimbulkan masalah pada masyarakat. Sebagian dari hal tersebut memang memiliki kaitan erat dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari krisis yang terjadi sejak tahun 1998, namun sebagian lagi berkaitan dengan perubahan-perubahan tata nilai masyarakat yang cenderung semakin sekuler dan individualistis.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah juga masih relatif besar. Pada tahun 2002, jumlah anak terlantar ada 236.204 orang, anak nakal 21.344 orang, anak jalanan 8.521 orang dan tuna susila 8.728 orang. Permasalahan penyakit masyarakat dan PMKS diperkirakan masih akan menjadi masalah-masalah prioritas yang harus ditangani secara serius dalam lima tahun ke depan.

Kondisi infrastruktur ; Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah lintasan utama jalur Sumatera, Jawa dan Bali, namun sarana perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, sarana pos dan telekomunikasi sebagai pendukung pelayanan masyarakat masih kurang memadai. Sarana dan prasarana sumberdaya air juga masih belum optimal sehingga belum mampu memberikan layanan optimal dalam menghadapi banjir, kekeringan dan tanah longsor dan berbagai keperluan lainnya.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan; Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan masih menghadapi masalah berat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan kaidah-kaidah kelestarian dalam mengeksploitasi/ mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan. Gejala kerusakan sumber daya alam dan lingkungan telah meluas bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan sehingga dalam beberapa kasus ternyata telah mengakibatkan bencana alam menelan korban jiwa.

Tuntutan peningkatan pelayanan publik ; Dalam era otonomi daerah masih dijumpai adanya kesenjangan antara kualitas pelayanan dengan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang mereka harapkan. Di satu sisi seiring dengan semakin demokratisnya sistem pemerintahan yang kita anut, maka tuntutan akan kualitas pelayanan publik menjadi semakin tinggi. Di sisi lain kita dihadapkan pada kondisi masih *rendahnya kemampuan aparatur birokrasi untuk memenuhi tuntutan tersebut.*

Euforia penyelenggaraan Otonomi Daerah, Keberhasilan pembangunan selama ini masih dihadapkan dengan adanya kesenjangan koordinasi antara Propinsi dengan Kabupaten / Kota dalam era otonomi daerah, karena makna penyelenggaraan otonomi seringkali dimaknakan sebagai suatu kompetensi internal.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Perubahan-perubahan lingkungan eksternal, baik dalam skala global, regional maupun nasional harus selalu menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Strategis. Perubahan-perubahan tersebut dapat mempunyai dua makna, pertama bermakna sebagai peluang, dan kedua justru merupakan kendala.

1. Peluang

Lingkungan global. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan global. Era globalisasi yang dipacu oleh perubahan-perubahan teknologi terutama dibidang komunikasi dan transportasi ternyata membuat dunia semakin sempit. Kemudahan-kemudahan teknologi transportasi dan komunikasi tersebut telah mengakibatkan semakin intensifnya transaksi-transaksi para pelaku ekonomi antar negara. Kemudahan-kemudahan ini merupakan peluang bagi Jawa Tengah untuk memperluas pasar, melakukan kerjasama investasi, membangun jaringan kerjasama yang lebih luas dengan masyarakat internasional, sehingga akan meningkatkan kapasitas Jawa Tengah.

Sistem pasar bebas yang dianut oleh sebagian besar negara dunia, dan sistem pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, lebih memberikan peluang pada Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan kerjasama langsung antar Propinsi di Luar Negeri, maupun antara Propinsi Jawa Tengah dengan dunia bisnis dari luar negeri. Dengan kerjasama-kerjasama yang berskala internasional tersebut diharapkan akses pasar dari pengusaha-pengusaha Jawa Tengah menjadi semakin luas.

Lingkungan Regional. Dengan munculnya AFTA dan semakin berkembangnya ekonomi China, Korea Selatan dan Vietnam, maka akan lebih terbuka kemungkinan untuk membangun aliansi yang saling menguntungkan dengan daerah-daerah di negara-negara tersebut. Perjanjian-perjanjian imbal beli dengan Propinsi dari negara-negara tetangga tersebut akan semakin terbuka. Demikian juga pertukaran tenaga ahli, pertukaran teknologi antar Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi di negara - negara tetangga akan memberikan dampak sinergi positif bagi perkembangan Jawa Tengah.

Lingkungan Nasional. Pada Tahun 2003, Jawa Tengah menghadapi lingkungan nasional yang jauh lebih baik dibandingkan

Tahun 1998, karena pertumbuhan ekonomi nasional telah mengalami peningkatan, yaitu Tahun 2000 sebesar 4,90 persen, Tahun 2001 sebesar 3,32 persen, dan Tahun 2002 sebesar 3,5 persen. Tingkat inflasi juga cukup terkendali, yaitu Tahun 2000 sebesar 9,35 persen, Tahun 2001 sebesar 12,55 persen dan tahun 2002 sebesar 10,03 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap US \$ juga relatif stabil, yaitu antara Rp 8.200, - Sampai dengan Rp. 8.500,- pada tahun 2003.

Suatu kecenderungan baik pada tingkat nasional yang terjadi selama dua tahun terakhir ini adalah semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Semakin meningkatnya kesadaran ini menunjukkan semakin mengertinya masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini ternyata diikuti juga dengan semakin meningkatnya standar pelayanan publik yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.

Berbagai ancaman dari luar, ancaman separatisme dan terorisme, ternyata telah meningkatkan solidaritas dan integritas bangsa. Peristiwa-peristiwa peledakan bom yang terjadi di beberapa Daerah, ternyata juga menimbulkan kesadaran bagi segenap komponen masyarakat tentang pentingnya kesetiakawanan untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut.

Kondisi Tahun 2003, ditandai juga dengan relatif lebih baiknya pranata hukum nasional, yang diharapkan mampu menjadi landasan utama bagi penegakan hukum di Indonesia. Selama dua tahun terakhir sudah terlihat keberanian Pemerintah Pusat untuk menganulir Peraturan-Peraturan Daerah yang memberatkan masyarakat atau menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini diharapkan akan lebih memberikan iklim sejuk dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

2. Kendala

Beberapa kendala eksternal yang diestimasikan dihadapi Jawa Tengah sampai dengan 2008, di antaranya adalah sebagai berikut :

Lingkungan global. Kecenderungan-kecenderungan global yang mengarah pada pasar bebas lebih banyak menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari negara Republik Indonesia juga lebih banyak memperoleh dampak negatif dari perdagangan yang cenderung bebas tersebut. Minimnya proteksi ekonomi bagi produk-produk domestik, telah menyebabkan membanjirnya produk-produk luar negeri ke Indonesia. Demikian juga di pasar global, dengan semakin longgarnya campur tangan Pemerintah maka telah banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mereka ternyata telah menjadi pesaing-pesaing yang tangguh bagi tenaga kerja Jawa Tengah. Negara-negara maju di satu sisi menuntut semua negara, termasuk negara-negara yang sedang berkembang untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksi, seperti pengenaan bea masuk dan kuota, tetapi di sisi lain mereka melakukan hambatan-hambatan masuk dalam bentuk standarisasi-standarisasi internasional seperti ISO 9000 dan ISO 14000, ISO 9000 berkaitan dengan standarisasi mutu, sedangkan ISO 14000 berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Bagi Jawa Tengah kedua standarisasi ini lebih merupakan kendala dibanding peluang. Banyak produk-produk andalan Jawa Tengah yang dipasarkan di pasar internasional belum mampu memenuhi standar sertifikasi ISO 9000 maupun ISO 14000.

Penetrasi dunia Barat di bidang ekonomi, ternyata diikuti juga dengan penetrasi di bidang budaya. Dalam rangka memperluas jaringan pemasaran mereka ke seluruh dunia termasuk Indonesia, mereka mencoba untuk memasukkan budaya global ke wilayah-wilayah pemasaran mereka. Budaya konsumeristik, materialistik dicoba untuk ditanamkan ke daerah-daerah pemasaran melalui berbagai media, misalnya promosi dan film. Penetrasi budaya ini ternyata dalam beberapa hal berhasil menimbulkan perubahan tata nilai dalam masyarakat Jawa Tengah ke arah perilaku yang cenderung individualistis, sekuler dan

konsumeristik. Perilaku-perilaku ini kurang menguntungkan bagi pembangunan daerah.

Isu terorisme global, gangguan kamtibmas dan gangguan sosial lainnya secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kendala-kendala bagi Jawa Tengah untuk dapat mengimplementasikan strategi pembangunannya dengan baik. Kepanikan masyarakat akan bahaya terorisme tidak hanya akan mengganggu sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan transaksi-transaksi luar negeri, tetapi juga sektor-sektor lain. Mobilitas penduduk terutama melalui udara, laut dan sektor pariwisata akan mengalami gangguan. Isu terorisme akan menyebabkan para pelaku ekonomi menjadi sangat berhati-hati dalam menjaga asetnya, transaksi bisnis akan semakin lamban, biaya asuransi semakin meningkat, semua ini dapat *menimbulkan global high cost economy*. *Global high cost economy* inilah yang diduga merupakan salah satu sebab akan terjadinya resesi global pada masa yang akan datang.

Bagi Jawa Tengah apabila resesi global ini benar-benar terjadi tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan. Hal ini mengingat ketergantungan ekonomi Jawa Tengah kepada luar negeri masih relatif besar.

Lingkungan regional. Lingkungan regional Jawa Tengah juga ditandai dengan mulai masuknya pemain-pemain baru dilingkungan ekonomi global. Negara-negara seperti China dan Korea Selatan, Vietnam ternyata tumbuh sangat cepat sehingga dalam waktu singkat negara-negara tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu macan dunia yang sangat tangguh. Pada saat ini telah banyak barang-barang dari China dan Korea Selatan yang membanjiri negara-negara Asean, termasuk Jawa Tengah. Masuknya barang-barang dari ke dua negara tersebut tentunya merupakan ancaman tersendiri bagi Jawa Tengah, tidak hanya di pasar global tetapi juga di pasar domestik.

Demikian juga keterbukaan China di bidang ekonomi dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Vietnam yang membuka diri terhadap investasi dari luar negeri, merupakan pesaing yang cukup berat bagi Jawa Tengah dalam mendapatkan investasi dari luar negeri. Reformasi yang dilakukan oleh China dan Vietnam ternyata telah mampu menghasilkan kepastian hukum dan tingkat efisiensi birokrasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, akibatnya investor luar negeri lebih berminat untuk melakukan investasi di China dan Vietnam dibandingkan di Indonesia. Mereka melihat investasi di kedua negara tersebut di samping akan memberikan prospek keuntungan yang lebih baik juga risiko investasi luar negerinya (*country risk*) relatif lebih kecil.

Kesadaran akan ancaman dari kompetisi global pada masing-masing negara Asean, telah menimbulkan semakin kuatnya keinginan untuk lebih mengembangkan aliansi-aliansi strategis dibidang ekonomi, baik yang bersifat bilateral, maupun multilateral. Sebagai contoh pada tingkatan multilateral Asean telah membentuk *Asean Free Trade Area (AFTA)*. Dalam AFTA masing-masing negara telah bersepakat bahwa untuk jenis-jenis komoditi yang telah disepakati yang dijual antar negara-negara Asean akan diberlakukan pasar bebas. Asean telah sepakat pada tahun 2003 mereka akan memberlakukan komitmen-komitmen tersebut

Kerjasama regional antar Asean di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan posisi strategis negara-negara tersebut, tetapi disisi lain antar negara tersebut sebenarnya adalah saling berkompetisi. Produk-produk yang dihasilkan negara-negara Asean relatif sama, demikian juga kompetensi yang dimilikinya baik di pasar komoditi maupun di pasar faktor juga relatif sama.

Perkembangan lingkungan regional juga diwarnai dengan turunnya pamor Indonesia di lingkungan negara-negara Asean. Indonesia yang pada masa lalu dianggap sebagai "Pemimpin" Asean, sekarang posisi tersebut sudah tidak dimiliki lagi. Semakin melemahnya posisi ini akan

memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral, maupun multilateral. Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu akan terkena dampak negatif dari perkembangan ini.

Lingkungan nasional. Dalam kaitan dengan lingkungan strategis nasional, pembangunan Jawa Tengah 2003-2008 masih dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk mengakselerasi program-program pembangunan. Saat ini Indonesia baru mengalami *recovery* dari krisis multi dimensi yang terjadi sejak pertengahan 1997, yang dampaknya ternyata masih sangat dirasakan pada berbagai kehidupan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif rendah, yaitu antara 4,9 persen (2000), sampai dengan 4 persen (2003), ternyata belum mampu memenuhi tuntutan terhadap pengentasan tingkat pengangguran terbuka, yang jumlahnya pada tahun 2001 sebanyak 8 juta orang, tahun 2002 sebanyak 9,1 juta orang, dan tahun 2003 diperkirakan mencapai 10,2 juta orang. Pada tingkat nasional, Indonesia juga masih dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi sebagai akibat belum tertanganinya masalah korupsi, kolusi dan nepotisme dengan baik. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor-investor luar negeri.

Indonesia sebenarnya kaya akan sumber kekayaan alam, namun karena pengelolaan yang tidak baik maka telah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. Usaha-usaha untuk memperbaiki kerusakan ini harus dilakukan segera, karena kerusakan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang, tetapi juga menimbulkan kesulitan-kesulitan yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk memasuki pasar global. Usaha-usaha untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut, memerlukan biaya besar, sehingga akan mengurangi kemampuan Pemerintah Pusat untuk

melakukan akselerasi terhadap program-program pembangunan di Jawa Tengah.

Dari sisi kuantitas sumber daya manusia Indonesia memang relatif banyak, namun dilihat dari kualitas masih perlu ditingkatkan, agar Sumber Daya Manusia tersebut mampu berkompetisi pada era global. Ada dua kelemahan utama SDM Indonesia untuk berkompetisi pada era global, yaitu kemampuan akses pada komunikasi global dan kemampuan akses pada teknologi global. Kemampuan berkompetisi tentu tidak hanya ditentukan oleh tingkat profesionalisme dari yang bersangkutan, tetapi juga akan sangat ditentukan oleh faktor kesehatan, nutrisi dan pendidikan yang mereka peroleh. Pengangguran dan kemiskinan yang menimpa sebagian dari penduduk Indonesia menyebabkan tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan mereka relatif rendah.

Pada tahun 2004 Indonesia akan melakukan pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden secara langsung. Hal ini perlu dicermati mengingat masyarakat Indonesia baru belajar demokrasi, sehingga kemungkinan timbulnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut perlu diantisipasi secara cermat.

Terpuruknya Indonesia di bidang ekonomi ternyata membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa. Semakin menurunnya taraf hidup masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran telah menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk semakin emosional dan cenderung berbuat negatif. Hal ini ditambah lagi dengan adanya pemahaman yang keliru dari sebagian masyarakat terhadap pengertian demokrasi, HAM, dan otonomi sehingga menghasilkan euforia yang cenderung kontra produktif.

Pengaruh budaya global yang cenderung sekuler, materialistik dan individualistik telah mulai merasuki sebagian dari masyarakat Indonesia. Merasuknya budaya ini menimbulkan kecenderungan semakin

menguatnya perilaku konsumeristik dan *demonstration effect* dari sebagian masyarakat Indonesia. Perilaku-perilaku inilah yang memberikan iklim kondusif bagi timbulnya KKN, sehingga KKN menjadi sangat membudaya di Indonesia.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Jawa Tengah mandiri, berdaya saing, sejahtera, berkelanjutan, menjadi pilar pembangunan nasional dilandasi oleh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan *Good Governance*,
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM;
3. Mengembangkan kerjasama sinergis antar daerah dan *stakeholders* pembangunan daerah;
4. Mengurangi kesenjangan;

5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan
6. Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan masyarakat.

C. Tujuan

Tujuan dari Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Bidang Ekonomi.

- 1) Menguatnya agribisnis dan agro industri di pedesaan.
- 2) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- 4) Meningkatnya daya saing produk usaha kecil menengah.
- 5) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata.

2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

- 1) Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia, (pendidikan, kesehatan, daya beli).
- 2) Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Meningkatnya stabilitas wilayah dengan mempertahankan iklim kondusif.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 5) Meningkatnya akuntabilitas publik.
- 6) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
- 7) Menurunnya jumlah pengangguran terbuka.

- 8) Menurunnya jumlah penyakit masyarakat (pekat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Bidang Fisik dan Infrastruktur.

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
- 2) Meningkatnya kelancaran transportasi dan telekomunikasi pada kawasan unggulan dan kawasan strategis serta membuka daerah terisolir.
- 3) Meningkatnya antisipasi dan penanganan kawasan bencana alam.
- 4) Meningkatnya keserasian dan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar bidang pembangunan.
- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana strategis propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008 dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

A. Tahap Akselerasi

Tahap akselerasi ditetapkan selama 100 hari sejak pelantikan Gubernur, bertujuan untuk konsolidasi seawal mungkin pembangunan Jawa Tengah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Program akselerasi ini diharapkan mampu membangun landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya, melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Konsolidasi Pasca Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

Kegiatan ini penting sebagai upaya untuk menciptakan iklim sejuk dan mensinergikan kembali berbagai potensi yang ada di masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kekuatan sosial politik yang sempat

saling berbeda pendapat maupun pandangan dalam rangka melaksanakan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam penjaringan serta penetapan figur Kepala Daerah Jawa Tengah untuk periode 2003-2008.

Oleh sebab itu dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Konsolidasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis;
- b. Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis;
- c. Forum komunikasi Ormas/LSM;
- d. Dialog interaktif eksekutif dan legislatif.

2. Program Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Program ini adalah konsekuensi normatif dari Peraturan Pemerintah 108 tahun 2000 yang menyatakan bahwa satu bulan setelah Gubernur dilantik, daerah harus menetapkan RENSTRA. RENSTRA ini bermanfaat untuk mewujudkan akuntabilitas publik sebagai rujukan kesatuan tindak dari berbagai potensi pembangunan yaitu instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena akan digunakan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah.

Program tersebut meliputi :

- a. Penyusunan Raperda Renstra; dan
- b. Penetapan Perda.

3. Meningkatkan Kualitas Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Dalam pelaksanaan program pembangunan Jawa Tengah tahun 2003 diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, serta semakin meningkatnya pelayanan kesehatan

khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui :

a. Pendidikan

- 1) Peningkatan partisipasi dan akses memperoleh pendidikan ;
- 2) Pemeliharaan sarana pendidikan ;
- 3) Subsidi bagi siswa kurang mampu ;
- 4) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan ;
- 5) Peningkatan pendidikan yang berbasis kompetensi.

b. Kesehatan

- 1) Penanganan penyakit menular ;
- 2) Antisipasi penyakit akibat banjir dan kekeringan ;
- 3) Penyediaan obat ;
- 4) Pelayanan kesehatan ;
- 5) Pengendalian penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

4. Penanganan kekeringan dan meminimalkan potensi banjir

Program-program pembangunan Jawa Tengah tahun 2003 diharapkan mampu menangani penderitaan masyarakat akibat bencana banjir dan kekeringan, sehingga dalam jangka pendek dapat keluar dari penderitaan. Program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui:

a. Penanganan Kekeringan

- 1) Pompanisasi sumur artesis;
- 2) Konservasi sumber air;
- 3) Bantuan air bersih;

- 4) Bantuan sarana produksi untuk tanaman mengalami kekeringan (*puso*).

b. Penanganan Banjir

- 1) Penanganan jaringan irigasi di wilayah potensi banjir;
- 2) Penyediaan peralatan penyelamatan banjir;
- 3) Penyediaan sarana tanggap darurat.

5. Distribusi sembilan bahan pokok

Dalam pelaksanaan program pembangunan Jawa Tengah tahun 2003 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat serta dapat merayakan hari raya secara lebih layak. Program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Antisipasi ketidakterersediaan sembilan bahan pokok menjelang hari Idul Fitri/ Natal dan Tahun Baru.
- b. Koordinasi tata niaga sembilan bahan pokok.

6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Dalam pelaksanaan program pembangunan Jawa Tengah tahun 2003 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya secara lebih baik. Program-program pembangunan dilaksanakan melalui :

a. Jalan

Mempercepat perbaikan jalan dan jembatan khususnya di jalur utama Pantai Utara (Pantura) serta jalan-jalan lain akibat bencana alam.

b. Perhubungan

- 1) Percepatan penyediaan rambu-rambu lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura).

- 2) Pembentukan Tim Pengkaji Khusus dan mengkonsultasikan ke Pusat dalam rangka mendorong perpanjangan landas pacu Bandara A.Yani Semarang serta mengkomunikasikan kepastian pelaksanaan penyempurnaan fasilitas Bandara Adi Soemarmo Surakarta oleh investor.
- 3) Pembentukan Tim Pengkaji Khusus dalam mempercepat realisasi Jalan Tol Semarang – Surakarta (termasuk pengkajian ganti untung tanah penduduk yang terkena proyek), penyusunan rencana rute dan pre feasibility study (*Pre FS*).
- 4) Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Jaringan Layanan Kereta Api, penyusunan studi kelayakan dan penyiapan naskah kerjasama (MOU) Pemerintah Propinsi dengan PT KAI.

c. Sumberdaya Air

- 1) Perkuatan tebing dan perbaikan tanggul di wilayah sungai potensial banjir;
- 2) Pengendalian banjir melalui normalisasi sungai.

7. Mempercepat Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dalam pelaksanaan program pembangunan Jawa Tengah Tahun 2003 diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah guna menyediakan akses permodalan, pasar dan kemampuan dalam penguasaan teknologi. Program Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sarana produksi ;
- b. Bantuan modal bergulir koperasi dan peningkatan UKM ;
- c. Penataan pameran misi *Trade Tourism Industry (TTI)*;
- d. Penguatan akses pasar ;

- e. Pengembangan kawasan, *clustering*, agropolitan, kawasan sentra produksi (KSP), dan permukiman perkebunan.

B. Tahap Pembangunan 2003 - 2008

Dalam rangka memberikan gambaran pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, maka disusun pentahapan pelaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008, sebagai berikut :

1. Tahap Penguatan Kemandirian (2004 – 2005)

Pada tahap ini program kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penataan segenap potensi agar secara sinergis dapat memperkuat kemandirian Jawa Tengah.

Bidang-bidang pembangunan tertentu yang memiliki kinerja masih kurang harus mendapatkan perhatian lebih besar agar dapat mendukung bidang-bidang yang lain secara optimal. Sedangkan bidang-bidang pembangunan tertentu yang berfungsi sebagai “penghela” bisa dipacu untuk dapat bersinergi secara optimal.

Pada tahap ini juga dilaksanakan upaya-upaya peningkatan produktivitas terutama produk-produk strategis (seperti pangan, sandang, tanaman obat asli Indonesia dan sebagainya). Pengembangan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri ditujukan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam rangka mencapai penguatan kemandirian.

2. Tahap Peningkatan Daya Saing (2006 – 2007)

Tahap ini merupakan peningkatan dari tahap penguatan kemandirian, masing-masing bidang pembangunan diharapkan telah berkembang sampai dengan tingkat optimal, sehingga dapat terbentuk

sinergisme antar bidang dan wilayah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan.

Upaya peningkatan produktivitas terus dilakukan dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk. Disamping itu terus diupayakan terjadinya iklim yang kondusif berupa keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan suasana politik yang sejuk, untuk lebih menaikkan daya tarik investasi dan kenyamanan (amenitas).

Pelayanan publik perlu selalu ditingkatkan melalui kemudahan akses, kecepatan, transparansi dan keterjangkauan. Dengan peningkatan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri ditujukan untuk keberlanjutan pembangunan dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam rangka mencapai penguatan kemandirian.

3. Tahap Pengembangan Kemandirian, Daya Saing dan Eksistensi Jawa Tengah Sebagai Pilar Pembangunan Nasional (2007-2008)

Pada tahap pengembangan ini masing-masing bidang pembangunan di samping tumbuh positif, diharapkan memiliki kinerja yang kokoh/kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kondisi eksternal. Pada tahap ini peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, kualitas pelayanan publik serta iklim yang kondusif terus dikembangkan. Sehingga kinerja yang telah dicapai menjadi stabil dan tahan terhadap guncangan atau pengaruh-pengaruh eksternal, dengan demikian sustainabilitas lebih terjamin. Peningkatan daya saing tenaga kerja perlu diupayakan melalui pengembangan tenaga kerja luar negeri yang dilengkapi dengan laboratorium kesehatan.

Dengan berkembang dan semakin mantapnya kemandirian dan daya saing diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar pembangunan nasional, ditunjukkan oleh kontribusi yang

signifikan. Prestasi yang telah dicapai tersebut diharapkan dapat menjamin keberlanjutan tahap pembangunan etape berikutnya.

BAB V

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Pembangunan Daerah diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah yang mengarah pada 3 (tiga) bidang strategis yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan, serta Fisik dan Infrastruktur.

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah mendesak dan melakukan akselerasi dalam rangka membangun landasan bagi program-program 2003-2008. Strategi yang ditempuh adalah melakukan penajaman, menyelesaikan masalah-masalah mendesak dan membangun landasan konseptual untuk program-program berikutnya.

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2003 – 2008 secara lebih rinci kebijakan dan strategi untuk masing-masing bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan dan Strategi Bidang Ekonomi

Pada Tahun 2003-2009 diperkirakan angkatan kerja akan bertambah 10.339.000 orang, dengan pertumbuhan angkatan kerja rata-rata diperkirakan sebesar 4,5 persen per tahun. Pada Tahun 2009 jumlah angkatan kerja akan mencapai 22.295.000 orang. Angkatan kerja tersebut

sudah termasuk 984 ribu orang penganggur terbuka Tahun 2002, yang diperkirakan meningkat pada Tahun 2003 menjadi 1.027 ribu orang. Tingkat pengangguran 3 persen per tahun, yang menurun dari 6,01 persen pada Tahun 2003 menjadi 1,5 persen pada Tahun 2009. Dengan menganggap bahwa kemampuan daya serap lapangan kerja tidak menurun, pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata diperkirakan sebesar 5,32 persen per Tahun. Dengan demikian pada akhir 2009 jumlah kesempatan kerja di Jawa Tengah akan mencapai 21.961.000 orang.

Untuk dapat mencapai target tersebut, yakni pertumbuhan kesempatan kerja sebesar rata-rata 5,32 persen tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,5 persen atau rata-rata per Tahun 3 persen, pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 4,49 persen per tahun.

Pada periode 2003-2009 harus terjadi peningkatan efisiensi perekonomian. Untuk itu rasio tambahan modal terhadap produk regional (ICOR) harus turun, dari 4,66 pada Tahun 2003 menjadi 3,48 pada Tahun 2009. Penurunan ICOR ini diharapkan akan dapat mampu menekan kebutuhan modal untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 4,66 per tahun diperlukan investasi sebesar rata-rata 17,47 persen dari PDRB per tahun.

Kebutuhan investasi periode 2003-2009 tersebut harus dicapai dari pembentukan modal pemerintah maupun swasta. Investasi pemerintah rata-rata sebesar 25 persen dari kebutuhan investasi per Tahun. Oleh karena itu, investasi swasta diharapkan mencapai 75 persen dari kebutuhan investasi per tahun. Kebutuhan investasi swasta adalah sebesar Rp. 26.388 miliar (2004), Rp. 30.936 miliar (2005), Rp. 34.227 miliar (2006), Rp. 33.289 miliar (2007), Rp. 35.109 miliar (2008) dan Rp. 40.014 miliar (2009). Perkiraan kebutuhan investasi ini didasarkan pada perkiraan inflasi rata-rata sebesar 7 persen per tahun pada Tahun 2003-2009.

Untuk mencapai target sasaran, maka ditempuh kebijakan dibidang ekonomi pada peningkatan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka

memperbaiki struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian dan daya saing dengan memprioritaskan pada sektor Pertanian dalam arti luas, industri kecil menengah dan/atau usaha kecil menengah dan pariwisata.

Strategi yang ditempuh adalah :

1. Memperkuat agrobisnis dan agro industri di pedesaan dengan memfasilitasi petani dan *stakeholders* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, memperluas akses pasar, permodalan serta memperkuat kinerja kelembagaan pedesaan.
2. Menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dengan memperkuat jalur Selatan-selatan dan kawasan tertinggal untuk meningkatkan mobilitas ekonomi di wilayah tersebut, serta pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi dengan meningkatkan sinergi jejaring antara kawasan dengan *outlet* regional dan global, maupun antara kawasan sentra dengan *hinterland* nya.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan iklim kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi.
4. Meningkatkan daya saing produk UKM di pasar global dengan menerapkan standar produksi internasional, negeri serta membantu pengembangan sistem pen-jaminan sesuai ketentuan perbankan dan pranata sosial ekonomi.
5. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi melalui obyek-obyek wisata yang berbasis ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan melalui sektor-sektor pendukung yang meliputi :

1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - a. **Pertanian.**

Kondisi saat ini. Bidang Pertanian memiliki misi untuk menyediakan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Misi penyediaan pangan sampai dengan Tahun 2003 dapat dicapai yang ditandai dengan jumlah produksi yang surplus. Namun demikian pendapatan dan/atau tingkat kesejahteraan petani masih rendah, antara lain ditandai masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat di perkotaan akan meningkatkan jumlah, kualitas dan keragaman permintaan produk pertanian, sedangkan di sisi lain dengan masuknya produk pertanian dari luar negeri dengan harga dan kualitas yang bersaing, akan mengurangi peluang pasar produk lokal menyebabkan menurunnya kegairahan produksi pertanian di masyarakat. Perbedaan potensi produksi pangan dan pola panen raya yang diikuti masa paceklik, mengakibatkan distribusi ketersediaan pangan tidak merata di setiap tempat dan setiap waktu, hal tersebut menciptakan potensi kerawanan pangan dan jatuhnya harga produk pertanian pangan dari petani/produsen.

Sampai dengan tahun 1998 pola konsumsi pangan penduduk Jawa Tengah untuk komoditas buah dan sayur serta pangan hewani masih dibawah standar Pola Pangan Harapan (PPH) nasional (standar PPH buah 92 Kkal per Kap, standar PPH sayur 125 Kkal per Kap, serta standar PPH pangan hewani 105 Kkal per Kap). Angka kecukupan energi untuk konsumsi penduduk Jawa Tengah tahun 2002 sebesar 1.885,5 Kkal/Kap/hari, besaran ini masih dibawah angka nasional sebesar 2.200 Kkal/Kap/hari. Angka kecukupan konsumsi protein nasional sebesar 55 gr/Kap/hari, sedangkan untuk Jawa Tengah baru 48,2 gr/Kap/hari. Kecukupan konsumsi protein hewani Nasional sebesar 10 gr/kap/hari. Pada Tahun 2002 konsumsi protein hewani Jawa Tengah baru mencapai 4,16 gr/kap/hari dari standar 10 gr/kap/hari. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Berkembangnya pemukiman dan industri semakin mempercepat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Data menunjukkan laju alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian rata-rata 0,15 % per Tahun. Selain itu, luas pemilikan lahan pertanian oleh keluarga petani semakin sempit (\pm 0,3 Ha per rumah tangga petani), dengan teknologi dan ketrampilan yang masih rendah, sehingga dalam melakukan usaha produksi masih belum efisien dan sulit berkompetisi.

Permasalahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Upaya peningkatan produksi pertanian masih dihadapkan pada kendala-kendala, antara lain pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah yang ditandai dengan masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masih rendah. Penguasaan teknologi dan ketrampilan kegiatan yang masih rendah. Distribusi ketersediaan pangan yang tidak merata dan menciptakan kerawanan pangan serta jatuhnya harga produk pertanian pangan pada saat panen raya. Kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Masih terbatasnya produktivitas tanaman pangan. Belum optimalnya standar mutu dan prosedur keamanan produksi pangan. Terbatasnya kemampuan akses pasar hasil produksi, terbatasnya penyediaan benih unggul, terbatasnya permodalan usaha tani dan rendahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan. Terbatasnya penerapan teknologi pangan. Terbatasnya ketrampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha berbasis agribisnis. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan on farm dan off farm. Masih terbatasnya ketersediaan, akses dan distribusi informasi pertanian.

Permasalahan Perkebunan.

Permasalahan adalah kelembagaan petani belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, rendahnya produktivitas dan mutu hasil produksi perkebunan,

penguasaan teknologi dan ketrampilan yang masih rendah. Implementasi pengendalian hama terpadu secara ramah lingkungan belum merata. Terbatasnya kualitas dan kuantitas input dan/atau sub sistem hulu, rendahnya kualitas hasil dan pengolahan hasil. Belum optimalnya kinerja kelembagaan dan sarpras, terbatasnya kemampuan dan akses pemasaran.

Permasalahan Peternakan. Permasalahan yang dihadapi peternakan adalah belum optimalnya kemampuan produksi untuk mendukung ketersediaan bahan pangan. Perlunya ditingkatkannya kinerja kelembagaan dalam memberikan pelayanan publik bidang peternakan. Banyak dilakukan Pemotongan Ternak Besar Bertanduk betina produktif. Belum cukup tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik bidang peternakan. Kurang tersedianya bahan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal dalam jumlah yang cukup, karena terjadinya tindak kejahatan pemalsuan dan penyelundupan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Belum tercukupinya pemenuhan input peternakan baik kualitas maupun kuantitasnya, lemahnya akses pemasaran dan permodalan peternak. Belum optimalnya pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis, kurangnya Kualitas dan Kuantitas tenaga pelayanan dan SDM Peternakan.

Kebijakan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: (1) pengembangan sumber daya pertanian yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan, melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi; (2) pendekatan pembangunan melalui sistem agrobisnis dan kawasan, dengan pengembangan kinerja masing-masing subsistem agrobisnis, serta membangun sinergi jejaring antara simpul-simpul sistem agrobisnis; (3) pengembangan wilayah; (4) penanganan kemiskinan; (5) optimalisasi investasi

pertanian; serta (6) pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektor dan lintas kabupaten/kota.

Tujuan. Adapun tujuan pembangunan pertanian, meliputi: (1) tercapainya ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan wilayah, serta terwujudnya sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal setiap daerah; (2) meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas petani pada barang-barang modal dan teknologi yang diperlukan baik untuk agrobisnis hulu (*upstream*) dan agrobisnis hilir (*downstream*) maupun untuk budidaya atau usaha tani (*on farm*) pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan ; (3) meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dengan mendayagunakan secara optimal barang modal, teknologi, sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai agro ekosistem; (4) meningkatnya mutu dan diversifikasi produk pertanian (dalam arti luas) guna memperbesar nilai tambah, memperluas pasar, baik pasar lokal, regional maupun internasional; (5) menguatnya posisi tawar petani dan meningkatnya nilai tambah yang diminati petani, serta meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP); (6) tercapainya iklim dan kepastian berusaha agrobisnis dan pengembangan kawasan terpadu; (7) optimalnya fungsi sarana dan prasarana di bidang pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Strategi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi pembangunan pertanian yang ditempuh, melalui : (1) peningkatan kemampuan manajemen usaha tani ; (2) pengembangan skala usaha ekonomi dan kemitraan, (3) pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan, (4) penyebaran penerapan teknologi, (5) pengaturan distribusi produksi dalam menaggulangi fluktuasi produksi guna menjamin penyediaan produksi merata sepanjang tahun, (6) pengembangan kelembagaan ekonomi di pedesaan, (7)

peningkatan produktivitas tanaman pangan, (8) pengamanan dan penyelamatan hasil produksi, (9) peningkatan produktivitas dan pengembangan tanaman hortikultura, (10) pengamanan dan penyelamatan hasil produksi hortikultura, (11) mengembangkan prinsip jejaring dan kerjasama dengan seluruh sub sistem agribisnis perkebunan melalui peningkatan kinerja kelembagaan secara efisien, efektif dan transparan, (12) peningkatan Kemampuan manajemen usaha tani, (13) optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan mutu hasil produksi perkebunan, (14) penyebaran penerapan teknologi, (15) revitalisasi penyuluhan, (16) optimalisasi pemantapan sarana dan prasarana, (17) peningkatan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit dan pakan,(18) pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, (19) penumbuhan kantong Bibit ternak yang berkualitas, (20) peningkatan kinerja pelayanan bidang peternakan, (21) penyelamatan asset ternak bibit, (22) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public baik kuantitas maupun kualitasnya, (23) peningkatan kualitas kesehatan ternak, (24) peningkatan pengawasan distribusi produk peternakan, (25) peningkatan dan kemampuan manajemen usaha tani, (26) pengembangan perbenihan, (27) pengembangan kelembagaan agribisnis, (28) penerapan dan penyebaran teknologi, (29) mengembangkan panagan olahan dan mutu hasil sesuai kebutuhan konsumen, (30) memperkuat fungsi pemasaran melalui sub terminal agribisnis dan pengembangan jaringan pemasaran, (31) pembinaan penerapan teknologi pangan standar mutu serta keamanan pangan, (32) pembinaan produksi komoditas unggulan, (33) pembinaan perwilayahan komoditas, (34) pembinaan dan pengembangan sentra agribisnis,(35) pemasyarakatan produk hortikultura tanaman pangan, (36) penyediaan data dan informasi hortikultura dan tanaman pangan, (37) optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, (38) pemenuhan input peternakan yang diperlukan peternak dalam usaha khususnya benih

dan bibit yang berkualitas,(39) perluasan akses pemasaran dan permodalan yg diperlukan peternak, (40) pengembangan kawasan sentra peternakan, (41) peningkatan standar kualitas produk, (42) pengembangan sistem dan usaha agribisnis serta (43) peningkatan Kualitas SDM Aparat dan Peternak.

Program. Untuk mencapai tujuan Pembangunan pertanian ditempuh program sebagai berikut :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program ini untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat, melalui penyediaan input dan sarana prasarana produksi pangan, peningkatan keanekaragaman produksi, menjamin ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan, pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani, pengembangan produksi dan budaya pangan lokal, dan pengembangan kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2) Pengembangan Agrobisnis.

Program ini untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agrobisnis subsistem hulu, subsistem usaha tani (*on farm*), subsistem hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran hasil) dan subsistem penunjangnya. Pengembangan sistem agrobisnis diimplementasikan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan beserta jejaring agrobisnis yang terjalin secara sinergi, sesuai keunggulan masing-masing daerah. Pusat-pusat agrobisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga secara bertahap agrobisnis daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan jejaring perekonomian regional dan dunia.

b. Perikanan dan Kelautan.

Kondisi Saat ini. Garis pantai sepanjang 791,76 km, terdiri atas panjang Pantai Utara 502,69 km dan panjang Pantai Selatan 289,07 km belum termasuk pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 34 buah. Selain itu, Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang sangat besar, berupa berbagai jenis ikan pelagis kecil (*small pelagic*) dan ikan demersal sebesar 796.640,00 ton/tahun (laut Jawa) dan potensi udang dan ikan-ikan pelagis besar seperti Tuna, Hiu, dan lain sebagainya (Samudra Indonesia) sebesar 1.076.890,00 ton/tahun. Propinsi Jawa Tengah yang diapit oleh tiga propinsi besar, yaitu Propinsi Jawa Timur di sebelah Timur, Propinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, mempunyai keuntungan tersendiri dari segi pemasaran, baik ikan hidup atau segar maupun pemasaran benih ikan.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang kaya dengan perairan pedalaman, diperkirakan luasnya mencapai 44.328,46 Ha, terdiri dari waduk (23.545,75 Ha), sungai (15.876,20 Ha), rawa (3.660,20 Ha), dan telaga (1.246,31 Ha). Untuk waduk saja, di Jawa Tengah terdapat 37 buah waduk, di antaranya terdapat waduk-waduk besar yang sangat potensial, yaitu Waduk Gajahmungkur (Kab. Wonogiri), Waduk Wadaslintang (Kab. Wonosobo), Waduk Mrica (Kab. Banjarnegara), dan Waduk Kedung Ombo (Kab. Sragen, Boyolali, dan Grobogan). Pada waduk-waduk besar tersebut telah berkembang pula budidaya ikan di karamba jaring apung dengan komoditas unggulan Nila Merah.

Dari potensi yang tersedia tersebut, pemanfaatan hingga tahun 2002 baru mencapai 13,50%-nya saja. Hal ini menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya di Jawa Tengah masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan baik untuk usaha budidaya jaring karamba

apung, kolam, sawah maupun budidaya laut, sedangkan pengembangan usaha budidaya air payau melalui perluasan areal masih terbuka peluang pengembangannya di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah, akan tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian dan secara ketat dengan memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove. Potensi perairan pedalaman juga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal ditinjau dari kondisi agroklimat sangat mendukung budidaya perikanan untuk meningkatkan kontribusi terhadap produksi perikanan Jawa Tengah.

Sepanjang Pantai Utara yang membentang dari Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Rembang, merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan yang menggantungkan pada laut sebagai ladang perburuannya. Jumlah nelayan di Jawa Tengah pada tahun 2002 tercatat 150.461 orang, yang menyebar di Pesisir Utara sebanyak 139.534 orang, dan di pesisir Selatan Jawa Tengah yang meliputi Cilacap, Purworejo, Kebumen dan Wonogiri hanya sebanyak 10.927 orang, jauh lebih sedikit bila dibandingkan nelayan Pesisir Utara. Hal ini disebabkan kondisi pantai yang berbeda, musim yang tidak bersamaan serta keadaan laut yang memang berbeda, sehingga memberikan warna tersendiri terhadap teknik penangkapan ikan di Pantai Selatan. Jumlah desa pesisir di Jawa Tengah tercatat sebesar 426 desa, yang terbagi atas 95 desa di pesisir Selatan dan 331 desa di pesisir Utara. Kondisi ekonomi nelayan tersebut masih memprihatinkan karena kemiskinan.

Jumlah armada perikanan tangkap di laut di Jawa Tengah tahun 2002 sebanyak 20.551,00, yang tersebar di Pantai Utara 17.608 buah dan di Pantai Selatan sebanyak 2.943,00 buah. Pada umumnya armada perikanan tangkap yang ada masih didominasi oleh armada motor tempel yang jumlahnya mencapai 16.622,00 buah (2002). Hal ini menunjukkan bahwa armada perikanan laut di Jawa Tengah masih didominasi oleh perikanan rakyat atau perikanan skala kecil,

sedangkan armada penangkap ikan yang menggunakan kapal motor berjumlah 2.925 buah (2002). Kapal motor dengan alat *purse seine* di Pantai Utara Jawa Tengah, dalam operasi penangkapannya telah mencapai *fishing ground* hingga Pulau Matasiri -Kalimantan, Pulau Masalembu – Jawa Timur, Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Pulau Pejantan di Selatan Natuna, dengan lama operasi penangkapan mereka mencapai 30 – 40 hari per trip.

Pukat cincin (*purse seine*) merupakan jenis alat tangkap yang dominan dan kontribusinya paling banyak terhadap produksi perikanan Jawa Tengah, dimana dalam periode 1998 – 2002, rata-rata mencapai 62,25 %, diikuti pukat kantong sebesar 18,90 %, jaring insang 11,04 %, dan pancing 5,72 %.

Untuk mengkomodir usaha penangkapan ikan di laut, maka di Jawa Tengah terdapat 77 buah TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dimana 67 buah di antaranya terdapat di Pantai Utara, sedang 10 buah TPI berada di Pantai Selatan. Dari 77 buah TPI yang ada, dua buah TPI masuk dalam Unit Pelaksana Teknis Pusat yaitu PPNP (Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan), dan PPSC (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap). Dua buah TPI yang menjadi penghasil utama produksi perikanan laut di Jawa Tengah adalah PPNP Pekalongan dan PPI Bajomulyo Pati.

Kegiatan usaha nelayan tidak dapat dipisahkan dari peran KUD Mina sebagai lembaga ekonomi nelayan. Dari 22 buah KUD Mina di Jawa Tengah, seluruhnya sudah mencapai predikat KUD Mandiri, bahkan KUD Makaryo Mino Pekalongan telah mendapatkan predikat KUD Mandiri Inti.

Permasalahan. Upaya peningkatan produksi perikanan masih dihadapkan pada kendala-kendala yaitu : (1) masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai seperti Pelabuhan Perikanan, PPI dan TPI; (2) masih rendahnya kemampuan SDM nelayan, baik

dibidang penangkapan, pasca panen , manajemen usaha dan mengadopsi penerapan teknologi penangkapan; (3) masih terbatasnya system informasi perikanan tangkap untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap; (4) terdapat kecenderungan kemerosotan produktivitas dan mutu lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang melewati kapasitas daya dukung lingkungan; (5) masih terbatasnya sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan baik air payau maupun air tawar, menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan; (6) masih terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kesehatan ikan maupun lingkungan; (7) masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM pembudidaya ikan maupun manajemen usaha; (8) masih terbatasnya ketersediaan induk ikan unggul dan benih ikan yang berkualitas dalam pengembangan usaha budidaya ikan; (9) masih terbatasnya system informasi perikanan budidaya untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan budidaya; (10) belum berkembangnya kawasan pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran produk-produk hasil perikanan yang berdaya saing dipasar domestik dan ekspor; (11) masih rendahnya kesadaran nelayan maupun para pelaku usaha perikanan tentang perijinan usaha Perikanan; (12) masih rendahnya mutu produk hasil perikanan akibat kesalahan dalam penanganan hasil perikanan; (13) kurangnya sarana dan prasarana LPPMHP sebagai laboratorium pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan; (14) masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengolah hasil perikanan.

Kebijakan. kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan untuk keseimbangan pembangunan perikanan dan kelautan di Pantai Utara dan Pantai Selatan yang ditekankan pada: (1) Peningkatan produksi melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, baik sumberdaya pulih, maupun sumberdaya tidak pulih

untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional, melalui: Peningkatann sarana dan prasarana aparatur serta kualitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan; Pengembangan penangkapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan di laut dan perairan pedalaman; Pengembangan kawasan budidaya laut, payau, dan air tawar yang menerapkan sistem usaha yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan; Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas usaha disertai peningkatan kelembagaan pendukungnya; Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, terutama kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumberdaya alam; (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal, melalui: Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan; peningkatan penyediaan pangan dan konsumsi masyarakat terhadap sumber protein ikan dan bahan baku industri di dalam negeri serta ekspor

Tujuan. Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan, meliputi: (1) Meningkatkan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya; (2) Meningkatkan Ekspor Hasil Perikanan. (3) Meningkatkan pendapatan nelayan; (4) Mengoptimalkan Konsumsi Makan Ikan.

Strategi. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah: peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan pada wilayah perairan potensial dan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan padat tangkap; peningkatan daya saing yang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemberian akses dan kesempatan yang sama pada seluruh pelaku usaha dibidang perikanan; peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi sumberdaya perikanan tangkap

untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap; mengembangkan perikanan budidaya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan pada wilayah perairan potensial serta pengelolaan kawasan berbasis kegiatan budidaya dan berwawasan lingkungan; meningkatnya sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya; meningkatkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem sumberdaya perikanan budidaya melalui restocking benih ikan diperairan pedalaman, laut dan budidaya yang ramah lingkungan serta penataan zona kawasan perlindungan dan pengembangan budidaya; meningkatkan sarana dan prasarana penanganan serangan hama, penyakit ikan serta kualitas lingkungan ; peningkatan kualitas SDM pembudidaya ikan; mengembangkan teknologi perbenihan dan budidaya ikan melalui penggunaan induk unggul; peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi sumberdaya perikanan budidaya untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan budidaya; meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan serta mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya perikanan melalui pengembangan usaha pemasaran; peningkatan kesadaran perijinan usaha bagi pelaku usaha perikanan untuk pengembangan usahanya; meningkatkan pengelolaan dan penanganan serta pengolahan hasil-hasil perikanan melalui penerapan PMMT; meningkatkan sarana prasarana LPPMHP serta peningkatan ketrampilan dan kemampuan SDM pengolah hasil perikanan.

Program. Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1) Program Penguatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini untuk : peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan

tangkap; Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; Penguatan dan pengembangan sarana perikanan tangkap, antara lain kapal ikan, alat tangkap dan penerapan cold chain system; Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan Tempat Pendaratan Ikan; Relokasi usaha nelayan dan rasionalisasi armada penangkapan ikan serta pengalihan pada usaha ekonomi alternatif termasuk budidaya, perikanan tangkap di perairan pedalaman, pengolahan dan pemasaran; Penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan; Pengembangan statistik dan sistem informasi perikanan tangkap; Peningkatan kualitas SDM nelayan.

2) Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Program ini untuk : Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan; Pembangunan dan pengembangan sistem perbenihan dan budidaya; Pengendalian mutu dan pengembangan nilai tambah produk budidaya; Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; Pengembangan sistem rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya perikanan budidaya; Penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan; Peningkatan kualitas SDM pembudidaya ikan; Pengembangan statistik dan sistem informasi perikanan budidaya.

3) Program Pengembangan Agrobisnis

Program ini untuk : Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan usaha perikanan; Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan; Pengembangan usaha dan bisnis perikanan dan kelautan; Pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran

dan pengolahan hasil perikanan; Penerapan dan pengembangan teknologi pasca panen; Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional LPPMHP; Peningkatan informasi pasar; Peningkatan SDM pengolah hasil perikanan.

c. Kehutanan

Kondisi Saat ini. Berdasarkan Undang Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, luas lahan yang berfungsi hutan minimal adalah sebesar 30 % dari luas daratan. Di Propinsi Jawa Tengah luas lahan yang berfungsi hutan hanya sebesar 869.934,61 ha (26,73%), sehingga kekurangan luas lahan yang harus dipenuhi sebesar 106.3419,27 ha atau 3,27 %. Kawasan hutan negara tersebut tidak semuanya dalam kondisi optimal, sebab hutan yang dikelola PT Perhutani tersebut mendapat gangguan yang sangat serius. Sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 jumlah pohon yang dicuri dan dijarah sebanyak 8.041.222 batang dengan kerugian finansial sebesar Rp. 1.444.987.772.000,-. Kawasan hutan yang rusak ini sangat membahayakan keseimbangan lingkungan, yaitu terjadinya kerusakan tata air, iklim *mikro* serta konsekuensi banjir dan kekeringan yang dapat menggerogoti kemampuan ekonomi masyarakat dan kemandirian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, keseimbangan lingkungan harus dipulihkan yaitu antara *up land* dan *low land* agar sirkulasi tata air kembali teratur, kontinyu dan optimal.

Kebutuhan bahan baku kayu untuk 977 buah industri kayu di Propinsi Jawa Tengah adalah sebesar $\pm 3.700.000$ m³ per tahun. Diluar keperluan bahan baku industri, untuk kebutuhan masyarakat diperlukan $\pm 2.900.000$ m³ per tahun. Produksi kayu dari PT. Perhutani ± 600.000 m³/tahun dan dari hutan rakyat $\pm 1.700.000$ m³ per tahun, kekurangannya sebesar $\pm 4.300.000$ m³ per tahun dipenuhi dari luar Pulau Jawa.

Permasalahan pembangunan kehutanan, antara lain: (1) Masih terbatasnya data informasi kawasan hutan dan lahan daerah aliran sungai (DAS); (2) Masih rendahnya pemanfaatan lahan dan hutan; (3) Belum intensifnya usaha rehabilitasi hutan dan lahan; (4) Banyaknya peredaran flora dan fauna yang tidak dilindungi serta peredaran hasil hutan ilegal; (5) Masih rendahnya peran dan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan; (6) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai pada hulu daerah aliran sungai (DAS).

Kebijakan. Kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan pada: (1) Meningkatkan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan; (2) meningkatkan kegiatan penghijauan (reboisasi), rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi hutan lindung; (3) intensifikasi pengusahaan hutan dan perluasan areal hutan rakyat secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani hutan rakyat; (4) Mengembangkan keserasian pola pemanfaatan kawasan hutan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM); (5) memanfaatkan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora/fauna; (6) menegakkan hukum dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam rangka pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; (7) meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana pengelolaan hutan.

Tujuan. Tujuan Pembangunan kehutanan meliputi: (1) tercapainya tertib pemanfaatan hutan, baik untuk fungsi lindung maupun fungsi produksi; (2) perbaikan daerah *up land* melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatnya produktivitas hutan dan lahan serta berkembangnya hutan rakyat; (4) meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dari penjarahan, penebangan liar, kebakaran dan

peredaran kayu ilegal; (5) meningkatnya produktivitas hutan; (6) meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (7) meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang kehutanan; (8) membuka peluang usaha bagi masyarakat baik didalam maupun di luar kawasan hutan negara; (9) meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia kehutanan dan tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan hutan.

Strategi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah : pemantapan data dan informasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS); perluasan dan diversifikasi pemanfaatan hutan dan hasil hutan melalui jasa lingkungan dan keanekaragaman flora fauna; peningkatan kelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat dan badan usaha, serta pengembangan hutan desa dan hutan sekolah; peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengamanan hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan; pemantapan kelembagaan dengan sarana dan prasarana pengelolaan hutan serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia; peningkatan rehabilitasi dan pelestarian lingkungan alam

Program. Strategi tersebut dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1) Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan.

Program ini untuk Pemantapan proses perencanaan kehutanan secara berkelanjutan sebagai pedoman yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, dengan didukung oleh ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat, baik mengenai potensi, struktur maupun komposisi.

2) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan.

Program ini untuk pengelolaan sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat secara adil, dengan tetap menjaga kelestariannya.

3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini untuk pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dengan menggunakan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan partisipatif masyarakat, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga lingkungan dapat optimal.

4) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Program ini untuk : pencegahan, pem batasan dan pengurangan kerusakan fisik hutan termasuk kawasan dan hasil-hasilnya yang disebabkan oleh perambahan, penebangan liar, penjarahan, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit; mempertahankan, menjaga hak-hak perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan hutan, termasuk perlindungan atas investasi, hasil-hasil maupun sarana prasarana; Peningkatan kesadaran, kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan.

5) Pengembangan Kelembagaan.

Program ini untuk penataan dan pemantapan kelembagaan melalui keterpaduan program, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyiapan peraturan perundangan dan peralatan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

6) Pengelolaan Lingkungan Alam

Program ini untuk mengupayakan rehabilitasi pada hulu daerah aliran sungai sehingga dapat mengurangi laju erosi dan sedimentasi.

2. Perindustrian dan Perdagangan.

Kondisi Saat ini. Berbagai perkembangan menunjukkan arah peningkatan dari tahun 2000 menuju 2002. Perkembangan unit usaha mengalami peningkatan dari tahun 2000 sejumlah 642.271 unit usaha menjadi 644.196 unit usaha pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 menjadi 644.218 unit usaha. Jumlah investasi juga mengalami peningkatan dari Rp.12,7 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp.13,4 trilyun pada tahun 2002. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.858.667 orang pada tahun 2000 menjadi 2.817.167 orang pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 menjadi 3.117.167 orang.

Nilai produksi sebesar Rp. 21.401.837.000.000,- pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 21.627.737.000.000,- pada tahun 2002. Nilai ekspor non migas mengalami penurunan dari US \$ 1,85 milyar pada tahun 2000 menjadi US \$ 1,74 milyar pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 meningkat menjadi US \$ 1,88 milyar. Nilai impor non migas mengalami penurunan dari tahun 2000 sebesar US\$ 0,966 milyar menjadi US\$ 0,812 milyar pada tahun 2001 dan tahun 2002 menjadi US \$ 0,756 milyar.

Untuk mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta menuju kemandirian wilayah Jawa Tengah, sektor perindustrian dan perdagangan masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum banyak bergeser dari permasalahan yang telah berkali-kali diidentifikasi. **Masalah-masalah** tersebut meliputi : (1) Belum optimalnya Industri Dagang Kecil Menengah menggunakan bahan baku berbasis pada potensi unggulan daerah serta masih tingginya ketergantungan sebagian produk pada komponen bahan baku impor. (2) Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam

pengembangan industri. (3) Masih panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi serta akses pasar baik di dalam negeri maupun orientasi ekspor dalam memasuki pasar global. (4) Belum optimalnya kualitas pelayanan kemetrolagian dan pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kebijakan. Kebijakan pengembangan industri dan perdagangan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di arahkan pada : (1) Meningkatkan kandungan bahan-bahan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian. (2) Mengembangkan sumber daya manusia sektor perindustrian dan perdagangan secara intensif melalui transformasi ketrampilan dan teknologi serta menata dan menguatkan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi dalam perdagangan bebas. (3) Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri serta meningkatkan kerjasama dan keterpaduan antar lembaga-lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat. (4) Memanfaatkan dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi persaingan global.

Tujuan. Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan industri dan perdagangan meliputi: (1) Tercukupinya kebutuhan pokok dalam negeri baik untuk dunia usaha maupun masyarakat. (2) Meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perolehan devisa yang optimal, kualitas SDM yang profesional serta terwujudnya kerja sama dan keserasian peran dalam pembangunan antara lembaga – lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat. (3) Meningkatkan pangsa pasar produk industri dan perdagangan luar negeri. (4) Mewujudkan kelembagaan yang efisien, produktif dan profesional.

Strategi. Untuk mencapai tujuan pembangunan industri dan perdagangan tersebut, maka beberapa strategi yang akan ditempuh

adalah : (1) Memantapkan strategi daerah dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing global; (2) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. (3) Menguatkan dan meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga secara efisien, produktif dan profesional. (4) Meningkatkan promosi produk andalan ekspor dan diplomasi perdagangan luar negeri. (5) Mengembangkan jaringan produksi, distribusi dan sistem informasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Program. Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1) Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi.

Program ini untuk : (1) meningkatkan dan mengembangkan IKM; (2) meningkatkan dan memperkuat basis produksi industri, utamanya melalui pengembangan industri – industri pendukung (*supporting industries*); (3) mengembangkan agroindustri skala kecil dan menengah; (4) mengembangkan sistem informasi dan distribusi daerah dalam kesatuan pasar nasional; (5) meningkatkan database statistik industri dan perdagangan.

2) Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung Usaha Kecil dan Menengah

Program ini untuk : (1) mengembangkan kluster IKM yang berbasis potensi sumberdaya unggulan daerah; (2) memperkuat penajaman dan peman-tapan perencanaan program industri dan perdagangan; (3) mengembangkan pola kemitraan industri dan dagang kecil menengah; (4) meningkatkan jasa layanan teknis kepada industri kecil dan menengah (IKM); (5). meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, utamanya melalui promosi dan informasi dan peningkatan nasionalisme dalam pemberdayaan produk dalam negeri; (6) mengembangkan klinik layanan bisnis (HAKI, ISO, pengembangan SDM, pembiayaan, teknologi, promosi dan informasi).

3) Pengembangan Ekspor.

Program ini untuk : (1) meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu industri dan perdagangan berorientasi ekspor; (2) meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar luar negeri; (3) Meningkatkan akses pasar luar negeri melalui pendekatan bilateral, multilateral, regional yang lebih proaktif dan efektif; (4) mengembangkan sistim informasi ekspor dan impor; (5) meningkatkan uji mutu produk orientasi ekspor.

4) Penguatan Institusi Pendukung Pasar.

Program ini untuk (1). meningkatkan operasional kemetrolgian; (2). meningkatkan kesadaran masyarakat industri dan perdagangan untuk melakukan tera ulang; (3) penguatan usaha dan kelembagaan perdagangan; (4) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

3. Perkoperasian, Usaha kecil, Menengah dan Penanaman Modal.

a. Perkoperasian, Usaha Kecil Dan Menengah.

Kondisi saat ini. Selama krisis UKM telah membuktikan kemampuannya mengatasi dampak krisis ekonomi. Perkembangan kinerja UKM di Jawa Tengah menunjukkan kenaikan. Hal ini terlihat pada tahun 2000 jumlah UKM binaan sebanyak 37.316 unit meningkat 9,3 % pada tahun 2001 menjadi sebanyak 40.816, serta pada tahun 2002 meningkat 10.03 % menjadi 41.968. Dari sisi aset juga mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebanyak 2.938 menjadi 2.941 trilyun pada tahun 2002 atau naik sebesar 1.80 %. Dari sisi volume usaha meningkat dari Rp 7,773 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp 7,795 trilyun pada tahun 2002 , atau naik 0,28 %, Penyerapan tenaga kerja pada tahun, 2001 dan 2002 berturut-turut sebesar 190,664 orang menjadi 193.778 orang atau meningkat sebesar 1.63% .

Perkembangan koperasi juga menunjukkan kenaikan. Dari sisi jumlah koperasi, pada tahun 2000 terdapat 12.668 koperasi dan meningkat 4,9% pada tahun 2001 menjadi 13.290 koperasi dan meningkat lagi 7.75 % pada tahun 2002 menjadi 13.650 buah. Jumlah anggota koperasi meningkat sebesar 1,07% pada tahun 2000-2001. Sedangkan jumlah aset koperasi pada tahun 2000 Rp 2,806 trilyun , tahun 2001 menjadi Rp 2,837 trilyun meningkat 1,1%, dan pada tahun 2002 Rp 2.991 Trilyun atau naik 6,59 %. jumlah volume usaha pada tahun 2000 sebesar Rp 4,575 trilyun pada tahun 2001 naik menjadi Rp 4,604 trilyun atau meningkat 0,63%, sedangkan pada tahun 2002 naik menjadi Rp 5.190 Trilyun atau naik 13 %

Selain itu terjadi peningkatan alokasi jumlah pinjaman dari Rp. 1,895 Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp. 1,987 Trilyun pada tahun 2001 sedangkan untuk tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 2,257 Trilyun dengan turn over 2,6 kali . Hal ini disebabkan jumlah peminjam meningkat 0,52 % dari 2.333.789 tahun 2000 menjadi 2.345.872 orang pada tahun 2001 sementara pada tahun 2002 terjadi peningkatan sebesar 2.486.509 orang atau 6.01 % yang diikuti oleh penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.514 orang pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 sebanyak 17.431 orang. Bila diamati lebih lanjut dan dibandingkan dengan industri besar, maka tampak peningkatan UKM dan koperasi lebih baik pada sisi penyerapan tenaga kerja dan jumlah usaha, namun kalah baik dibandingkan industri besar pada aspek peningkatan volume usaha dan aset.

Perekembangan Senkuko (Sentra Kulakan Koperasi) di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2000 sebanyak 45 buah , 2001 sebanyak 49 buah dan 2002 jumlah Senkuko sebanyak 52 buah atau naik 8.8 % pada tahun 2001 dan 15.5 % yang diikuti dengan perkembangan penyebaran outlet pada tahun 2000 sebanyak 3.390 buah,tahun 2001 sebanyak 3.599 buah sedang untuk tahun 2002 menjadi 3.826 buah atau naik 6.16 % pada tahun

2001 dan 12,8 % pada tahun 2002 sementara Volume usaha juga terjadi peningkatan untuk kurun waktu yang sama masing tahun 2000 sebanyak Rp 63 Milyard , Tahun 2001 Rp 67 Milyard dan Tahun 2002 menjadi 68 Milyard

Sementara perkembangan Waserda koperasi juga menunjukkan perbedaan nyata yaitu untuk tahun 2000 sebanyak 1.584 buah Tahun 2001 sebanyak 1.672 buah dan tahun 2002 menjadi 1.685 buah . dengan volume usaha waserda sebanyak Rp 17,8 Milyard tahun 2000, untuk tahun 2001 sebanyak Rp 20,8 Milyard sedangkan untuk tahun 2002 sebanyak Rp 26,5 Milyard.

Permasalahan. Dalam upaya menciptakan kinerja Koperasi dan UKM untuk dapat mampu menjadi lembaga sosial ekonomi yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian Jawa Tengah masih ditemui kendala yang antara lain : (1) Lemahnya daya saing Usaha kecil mikro koperasi dan UKM dalam mengakses pasar baik domestik maupun global dan Belum berkembangnya diversifikasi usaha dan sistim distribusi Koperasi dan UKM, (2) Akses usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah (3)masih lemahnya pemahaman akan idiologi koperasi bagi masyarakat dan aparat pemerintah serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perkoperasian, (4) Kemampuan usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM dalam Penguasaan teknologi dan informasi masih lemah (5) Promosi dan pemasaran usaha kecil mikro , koperasi dan UKM belum optimal serta keterbatasan informasi pasar mengenai produk-produk unggulan daerah (6) Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antar Usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya.

Kebijakan. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain : (1) Mengembangkan Diversifikasi

usaha dan sistem distribusi (2) Meningkatkan revitalisasi kelembagaan Koperasi dan UKM, (3) Memperkuat struktur permodalan (4) Memperkuat usaha inti melalui optimalisasi sumber daya alam dan produk unggulan daerah, (4) Mengembangkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM yang berorientasi IPTEK (5) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui Promosi dan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, dan (6) Mengembangkan Kemitraan Usaha antara lain melalui optimalisasi operasional Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah.

Tujuan. Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan perkoperasian dan UKM meliputi: (1) Berkembangnya Diversifikasi usaha dan sistem distribusi pada Usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM (2) Mengoptimalkan revitalisasi kelembagaan Usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM, (3) Memperkuat struktur permodalan Usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM (4) Mengembangkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM yang berbasis IPTEK, (5) Memperkuat usaha inti Koperasi dan UKM dengan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui Promosi dan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri, serta mengoptimalkan sumber daya alam dan produk unggulan daerah, (6), Mengembangkan kemitraan usaha bagi Usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM

Strategi. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan perkoperasian dan UKM, maka strategi yang ditempuh adalah: (1) Mengembangkan Diversifikasi usaha dan sistem distribusi, (2) Mengembangkan struktur permodalan bagi Koperasi dan UKM (3) Mengembangkan kelembagaan Koperasi dan UKM (4) Mengembangkan Koperasi dan UKM berorientasi IPTEK (5) Mengembangkan Koperasi dan UKM berorientasi Komoditi Unggulan daerah (6) Mengembangkan kemitraan Koperasi dan UKM

Program. Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1) Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi Koperasi dan UKM.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Usaha kecil mikro koperasi dan UKM dalam memenuhi dan memasarkan hasil produksinya.

2) Pengembangan Struktur Permodalan.

Program ini untuk meningkatkan akumulasi modal Usaha kecil mikro, koperasi dan UKM; meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal secara efektif dan efisien serta meningkatkan akses permodalan.

3) Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Usaha Kecil Mikro Koperasi dan UKM.

Program ini untuk menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan selaras dengan lingkungan usaha yang dinamis dan mengglobal.

4) Pengembangan Usaha Kecil Mikro Koperasi dan UKM Berorientasi IPTEK.

Program ini untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme SDM pengelola Koperasi dan UKM, sehingga mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk mengembangkan organisasi manajemen serta usahanya.

5) Pengembangan Usaha Kecil mikro, Koperasi dan UKM Berorientasi Komoditi unggulan daerah

Program ini untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal dan spesifik di daerah, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya.

6) Pengembangan pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha.

Program ini untuk memfasilitasi pengembangan UKM untuk memenuhi tuntutan standarisasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang diakui masyarakat internasional serta mendorong Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah

b. Penanaman Modal

Kondisi saat ini. Besarnya realisasi proyek PMA tercatat nilai investasi sebesar US \$ 73.435.000 meningkat 9,84% dibandingkan realisasi tahun 2001 sebesar US \$ 66.847.000. Sedangkan realisasi investasi PMDN tahun 2002 dengan nilai sebesar Rp. 777,117 milyar, meningkat 2,75% dibandingkan tahun 2001 sebesar Rp. 756,172 milyar.

Permasalahan. Usaha untuk menarik penanaman modal, masih menghadapi permasalahan umum seperti : (1) Iklim investasi yang kurang kondusif; (2) Sarana prasarana penunjang penanaman modal yang kurang memadai; (3) Kurangnya informasi potensi dan peluang penanaman modal yang siap untuk dikembangkan; (4) Masih lemahnya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal; (5) Rendahnya realisasi penanaman modal dan kesadaran investor terhadap industri yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan. Kebijakan di bidang penanaman modal di Jawa Tengah diarahkan pada: (1) Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan infrastruktur yang memadai ; (2) Meningkatkan promosi mengenai potensi dan peluang penanaman modal secara selektif dan terpadu; (3) Melakukan fasilitasi kerja sama

antar Kab/Kota, Propinsi dan lembaga/instansi negara lain; (4) Memfasilitasi penyusunan peraturan di Propinsi maupun Kab/Kota; (5) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi melalui pemantauan dan pelaporan serta peningkatan perusahaan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bidang penanaman modal meliputi : (1) Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, yang diusahakan dengan meningkatnya penanaman modal terutama PMA/PMDN, (2) Tercapainya peningkatan daya serap tenaga kerja dengan meningkatkan penanaman modal non fasilitas; (3) Tercapainya peningkatan ekspor dengan meningkatkan penanaman modal PMA/PMDN dan non fasilitas.

Strategi. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah : (1) Menyusun kebijakan investasi yang strategis yang mengarah pada upaya mendorong peningkatan penanaman modal; (2) Menyusun perencanaan sarana dan prasarana serta fasilitas di bidang Penanaman Modal; (3) Pengembangan promosi potensi dan peluang investasi dilakukan secara selektif dan terpadu; (4) Memfasilitasi penyusunan peraturan perundangan bidang Penanaman Modal; (5) Meningkatkan pemantauan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal.

Program. Strategi tersebut jabarkan ke dalam program-program sebagai berikut :

1) Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal.

Program ini untuk merencanakan dan mengkaji kebutuhan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, baik pada perencanaan kebutuhan/taget penanaman modal pembangunan pemerintah maupun swasta, menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif; menyediakan dan

memberdayakan kawasan industri; menyediakan sarana prasarana pendukung penanaman modal.

2) Promosi Penanaman Modal.

Program ini untuk mempromosikan peluang potensi penanaman modal yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional.

3) Pelayanan Perijinan Penanaman Modal.

Program ini untuk mendorong terlaksananya pelayanan terpadu untuk perijinan pola satu pintu dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat; menyiapkan peraturan-peraturan.

4) Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

Program ini untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah, melalui pemantauan realisasi PMA/PMDN, serta pemantauan dan fasilitasi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal.

4. Pertambangan dan Energi.

a. Pertambangan.

Kondisi saat ini. Dalam bidang pertambangan umum telah dilakukan penataan usaha pertambangan di perbatasan antara Prop. Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY. Penataan wilayah kawasan pertambangan secara regional telah diidentifikasi 11 kawasan wilayah pertambangan yang dapat dikembangkan dengan 10 komoditas bahan galian unggulan. Dari 11 kawasan tersebut baru 2 wilayah yang sedang disusun rencana detailnya. Potensi sumberdaya mineral di Jawa Tengah yang telah teridentifikasi terdiri dari 3 jenis bahan galian strategis (Golongan A), 9 jenis bahan galian vital (Golongan B) dan 29 jenis bahan galian industri (Golongan C). Potensi air bawah tanah yang telah teridentifikasi sebanyak 31 cekungan Air Bawah Tanah (ABT), dimana 6 diantaranya bersifat

lintas propinsi, 19 cekungan bersifat lintas kabupaten/kota dan 6 cekungan ABT berada dalam wilayah kabupaten/kota atau lokal. Potensi air bawah tanah sebesar 12.268.523.000 m³/th, dengan tingkat konsumsi ABT untuk kebutuhan domestik (rumah tangga dan air minum) sebesar 1.714.421.077 m³/th dan industri sebesar 147.112.262 m³/th. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2002 jumlah sumur berijin mencapai 3.931 buah. Pajak Pemakaian bahan galian golongan C dan Air Bawah Tanah Tahun 2001 mencapai 104,35%, dan 100,79%. Pada tahun 2002 telah diturunkan sebanyak 88 Surat Ijin Penambangan Daerah skala menengah dan 876 skala kecil yang tersebar di Jawa Tengah; Jumlah ini meningkat 9,75% dibandingkan tahun 2001. Jumlah perijinan tahun 2001 mencapai 2 Kuasa Pertambangan (KP) untuk emas, 6 Kuasa Pertambangan (KP) untuk pasir besi, 79 Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) propinsi dan 832 SIPD kabupaten/kota. Untuk Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) air bawah tanah (SIP/SIPA) 3.092 buah. Penambangan liar masih sulit diatasi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya aparat. Tahun 2000 tercatat tenaga kerja yang terserap 6.360 orang dengan peningkatan 10% dari tahun 1999. Penggunaan hasil pertambangan 84,6% digunakan sebagai bahan penunjang proses produksi dan 15,4% untuk bahan baku utama. Telah dilakukan percontohan reklamasi bekas tambang rakyat di 21 kabupaten dan kota. Daerah rentan longsor (gerakan tanah) telah dipetakan dalam skala operasional yang meliputi 27 Kabupaten/kota dan teridentifikasi 91 wilayah kecamatan rentan terhadap bencana tanah longsor. Peta Geologi Tata lingkungan juga telah diselesaikan pada sistem pengembangan kota Surakarta. Pengembangan sarana geologi untuk kepariwisataan antara lain dengan membangun sistem pengamatan jarak jauh "*remote video operating system*" (RVOS) dan "*vulcano theatre*" yang dipasang di Bukit Ketep, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang selain itu sedang disiapkan pusat informasi

geologi dan pertambangan di Kota Semarang sebagai pusat media peningkatan SDM dibidang Geologi dan Pertambangan.

Permasalahan. Pembangunan sub sektor pertambangan menghadapi permasalahan, yaitu : 1) Potensi sumberdaya mineral/pertambangan di kawasan pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal; 2) keterbatasan modal dan rendahnya minat investasi bidang pertambangan; 3) Belum optimalnya pelayanan dalam bidang pengelolaan sumberdaya mineral/ pertambangan; 4) belum lengkapnya hasil penelitian / pengembangan geologi; 5) Kurangnya pengetahuan teknis dan manajemen usaha pertambangan; 6) Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha pertambangan

Kebijakan. Kebijakan pembangunan pertambangan diarahkan pada : (1) Menyediakan dan mengembangkan data, sistem informasi, serta promosi investasi pada bidang pertambangan; (2) Mengembangkan sumberdaya manusia pada bidang pertambangan; (3) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sektor pertambangan

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pertambangan meliputi: (1) Menyediakan data kondisi geologi dan potensi pertambangan secara detail dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada masyarakat, promosi kepada calon investor baik domestik maupun asing, dan menetapkan kebijakan pembangunan; (2) Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme pelaku usaha pertambangan rakyat dalam pengelolaan usaha; (3) Mewujudkan dan mengembangkan perencanaan yang terpadu baik antar wilayah maupun antar sektor; (4) Mewujudkan dan mengembangkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan agar senantiasa berwawasan lingkungan;

Strategi. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertambangan, maka strategi yang dilaksanakan meliputi : (1) Memantapkan sinergi keterkaitan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan; (2) Mengintensifkan pengelolaan usaha pertambangan; (3) Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan penyederhanaan perijinan; (4) Mengembangkan sistem informasi bidang pertambangan; (5) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan; (6) Meningkatkan kesadaran hukum dan tertib usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah.

Program, strategi tersebut diuraikan dalam program-program sebagai berikut :

1) Penataan wilayah dan konservasi geologi, pertambangan dan air bawah tanah;

Program ini untuk : (1) penentuan kebijakan lokasi penambangan yang layak untuk diusahakan berdasarkan lingkungan; (2) menjaga daya dukung lingkungan pada daerah tambang; (3) menyediakan data kerusakan lingkungan lahan bekas pertambangan;(4) menjaga kualitas dan kuantitas air bawah tanah;(5) penataan lokasi kegiatan usaha pertambangan.

2) Pengembangan investasi usaha pertambangan;

Program ini untuk : Meningkatkan investasi usaha bidang pertambangan, keanekaragaman produk dan pemanfaatan bahan tambang, informasi pasar dan peluang ekspor.

3) Pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana geologi, pertambangan dan air bawah tanah

Program ini untuk : (1) Meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelayanan masyarakat, dan

(2) Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan air.

4) Penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan dan air bawah tanah;

Program ini bertujuan untuk : (1) menyediakan data potensi pertambangan yang meliputi volume dan kualitas bahan tambang untuk perencanaan pengembangan wilayah, mendorong minat investasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pertambangan; (2) mengantisipasi secara dini daerah rawan bencana gerakan tanah; (3) penataan dan penyusunan program pengembangan kawasan dan sistem pengelolaan di cekungan air bawah tanah.

5) Peningkatan dan pengembangan sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian geologi, pertambangan dan air bawah tanah;

Program ini bertujuan untuk : mengembangkan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang geologi pertambangan dan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan.

6) Sosialisasi dan penyuluhan hukum bidang pertambangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah

b. Energi

Kondisi saat ini. Di Jawa Tengah telah terpasang 39 unit pembangkit tenaga listrik di 17 lokasi dengan total daya 1.694,32 MW sedangkan beban puncak 1.472,5 MW hingga sisa 221,82 MW. Sedangkan tahun 2002 sejumlah 99,76% desa telah dialiri listrik. Tenaga energi alternatif adalah PLT Surya 237 desa di 23 kabupaten, PLT Diesel di 2 kabupaten, Mikro hidro di 19 desa pada 9 kabupaten

dan PLT AnginBayu di 3 desa di Kabupaten Jepara. Panas bumi telah dimanfaatkan sebesar 60 MW di PLTP Dieng Unit I.

Cadangan yang belum dimanfaatkan berupa Panas Bumi 400 MW di Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Gunung Telomoyo, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, dan Gunung Muria. Energi alternatif lain yang masih dikembangkan adalah Mikro hidro, angin biogas dan laut.

Migas yang diproduksi kilang lapangan minyak Cepu sebesar 1.024.554 barel (2001). BBM disuplai oleh 3 kilang melalui 7 depo, 290 SPBU dan 253 agen minyak tanah.

Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor energi adalah : (1) belum seluruh masyarakat perdesaan terjangkau jaringan listrik; (2) belum terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat khususnya pada jenis pelanggan industri dan usaha; (3) belum tertibnya usaha jasa kelistrikan dan jasa penunjang migas; (4) belum optimalnya pemanfaatan energi alternatif; (5) belum optimalnya eksplorasi dan eksploitasi potensi cadangan migas bumi

Kebijakan . Kebijakan pembangunan sub sektor energi diarahkan pada: (1) mengembangkan listrik perdesaan; (2) mengembangkan energi alternatif; (3) merencanakan dan mengendalikan usaha jasa kelistrikan dan jasa penunjang migas; (4) revitalisasi sumur-sumur minyak marjinal.

Tujuan. Tujuan yang diharapkan dari pembangunan sub sektor energi meliputi : (1) memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara tepat mutu dan waktu; (2) mewujudkan usaha jasa kelistrikan yang mampu menghasilkan listrik yang memenuhi standar teknis dan tertib administrasi dan usaha jasa penunjang migas; (3) Mewujudkan pengembangan kelistrikan di daerah yang terpadu ; (4) Mengoptimalkan pendayagunaan sumur-sumur minyak tua/marjinal.

Strategi. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan sub sektor energi adalah (1) menyediakan dan memanfaatkan sumber energi listrik melalui eksplorasi sumberdaya energi baik yang konvensional maupun non konvensional; (2) mengintensifkan dan mengekstensifkan pemanfaatan jaringan listrik yang ada; (3) meningkatkan tertib usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan minyak bumi dan gas bumi; (4) meningkatkan kajian teknis dan ekonomis energi terbarukan; (5) optimalisasi sumur migas tua.

Program. Program pembangunan yang dilaksanakan dalam pembangunan sub sektor energi adalah :

1) Pengembangan sumber tenaga listrik

Program ini untuk : (1) memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diperkirakan akan terus meningkat melalui kegiatan survai dan eksplorasi sumberdaya energi yang konvensional maupun non konvensional dan mendorong usaha kelistrikan swasta .

2) Pengembangan jaringan listrik perdesaan;

Program ini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat perdesaan, yang belum terjangkau oleh distribusi listrik PLN.

3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa ketenagalistrikan dan usaha penunjang migas;

Program ini untuk mendorong peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha jasa kelistrikan di daerah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

4) Pengembangan energi alternatif;

Program ini untuk : meningkatkan upaya pencarian, penemuan dan penganekaragaman serta penghematan sumberdaya energi, meliputi : minyak bumi, gas bumi, panas bumi, batubara, energi baru dan terbarukan.

5) Pendayagunaan sumur migas marjinal/ tua

Program ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumur-sumur minyak marjinal sebagai kegiatan perekonomian daerah

5. Pariwisata.

Kondisi saat ini. Pada tahun 2002 jumlah pengunjung wisatawan nusantara (wisnus) di Jawa Tengah sebesar 14.455.424 orang, mengalami penurunan sebesar 12,27 % dibandingkan tahun 2001 (16.477.530 orang). Sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 0,49 % (288.576 orang) dibanding tahun 2001 sebanyak 287.171 orang. Jumlah pendapatan dari obyek wisata di Jawa Tengah (karcis dan parkir) pada tahun 2002 mengalami peningkatan dari Rp 33.332.816.931,- (th 2001) menjadi Rp. 40.632.794.428,- atau naik sebesar 21,90 %.

Obyek wisata Candi Borobudur tetap menjadi primadona pariwisata di Jawa Tengah. Pada tahun 2002, pendapatan obyek tersebut menempati urutan pertama dan kedua dengan jumlah pendapatan dari Karcis dan Parkir sebesar Rp 18.171.299.600,00 untuk Candi Borobudur dan Rp. 5.295.802.000,00 untuk Candi Prambanan. Pada tahun 2002, obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Candi Borobudur sebanyak 2.106.327 orang dan candi Prambanan 1.128.600 orang.

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai, merupakan aset pariwisata yang besar bagi Jawa Tengah. Pada tahun 2002 Jenis obyek wisata alam, budaya dan buatan yang ada sebanyak 226 buah. Fasilitas akomodasi meliputi jumlah hotel berbintang sebanyak 93 buah dengan jumlah kamar sebanyak 5.415 kamar dan hotel berklasifikasi melati sebanyak 832 hotel dengan jumlah kamar 15.662 unit. Dukungan infrastruktur dan aksesibilitasnya di masing-masing obyek wisata sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan.

Sumbangan bidang pariwisata terhadap PDRB dari 3,66% pada tahun 2000 menjadi 3,84% pada tahun 2001, dan pada tahun 2002 menjadi 3,94%, menurut harga berlaku.

Perkembangan kondisi pariwisata Jawa Tengah tidak terlepas dari kondisi kepariwisataan internasional dan nasional. Kualitas pelayanan jasa dan atraksi wisata yang semakin baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional menyebabkan semakin beratnya kompetisi yang harus dihadapi.

Permasalahan. Permasalahan dalam bidang pariwisata adalah : (1) Belum optimalnya dan terpadunya promosi dan informasi yang dilakukan; (2) Lemahnya basis data akibat sulitnya mendapat data pariwisata untuk analisis, baik lingkup internal maupun eksternal; (3) Belum terbentuknya networking antar produk, antar wilayah dan antar pelaku pariwisata; (4) Lemahnya hubungan kerjasama kelembagaan antar wilayah, pemerintah dan stakeholders kepariwisataan; (5) Kurangnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan yang ada; (6) Masih rendahnya kualitas produk barang dan jasa (obyek, atraksi dan produk pendukung lainnya) menyebabkan rendahnya daya saing produk, yang berorientasi pasar; (7) Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai pada daerah tujuan wisata; (8) Masih terjadinya kesenjangan pertumbuhan regional yang tercermin dari pola kunjungan ke obyek.

Kebijakan. Kebijakan pengembangan di sektor pariwisata diarahkan dengan pendekatan kawasan melalui keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi regional dengan titik berat pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Tujuan. Tujuan pembangunan bidang pariwisata adalah (1) Meningkatkan kunjungan wisata melalui promosi, pengembangan dan pendayagunaan potensi obyek dan daya tarik wisata; (2) Menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan wisata utama tingkat nasional.

Strategi. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata adalah: (1) Meningkatkan citra pariwisata melalui diferensiasi produk, harga dan eksploitasi pasar potensial serta pemeliharaan pasar yang sudah ada; (2) Mengembangkan jaringan keterkaitan regional, antar karakter produk dengan zona-zona tematis yang mengacu pada konsep pengembangan pariwisata tanpa batas; (3) Memperkuat kinerja kerjasama antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat; (4) Memperkuat citra wilayah dengan eksploitasi peluang investasi bidang pariwisata; (5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata berdasar pada kesesuaian komitmen masyarakat setempat; (6) Mengembangkan produk wisata berbasis budaya dan alam sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan.

Program. Program pembangunan bidang pariwisata, yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1) Program Promosi

Program ini untuk : mengembalikan citra positif kepariwisataan Jawa Tengah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui : a). Pemanfaatan media masa dan lembaga/institusi daerah, nasional dan internasional; b). Menyebarluaskan informasi kepariwisataan dengan meningkatkan kegiatan *public relation*. c). Meningkatkan kerjasama penetapan standar harga antar pelaku dan Daerah Tujuan Wisata (DTW) antar daerah, nasional dan internasional ; d). Melakukan penetrasi pasar wisatawan potensial di dalam dan luar negeri dengan menggali tema-tema baru dalam pengembangan pasar dan pemasaran produk e). Melakukan pemantauan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara.

2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Program ini untuk : menyediakan arahan teknis dan strategi bagi penyusunan kebijaksanaan pembangunan pariwisata melalui a).

keterpaduan program pembangunan pariwisata lintas wilayah ; b). menyediakan arahan teknis pengembangan zona-zona wisata tematis terpadu antar wilayah, paket-paket wisata regional, pemasaran produk wisata antar wilayah, jalur & koridor wisata antar wilayah serta mengembangkan kawasan berbasis wisata dengan pendekatan klaster industri ; c). meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dan wilayah, keterlibatan stakeholders sektor terkait dalam perencanaan program & evaluasi serta implementasi kegiatan pembangunan pariwisata ; d). memfasilitasi peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan pariwisata, kerjasama antar wilayah dan pelaku usaha, peningkatan peran asosiasi, organisasi masyarakat ; e). mengembangkan forum bersama pengembangan kepariwisataan Jawa Tengah, manajemen dan system data investasi, system jaringan data investasi pariwisata terpadu lintas propinsi dan pusat, informasi potensi sumber daya pariwisata ; f). penjajagan peluang kerjasama pengembangan pariwisata lintas Kab./Kota, Prop., negara (produk dan pemasaran).

3) Program Pengembangan Produk

Program ini untuk : meningkatkan kualitas produk wisata untuk mendorong tumbuhnya obyek-obyek wisata alternatif melalui : a). meningkatkan kualitas Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kawasan wisata budaya dan alam, sarana dan aksesibilitas wisata, kualitas dan kuantitas pelayanan amenities, kinerja usaha jasa dan sarana wisata serta potensi sumber daya wisata masyarakat lokal ; b). mengoptimalisasi potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai obyek wisata ; c). mengembangkan pendidikan, pedoman teknis untuk pengembangan SDM bidang pariwisata, partisipasi masyarakat, potensi wisatawan, minat wisata wisatawan; e). penataan usaha produktif masyarakat lokal dilingkungan obyek wisata.

B. Kebijakan dan Strategi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mempertimbangkan sensitivitas jender dan pranata sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis dan mandiri dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Strategi yang ditempuh adalah :

1. Memperluas kesempatan bagi masyarakat memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang lebih terjangkau dan meningkatkan kualitas, relevansi pendidikan.
2. Meningkatkan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak pasti.
3. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan pemberantasan KKN dan upaya mewujudkan penegakan hukum.
5. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dengan mendorong partisipasi masyarakat termasuk dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
6. Mendorong kehidupan politik yang dinamis, demokratis dan kondusif.
7. Memantapkan efektivitas penyelenggaraan Pemda dan profesionalisme aparatur.
8. Mengendalikan pertumbuhan dan mobilitas penduduk.
9. Memperkuat hubungan horisontal dan vertikal dengan pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah, pemerintah Propinsi lain dan Pemerintah.
10. Menjalin hubungan kerjasama pemerintahan dengan luar negeri.

11. Mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana.

12. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya.

Kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan melalui sektor-sektor pendukung yang meliputi :

1. Hukum dan HAM, Kamtibmas.

a. Hukum dan H A M

Kondisi saat ini. Upaya-upaya penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) masih terus dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sementara itu penyusunan produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dirasakan masih banyak yang belum sesuai dengan tingkat kebutuhan pembangunan dan belum seluruhnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Permasalahan. Permasalahan utama pembangunan hukum dan HAM, adalah belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum dan HAM secara nyata serta konsisten karena masih adanya permasalahan yang komprehensif, yaitu : (1) Produk hukum yang dimiliki untuk mendukung implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 belum memadai; (2) Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan oleh aparatur dan masyarakat; (3) Masih lemahnya penegakan hukum dan HAM oleh aparatur dan masyarakat; (4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan HAM antara Pusat dengan Daerah; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana hukum termasuk layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

Potensi yang dimiliki untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan HAM, adalah (1) Adanya kultur masyarakat yang agamis dan paternalistik, memudahkan dalam penerimaan perubahan-perubahan peraturan hukum. Oleh karena itu, timbulnya konflik dalam masyarakat relatif kecil; (2) Adanya lembaga / organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (3) Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam penegakan Perda, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejumlah 280 orang; (4) Tersedianya sarana dan prasarana hukum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan. Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan hukum dan HAM adalah: (1) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dan HAM untuk mendukung terwujudnya supremasi hukum; (2) Pengembangan budaya hukum bagi seluruh aparatur dan masyarakat untuk mendukung terciptanya kesadaran serta kepatuhan hukum.

Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan hukum dan HAM, adalah : (1) Menyusun produk-produk hukum daerah yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah; (2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta masyarakat; (3) Meningkatkan penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan; (4) Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan HAM antara Pusat dengan Daerah; (5) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum termasuk layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan hukum dan HAM, adalah : (1) Menyusun dan menyempurnakan produk-produk hukum daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; (2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta masyarakat; (3) Meningkatkan penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan; (4) Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan HAM antara Pusat dengan Daerah; (5) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum dengan mengembangkan media komunikasi serta informasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan hukum dan HAM, adalah :

1) Penyusunan dan Pembaharuan Produk-Produk Hukum di Daerah.

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan dan pembaharuan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

2) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi aparatur pemerintah secara keseluruhan maupun masyarakat dalam rangka menciptakan budaya hukum yang baik diseluruh jajaran aparatur dan lapisan masyarakat.

3) Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM.

Program ini ditujukan pada upaya-upaya peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum secara komprehensif guna menurunkan jumlah pelanggaran hukum oleh aparatur maupun masyarakat, utamanya dalam mendukung penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM.

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum.

Program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya kesadaran hukum diseluruh jajaran aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat melalui pengembangan sarana serta prasarana komunikasi dan informasi sistem jaringan dokumentasi & informasi (JDI) hukum.

b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kondisi saat ini, Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di daerah.

Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini, adalah : (1) Belum optimalnya jaminan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat; (2) Masih dijumpainya gangguan kriminal dan konflik sosial di masyarakat; (3) Adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian masyarakat; (4) Relatif menurunnya pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara.

Potensi yang dimiliki untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah : (1) Terpeliharanya situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) Tersedianya segenap komponen potensi masyarakat yang memiliki kemampuan rakyat terlatih (Ratih) dan perlindungan masyarakat (Linmas).

Kebijakan, Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah : (1) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung terwujudnya iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat; (2) Pelestarian nilai-nilai nasionalisme sebagai pilar pemersatu seluruh masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah : (1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah melalui koordinasi serta pelaksanaan pengamanan secara komprehensif dan pembinaan kamtibmas yang berkelanjutan; (2) Meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat termasuk dalam penanganan bencana di daerah; (3) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mendukung terciptanya iklim kamtibmas yang kondusif, meningkatnya nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan berkembangnya sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat; (4) Meningkatkan wawasan kebangsaan seluruh komponen masyarakat di daerah.

Strategi, Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah : (1) Melakukan koordinasi dan pengamanan secara komprehensif serta pembinaan kamtibmas yang berkelanjutan; (2) Mengoptimalkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat termasuk dalam penanganan bencana di daerah; (3) Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mendukung terciptanya iklim kamtibmas yang kondusif, meningkatkan nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan mengembangkan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen

masyarakat; (4) Meningkatkan pengetahuan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat di daerah.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah :

1) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Program ini untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan kemampuan pengamanan melalui deteksi dini terhadap setiap gejala gangguan dan ancaman kamtibmas yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan di daerah.

2) Peningkatan Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Program ini untuk upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan satuan-satuan rakyat terlatih (Ratih) serta perlindungan masyarakat (Linmas) sebagai inti penanggulangan dini terhadap setiap gangguan / ancaman / bahaya termasuk bencana pada lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan di daerah.

3) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Program ini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh jajaran aparatur serta tingkatan maupun komponen masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.

4) Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Program ini untuk meningkatkan kesadaran bela negara yang tinggi, kemandirian dan daya tangkal yang tangguh bagi setiap

insan masyarakat yang merupakan modal dasar yang kuat dan bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya menjamin kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Politik

Kondisi saat ini, Pelaksanaan pembangunan bidang politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum mantapnya komunikasi interaktif dari segenap komponen masyarakat, pemahaman yang seimbang antara hak serta kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih adanya konflik internal parpol, dan bertambahnya jumlah parpol peserta Pemilu. Kondisi ini makin mendesak untuk memperoleh perhatian, utamanya dalam menghadapi Pemilu serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004.

Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan politik, adalah : (1) Adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat; dan rendahnya keterwakilan politik perempuan; (2) Kurang efektifnya pelaksanaan sistem politik yang demokratis; (3) Dinamika perubahan politik yang dinamis menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif sebagai wahana representasi politik masyarakat; (4) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan secara langsung Presiden serta Wakil Presiden secara lebih demokratis.

Potensi yang dimiliki bidang Politik untuk mewujudkan kehidupan yang makin demokratis, adalah : (1) Terpeliharanya kehidupan politik yang cukup kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) Munculnya partai-partai politik baru sebagai wahana aspirasi dan pendidikan politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (3) Besarnya jumlah calon pemilih dalam

Pemilu 2004 sebanyak 22.318.050 orang dari jumlah penduduk Jateng tahun 2003 (Data BPS, 2003) sebesar 32.114.306 orang.

Kebijakan, Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan kesadaran politik masyarakat dan efektifitas sistem politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis di daerah.

Tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan politik, adalah : (1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya serta keterwakilan politik perempuan; (2) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang demokratis; (3) Meningkatkan efektifitas peran dan fungsi lembaga legislatif sebagai representasi politik masyarakat; (4) Meningkatkan kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 serta persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 secara lebih demokratis.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan politik, adalah : (1) Menumbuhkembangkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan keterwakilan politik perempuan; (2) Mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang demokratis; (3) Mengoptimalkan efektifitas peran dan fungsi lembaga legislatif sebagai representasi politik masyarakat; (4) Memantapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, serta persiapan Pemilu dan Pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 secara lebih demokratis.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan politik, adalah :

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Rakyat.

Program ini untuk mengembangkan kehidupan demokratisasi di daerah kepada seluruh komponen masyarakat yang merupakan bagian paling strategis dalam rangka pendidikan politik rakyat yang partisipatif, santun dan bermartabat.

2) Fasilitasi Penyelenggaraan Komunikasi, Struktur dan Etika Politik.

Program ini untuk mengembangkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang meliputi komunikasi, struktur dan etika politik yang demokratis.

3) Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Interaktif antara Legislatif dengan Masyarakat.

Program ini untuk memfasilitasi kegiatan dialog interaktif antara legislatif dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam kehidupan demokratisasi.

4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Secara Langsung Presiden/Wakil Presiden.

Program ini untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan secara langsung Presiden/Wakil Presiden yang lebih demokratis serta dalam suasana poleksosbud yang kondusif guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Kependudukan

Kondisi saat ini, Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2002 mencapai 31.691.886 jiwa (Susenas 2002), terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.787.143 jiwa (49,81%) dan perempuan sebanyak 15.904.723 jiwa (50,19 %) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,26. Adapun rata-rata kepadatan penduduk sebesar 974 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk selama tiga dekade mengalami penurunan. Pada kurun waktu 1971 – 1980 sebesar 1,65 %, tahun 1980-1990 sebesar 1,18 % dan 1990 - 2000 turun menjadi 0,84 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor alami (*kelahiran dan kematian*) dan faktor sosial yang mendorong migrasi daerah.

Struktur penduduk mengalami perubahan dan mengarah kepada struktur penduduk tua. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 71,54 %, khusus penduduk usia 65 tahun keatas sendiri persentasenya mencapai 6,36 % atau lebih tinggi dari tahun 2001 yang tercatat sebesar 6,32 %. Adapun persentase penduduk di bawah 15 tahun mengalami sedikit penurunan dari 28,83 % menjadi 28,46 %. Dengan kondisi struktur penduduk di atas, maka angka beban tanggungan penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) pada tahun 2002 tercatat sebesar 53,42 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2001 yang tercatat sebesar 54,20.

Tingkat pendidikan penduduk meskipun mengalami kemajuan tetapi kondisinya masih cukup memprihatinkan. Pada tahun 2002, penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 70,35 % atau lebih baik dibanding tahun 2001 yang mencapai 72,56 %. Selanjutnya penduduk yang tamat SLTP sebesar 14,83 %, SMU / SMK 11,52 % dan tamat Akademi / Universitas sebesar 3,30 % atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2001 yang tercatat sebesar 2,75%.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, terlihat bahwa dari jumlah rumah tangga (RT) sebanyak 8.174.843 KK pada tahun 2001, terdapat keluarga Pra Sejahtera sebanyak 3.211.547 jiwa (39,29 %). Persentase jumlah keluarga Pra Sejahtera tertinggi terdapat di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Grobogan (75,88 %), Rembang (63,43 %) dan Blora (63,27 %). Jumlah Keluarga Sejahtera-I (KS-I) sebanyak 1.611.643 KK (19,27 %), sedangkan Keluarga Sejahtera-II (KS-II), KS-

III, dan KS-III Plus berturut-turut tercatat sebanyak 1.666.373 KK (20,38 %), 1.394.119 KK (17,05 %) dan 291.201 KK (3,56 %).

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapatan perkapita, maka Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2002 sebanyak 7.308.300 orang (23,06 %). Adapun Kabupaten/Kota dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Wonosobo (33,75 %), Rembang (33,38 %), Brebes (33,36 %) dan Purbalingga (32,46 %).

Berkaitan dengan KB pada tahun 2002, tercatat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 5.772.970. Dari jumlah total PUS tersebut sebanyak 4.460.782 (77,27 %) merupakan peserta KB Aktif dan selebihnya sebanyak 1.312.188 (22,73 %) adalah PUS bukan peserta KB. Partisipasi masyarakat dalam ber-KB dipengaruhi oleh efektivitas pemakaian alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan waktu yang lama, seperti IUD, MO dan Implant yang biasa disebut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dari jumlah total peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP sebanyak 1.569.253 (35,28 %).

Peserta KB Aktif yang memperoleh pelayanan dengan cara membayar sendiri (*peserta KB Mandiri*) tercatat sebanyak 2.415.260 (54,14 %). Selebihnya dibiayai pemerintah sebanyak 2.045.522 (45,86 %) adalah peserta KB yang dibantu pemerintah atau lembaga lain. Alat kontrasepsi yang paling diminati akseptor adalah suntik, sementara peserta KB Mandiri sebagian besar peserta KB suntik. Alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati peserta KB adalah obat vaginal.

Peserta KB pria relatif rendah dan mengalami penurunan yaitu sebanyak 114.435 atau 2,57 % pada tahun 2001 menjadi 109.357 atau 1,89 % pada tahun 2002.

Selanjutnya berkaitan dengan mobilitas penduduk, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 terdapat migran baik yang berasal dari

Kabupaten / Kota di Jawa Tengah maupun dari propinsi lain yang daerah tujuan utamanya adalah Kota Semarang. Sebagai daerah tujuan kedua untuk migran dari Kabupaten / Kota di Jawa Tengah adalah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan dari propinsi lain adalah Kabupaten Cilacap.

Pada tahun 2002 di Jawa Tengah terdapat eksodan (pengungsi) sebanyak 6.536 KK (25.239 jiwa) yang perlu mendapat perhatian baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemukiman maupun upaya peningkatan kesejahteraannya.

Kondisi lain adalah kemampuan teknis aparat untuk mengelola administrasi kependudukan masih rendah, disamping itu sistem informasi kependudukan dirasakan masih belum mantap, sehingga penyediaan dan informasi data yang akurat belum dapat dilakukan secara optimal.

Permasalahan. Terkait dengan kondisi di atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan adalah : (1) Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan tetapi secara absolut masih cukup besar dan struktur penduduk mengarah kepada penduduk lanjut usia (lansia). (2) Masih banyaknya penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja dan rendahnya pengetahuan remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS. (3) Banyaknya jumlah penduduk miskin (Keluarga Pra KS dan KS-1). (4) Rendahnya kualitas, cakupan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. (5) Belum optimal dan mantapnya pengelolaan administrasi serta sistim informasi kependudukan.

Kebijakan, Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, kebijakan kependudukan diarahkan pada: (1) Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. (2) Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta aksebilitas terhadap pusat konsultasi remaja. (3)

Peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi. (4) Peningkatan kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. (5) Peningkatan kapasitas tenaga program dan institusi masyarakat dalam rangka penguatan jaringan program dan kelembagaan. (6) Penyediaan data dan informasi keluarga yang berbasis data mikro. (7) Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi dan pemantapan sistem administrasi kependudukan.

Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan kependudukan adalah : (1) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. (2) Meningkatkan kualitas penduduk lanjut usia (lansia). (3) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. (4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menurunkan jumlah penduduk miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan KS-1). (5) Meningkatkan cakupan, mutu pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. (6) Meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan. (7) Memantapkan sistem informasi kependudukan.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan kependudukan adalah : (1) Mempertahankan dan meningkatkan kepesertaan KB serta memberdayakan penduduk lanjut usia (lansia). (2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, keluarga dan remaja dalam rangka menurunkan jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja, menurunkan kehamilan pada usia remaja, kehamilan pranikah dan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk *HIV/AIDS*. (3) Memberdayakan keluarga baik di bidang ekonomi maupun ketahanan keluarga dengan meningkatkan kerjasama kemitraan antar sektor baik pemerintah maupun swasta termasuk LSM. (4) Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat dan

mutakhir tentang keluarga sejahtera khususnya yang menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin. (5) Memfasilitasi pelayanan KB, konseling dan rujukan yang seluas-luasnya dan berkualitas sehingga memberikan kepuasan baik bagi penerima pelayanan maupun pemberi pelayanan. (6) Melakukan promosi, konsultasi, informasi dan edukasi terhadap upaya peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta meningkatkan pelayanan dan penanganan masalah kesehatan reproduksi. (7) Memperkuat jaringan dan kapasitas kelembagaan program di berbagai tingkatan. (8) Memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi aparat dan stakeholders lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi dan pengembangan serta penyempurnaan sistem informasi kependudukan.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan kependudukan, adalah :

1) Pemberdayaan Keluarga.

Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

2) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Program ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

3) Keluarga Berencana.

Program ini untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

4) Pelayanan Keluarga Berencana.

Program ini untuk meningkatkan kemandirian, cakupan dan mutu pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan.

Program ini untuk mengembangkan pengkajian, penyediaan data dan informasi kependudukan, peningkatan kemampuan aparat pengelola administrasi kependudukan serta mengembangkan kebijakan dan kajian terhadap pranata hukum yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

b. Ketenagakerjaan.

Kondisi saat ini. Berdasarkan Susenas Tahun 2002, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah tercermin dengan jumlah penduduk usia kerja (*15 tahun ke atas*) sebanyak 22.672.568 orang, terdiri dari angkatan kerja 15.587.458 orang (68,75 %) dan bukan angkatan kerja 7.085.120 orang (31,25 %).

Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 14.751.088 orang. Dari jumlah tersebut terdapat pekerja anak (*usia 10-14 tahun*) sebanyak 118.837 anak. Dilihat dari lapangan pekerjaan, maka sektor pertanian masih cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu tercatat 41,90 %. Kemudian disusul sektor perdagangan (19,35 %), industri pengolahan (17,36 %) dan jasa-jasa (10,66 %). Selebihnya bekerja di sektor konstruksi, listrik, gas dan air, pertambangan dan penggalian, angkutan, komunikasi dan keuangan (10,72 %).

Jumlah penganggur (*pencari kerja*) di Jawa Tengah tercatat sebanyak 984.234 orang dan setengah penganggur berjumlah 5.350.413 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2002 tercatat sebesar 60,60 % atau mengalami penurunan

dibanding tahun 2001 yang tercatat sebesar 61,61 %. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,25 % atau mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun 2001 yang tercatat sebesar 3,70 %.

Dilihat dari jam kerja selama seminggu, terlihat rata-rata jam kerja seminggu adalah 38,62 jam dengan rincian laki-laki 40,54 jam dan perempuan 35,69 jam.

Kualitas tenaga kerja yang diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya persentase tenaga kerja yang telah menamatkan pendidikan tertinggi. Pada tahun 2002 tenaga kerja yang tamat SD ke bawah sebesar 70,35 %, SLTP 14,83 %, SLTA 11,52 % dan Perguruan Tinggi 3,30 %.

Disisi lain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan pekerja menjadi masalah dalam memahami peraturan, hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit dan Tripartit belum berfungsi sesuai dengan harapan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pekerja, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan informasi menyebabkan lemahnya daya saing Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Disamping itu kurangnya pemahaman prosedur pengiriman tenaga kerja, menyebabkan sebagian angkatan kerja cenderung memilih cara ilegal. Kondisi lain adalah informasi pasar kerja yang belum menyebar secara luas menyebabkan banyak angkatan kerja yang belum mengetahui kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada pembangunan ketenagakerjaan antara lain adalah : (1) Banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur. (2) Kesempatan kerja tidak

sebanding dengan penambahan angkatan kerja. (3) Belum mantapnya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan belum optimalnya informasi pasar kerja. (4) Belum optimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. (5) Kurangnya minat bertransmigrasi dan belum optimalnya penanganan Pengungsi (Eksodan). (6) Rendahnya tingkat pendidikan / ketrampilan tenaga kerja dan kegiatan pelatihan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pasar. (7) Kurangnya sumber daya pelatihan pada Balai Latihan Kerja Pemerintah maupun Swasta. (8) Relatif rendahnya kesejahteraan tenaga kerja. (9) Kurangnya perlindungan tenaga kerja. (10) Belum harmonisnya hubungan industrial dan masih banyaknya kasus PHI / PHK. (11) Masih kurangnya peran dan fungsi Lembaga Ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : (1) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif bagi penganggur dan setengah penganggur baik di perkotaan maupun di perdesaan serta pekerja sektor informal. (2) Perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur. (3) Penyempurnaan prosedur pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri serta peningkatan Informasi Pasar Kerja (IPK). (4) Pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun luar negeri. (5) Pemberdayaan, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk didalamnya pekerja anak, penyandang cacat, perempuan dan usia lanjut sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. (6) Pemberdayaan kelembagaan Bipartit dan Tripartit serta peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak untuk mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan Ketenagakerjaan adalah : (1) Mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui peningkatan kualitas, kemandirian dan daya saing. (2) Peningkatan kesempatan kerja di dalam dan luar

negeri serta kesempatan berusaha di sektor informal. (3) Mantapnya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan meningkatnya akses masyarakat untuk memasuki pasar kerja dengan mengembangkan pusat informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Nakertrans. (4) Mengurangi kasus-kasus penempatan TKI. (5) Peningkatan kuantitas dan kualitas program transmigrasi. (6) Peningkatan kualitas, kemandirian dan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja. (7) Peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga pelatihan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja. (8) Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja. (9) Peningkatan perlindungan tenaga kerja. (10) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus PHI / PHK. (11) Peningkatan peran dan fungsi Lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan Ketenagakerjaan adalah : (1) Mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas, kemandirian dan peran serta baik individu, kelompok masyarakat maupun Instansi / Lembaga terkait (lintas sektor). (2) Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antar daerah dan antar negara serta kesempatan berusaha di sektor informal. (3) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengembangkan Pusat Informasi Pasar Kerja dan memantapkan Sistem Informasi Nakertrans. (4) Pelayanan penempatan TKI satu pintu. (5) Menyebarkan informasi potensi lokasi transmigrasi dan memfasilitasi penempatan transmigran melalui kerjasama antar daerah dengan prinsip saling menguntungkan. (6) Meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas pelatihan kerja dan produktivitas kerja, serta pemagangan di dalam dan luar negeri. (7) Mengembangkan Balai Latihan Kerja Pemerintah maupun Swasta yang mandiri dan mampu menghasilkan tenaga kerja

terlatih dan profesional. (8) Menyusun Kebijakan Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja yang memadai serta Regulasi Kesejahteraan Purna Kerja. (9) Regulasi Perlindungan tenaga kerja termasuk di dalamnya Pekerja Anak, Penyandang cacat, Perempuan dan Usia Lanjut. (10) Pembinaan hubungan industrial yang intens dan harmonis antar unsur Tripartit. (11) Pemberdayaan Lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan Ketenagakerjaan, adalah :

1) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Program ini untuk mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang usaha melalui penciptaan tenaga kerja mandiri, peningkatan dan pemberdayaan kewirausahaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri serta pelayanan penyediaan informasi bursa kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran baik di perdesaan maupun perkotaan.

2) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelatihan kerja agar tersedia tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu mengisi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

3) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Program ini untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha melalui pemasyarakatan, fasilitasi dan penciptaan ketenangan dalam bekerja dan berusaha, peningkatan kenyamanan dan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

keluarganya, serta berkembangnya usaha yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

4. Pendidikan, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olahraga.

a. Pendidikan.

Kondisi saat ini, Pada tahun 2002 untuk tingkat SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 107,88 %, Angka Transisi (AT) sebesar 88,01 % dan angka Drop Out (DO) sebesar 0,23 % atau sebanyak 9.488 murid. Sedangkan pada tingkat SLTP/MTs APK sebesar 81,73 % sementara AT sebesar 51,24 % dan DO sebesar 0,82 % atau sebanyak 9.533 murid, Pada tingkat SLTA/MA APK sebesar 41,76 % dan DO sebesar 0,80 % atau sebanyak 5.867 murid. Disamping itu, adanya kecenderungan penerimaan siswa baru dengan biaya yang relatif sangat tinggi tentu saja sangat berpengaruh pada penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang direncanakan pada tahun 2006. Sedangkan lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi relatif rendah, karena berbagai faktor diantaranya beban biaya yang tinggi serta terbatasnya daya tampung Perguruan Tinggi. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan non formal belum dapat secara optimal mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional bagi peserta didik yang dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkaitan dengan input dan output proses pembelajaran, tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, terjadinya perubahan kurikulum secara cepat, terbatasnya penyediaan prasarana/sarana pendidikan, rendahnya mutu, kesejahteraan dan kekurangan tenaga

kependidikan serta terjadinya kekurang relevansian (*missmatch*) antara tamatan pendidikan dengan kualifikasi/ standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha/industri.

Manajemen dan kemandirian sekolah juga masih lemah karena belum optimalnya keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga masih perlu dilaksanakan fasilitasi serta pendampingan secara berkelanjutan dan intensif.

Permasalahan. Dengan demikian, pembangunan bidang pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : (1) Kurangnya pemerataan pendidikan; (2) Kurangnya kualitas pendidikan; (3) Kurangnya relevansi pendidikan; (4) Kurangnya efisiensi dan efektivitas pendidikan; (5) Belum optimalnya manajemen dan kemandirian pendidikan.

Kebijakan, Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, kebijakan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk : (1) Memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu di berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan; (2) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; (3) Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan formal/ non formal; (4) Meningkatkan manajemen pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi perkerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan adalah : (1) Perluasan dan peningkatan akses serta jangkauan layanan memperoleh pendidikan; (2) Peningkatan kualitas

tamatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja/ usaha; (3) Penerapan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; (5) Peningkatan kualitas, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan; (6) Peningkatan jaringan kerjasama dan penguatan kelembagaan pendidikan; serta (7) Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah serta partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan.

Program Program yang digunakan dalam rangka Pembangunan pendidikan adalah :

1) Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.

Program ini untuk : (a) memperluas jangkauan dan daya tampung; (b) memberi kesempatan bagi kelompok kurang beruntung (terpencil, kumuh, miskin, daerah bermasalah, anak jalanan) untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal

2) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Program ini untuk : (a) menyediakan dan merawat prasarana dan sarana pendidikan yang memadai; (b) meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran

3) Peningkatan Kualitas Siswa

Program ini untuk meningkatkan kualitas siswa dan tamantan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya dan relevansi kebutuhan dunia kerja.

4) Peningkatan dan pengembangan kurikulum

Program ini untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja/ industri.

5) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini untuk meningkatkan kualitas, kualifikasi dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat menunjang proses pembelajaran

6) Penataan Sistem dan Kelembagaan Pendidikan

Program ini untuk : (a) meningkatkan kualitas dan terselenggaranya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat; (b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; serta (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

7) Peningkatan Satuan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional

Program ini untuk menyediakan layanan pendidikan bertaraf internasional serta inovasi pendidikan sesuai kebutuhan global.

8) Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Dalam dan Luar Negeri

Program ini untuk terselenggaranya kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan

9) Fasilitasi Pendidikan Tinggi

Program ini untuk membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi

b. Kebudayaan

Kondisi saat ini, : Bangsa Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai bangsa yang memiliki karakteristik budaya

khas “ketimuran” yaitu bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sopan-santun, ramah, berbudi-pekerti halus, serta agamis. Dewasa ini karakter positif khas “ketimuran” ini mengalami ancaman yang sangat berat yaitu dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jatidiri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. Keadaan ini menjadikan kebudayaan (seni-budaya) yang memiliki fungsi utama dan sifatnya kodrati, menempati peran strategis dalam membangun bangsa dan negara yaitu menggarap sisi nilai rohani kemanusiaan.

Permasalahan. Namun, pembangunan bidang kebudayaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : (1) Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan bahasa serta sastra daerah dan Indonesia; (2) Kurangnya pendayagunaan dan pengembangan perpustakaan serta media penyiaran pendidikan dan kebudayaan; (3) Kurang optimalnya apresiasi karya seni budaya daerah; (4) Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah; (5) Rendahnya perhatian terhadap pelestarian budaya spiritual.

Kebijakan, untuk mengatasi permasalahan diatas, pembangunan kebudayaan Jawa Tengah diarahkan pada: (1) Meningkatkan apresiasi pengembangan bahasa dan sastra Daerah/Indonesia; (2) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan media penyiaran pendidikan dan kebudayaan; (3) Mengembangkan apresiasi dan karya seni budaya daerah; (4) Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai aset peninggalan sejarah; (5) Meningkatkan pembinaan organisasi dan penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Tujuan Pembangunan kebudayaan adalah Mengembangkan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya asing untuk disesuaikan dengan kondisi daerah.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kebudayaan tersebut adalah: (1) Fasilitasi apresiasi dan pengembangan bahasa serta sastra Daerah dan Indonesia; (2) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta media penyiaran pendidikan dan kebudayaan; (3) Pengembangan dan apresiasi, pembinaan dan promosi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesenian daerah; (4) Fasilitasi benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah; (5) Pengembangan dan fasilitasi pembinaan organisasi dan penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

Program yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

1) Pengembangan Kebahasaan, Kesusas-teraan dan Kepustakaan

Program ini untuk (a) mendorong pengembangan bahasa serta sastra daerah dan Indonesia; (b) meningkatkan kualitas jangkauan layanan dan pengembangan perpustakaan daerah dan sekolah; (c) meningkatkan minat baca siswa sekolah dan masyarakat; serta (d) meningkatkan kualitas layanan media penyiaran pendidikan dan kebudayaan.

2) Pembinaan Kesenian dan Nilai-nilai Budaya

Program ini untuk mendorong, mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa serta meningkatkan kualitas seni budaya daerah.

3) Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman.

Program ini untuk menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya bangsa

4) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Program ini untuk meningkatkan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya spiritual dan tidak mengarah pada pembentukan agama baru.

c. Kepemudaan.

Kondisi saat ini, Keberadaan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis, hal ini tidak lepas dari peran generasi muda sebagai kader penerus perjuangan para pemimpin bangsa di dalam membangun dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini generasi muda Indonesia telah menunjukkan berbagai prestasi yang cukup membanggakan dan mengharumkan negara, antara lain melalui prestasi di bidang keolahragaan, seni-budaya, serta karya ilmiah baik di tingkat regional, nasional dan bahkan internasional. Namun kondisi positif ini dirasakan menjadi sedikit tercoreng oleh perilaku sebagian masyarakat antara lain masih banyak dijumpai berbagai kasus kenakalan pemuda-pelajar seperti tawuran antar pelajar, keterlibatan dalam tindak kriminal dan pemakaian obat-obat terlarang. Disamping itu, sebagai upaya mengantisipasi era globalisasi

perlu ditanamkan jiwa kewirausahaan serta kepoloporan, kepemimpinan dan kebangsaan di kalangan generasi muda.

Permasalahan. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : (1) Kenakalan dan perilaku kriminal dikalangan pemuda; (2) Belum berkembangnya kegiatan sosial ekonomi produktif dikalangan pemuda; (3) Belum optimalnya peran serta lembaga/organisasi kepemudaan dalam penanganan permasalahan generasi muda.

Kebijakan. Kebijakan pembangunan generasi muda diarahkan pada : (1) Membina dan mengembangkan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan; (2) Menumbuhkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan yang mandiri serta profesional; (3) Meningkatkan peran serta pemuda dan lembaga/organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Tujuan pembangunan generasi muda adalah : Terwujudnya generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan pembangunan.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: (1) Pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja dan kriminalitas serta penanaman nilai – nilai penghormatan terhadap supremasi hukum dan HAM; (2) Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda dan kelompok usaha produktif; (3) Pembinaan kepemimpinan siswa dan organisasi kepemudaan; (4) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan kepramukaan; (5) Pengembangan pemuda terdidik pedesaan; (6) Pengembangan jaringan kerjasama kepemudaan antar daerah/ wilayah/ negara.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan generasi muda, adalah :

1) Peningkatan Pembinaan Pemuda

Program ini untuk melindungi segenap generasi muda dari penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan miras dan NAPZA serta penyakit sosial masyarakat lainnya.

2) Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Produktif Pemuda

Program ini untuk mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.

3) Pembinaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan.

Program ini untuk mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya.

d. Keolahragaan.

Kondisi Saat ini Perkembangan keolahragaan saat ini dipandang cukup menggembirakan, hal ini dapat di lihat dari pencapaian prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kondisi tersebut perlu ditunjang dengan pola pembinaan, pembibitan dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesimbangan sehingga pencapaian prestasi dapat lebih ditingkatkan.

Kapasitas di bidang kelembagaan/organisasi keolahragaan belum menunjukkan kompetensi dan kemampuan yang memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya profesionalisme di dalam pengelolaan olahraga serta masih tingginya tingkat ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Sedangkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga dirasakan relatif belum memadai.

Upaya pemasyarakatan olahraga juga sudah menunjukkan kemajuan yang relatif menggembirakan, hal ini terlihat dari tumbuhnya

perkumpulan/kelompok olahraga masyarakat di berbagai tempat seperti fitness, olahraga pernapasan, perkumpulan bersepeda dan sebagainya. Namun kondisi yang relatif positif ini pada umumnya masih bersifat *entertainment* atau *hobby* dan tidak disertai kesadaran pola hidup sehat melalui olahraga, sehingga keberadaannya pun sifatnya sangat *temporer* atau musiman.

Permasalahan. Pembangunan bidang olahraga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : (1) Kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga; (2) Lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah; (3) Sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai; (4) Belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Kebijakan. Kebijakan pembangunan olahraga diarahkan pada : (1) Mengembangkan pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga secara terpadu; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah; (3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga; (4) Pemassalan olahraga masyarakat.

Tujuan pembangunan olahraga adalah Meningkatnya prestasi olahraga baik di forum Nasional maupun internasional serta tumbuhnya kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan melalui olahraga.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: (1) Pembinaan, pemanduan dan pembibitan olahraga secara intensif, dan berkelanjutan; (2) Peningkatan kualitas SDM / tenaga pengelola olahraga; (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga; (4) Penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi serta konseling tentang pendidikan jasmani dan olahraga; (5) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga; (6) Penghargaan bagi atlet, pelatih dan

pengurus olahraga berprestasi; (7) Pembinaan dan pengembangan minat olahraga masyarakat.

Program. Program pembangunan olahraga adalah:

1) Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Atlet Olahraga

Program ini untuk meningkatkan pencapaian dan kesinambungan prestasi olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga

Program ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi olahraga di daerah.

3) Pemasyarakatan Olahraga dan Kesegaran Jasmani

Program ini untuk mendorong tumbuhnya pola hidup sehat dalam masyarakat melalui olahraga.

5. Kesehatan.

Kondisi saat ini. Pembangunan kesehatan di Jawa Tengah ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Perkembangan kesehatan diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan, serta peningkatan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menunjukkan adanya perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup waktu lahir dari 67,97 tahun pada tahun 1999 menjadi 68,20 tahun pada tahun 2000, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 36,67 pada tahun 1999 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2000, menurunnya Angka kematian Balita dari 44,93 pada tahun 1999 menjadi 41,13 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2000 serta menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 1997 dari 343 per

100.000 kelahiran hidup pada tahun 1999 menjadi 152 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000.

Lebih lanjut mengenai gambaran kondisi kesehatan di Jawa Tengah yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat tercatat bahwa 8,7 % dari jumlah KK sebesar 7.876.988 KK merupakan tatanan rumah tangga dalam kategori sehat utama dan sehat paripurna; Kelompok Kesehatan Kerja pada institusi mencapai 30 % dan sektor informal mencapai 70% dari jumlah kabupaten/kota; Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang masuk kategori mandiri dan paripurna sebesar 15%.

Kondisi kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan sehat tercermin yaitu dari jumlah seluruh rumah tangga yang memanfaatkan air bersih mencapai 74%, yang menggunakan jamban 58,58% serta rumah tangga dengan kriteria sehat 68 %. Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 65%, Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 68% sedangkan limbah rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 35%. Sekolah yang memenuhi syarat UKS 50 %, kelompok masyarakat pekerja dan institusi yang sudah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 15 %.

Kondisi yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan tercatat angka kesakitan penyakit menular untuk DBD 1,9/10.000 penduduk, malaria 1,44/1.000 penduduk, HIV/AIDS 143 kasus, pneumonia 16,6% dari total penduduk, kusta 0,57/10.000 penduduk dan angka kesembuhan penderita TBC Paru masih sekitar 80 %; Angka kesakitan penyakit tidak menular tercatat untuk penyakit jantung koroner 5,3/1000, penyakit kencing manis (diabetes) 1,6/1000 dan neoplasma 0,5/1000 penduduk. Selain itu Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata RSUD Pemerintah mencapai 59%, Length of Stay (LOS) 4 hari, rata-rata Gross Death Rate (GDR) 0,025% dan Net Death Rate sebesar 0,05%. Kondisi lainnya adalah cakupan pelaporan Rumah Sakit Swasta kurang dari 25% dengan

ketepatan dan kelengkapan yang rendah. Rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang sudah terakreditasi dengan 5 standard sebanyak 79 Rumah Sakit (60%) dan 12 standard sebanyak 34 Rumah Sakit (44%). Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana alam dirasakan belum optimal, salah satunya disebabkan karena masih rendahnya komitmen berbagai pihak dalam upaya penanggulangan KLB/Bencana alam tersebut.

Rumah Sakit di Jawa Tengah belum memiliki fasilitas untuk menangani penduduk usia lanjut dan penderita penyakit jantung yang kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Berkenaan dengan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya, saat ini persentase ketersediaan obat esensial belum optimal yaitu 91,16 %. Persentase tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100 %. Kondisi lain yang dijumpai adalah penerapan konsep penggunaan obat rasional belum optimal, persentase pasien yang menerima obat antibiotik di Puskesmas sebanyak 51%, Rumah Sakit Pemerintah 49%. Persentase tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%. Perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dirasakan belum optimal. Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mencapai 2,43% dari total sampel yang dipantau, kosmetik dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebesar 9,5% dan label 24,4%, untuk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebesar 41,84% dan label 7,77%, sedangkan untuk makanan minuman yang tidak memenuhi syarat 53,48% dan label 13,28% dari total sampel yang diperiksa. Khusus berkaitan dengan penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan Narkoba, pada tahun 2002 telah dilakukan test urine kepada para siswa SMU sebanyak 2100 siswa, yang positif tercatat 53 siswa. Adapun jumlah korban penyalahgunaan narkoba pada tahun 2002 relatif banyak yaitu sebanyak 9.889 orang. Kemudian dalam rangka penegakan peraturan

Perundang-Undangan di bidang Farmasi juga dirasakan belum optimal, termasuk belum dikembangkan Obat Asli Indonesia (OAI).

Berkenaan dengan sumber daya kesehatan, persentase lembaga pendidikan dan latihan kesehatan yang telah terakreditasi sebesar 20% dari jumlah institusi sebanyak 104 institusi, adapun targetnya adalah 40%. Hingga saat ini tenaga kesehatan profesional belum pernah diuji untuk mendapatkan lisensi sebagai persyaratan melakukan tugas pelayanan kesehatan. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi untuk Rumah Sakit Pemerintah sebesar 23 % dari 47 RS Pemerintah, sedangkan targetnya adalah 30% sedangkan untuk Puskesmas masih 0 % dari target 5%.

Apabila dilihat dari kondisi status gizi di Jawa Tengah maka berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2002, Balita dengan gizi buruk tercatat sebesar 1,51% berarti mengalami penurunan dibanding tahun 2001 yang tercatat sebesar 1,61%. Sedangkan untuk gizi kurang sebesar 13,88% dan gizi lebih 2,56%. Khusus mengenai angka prevalensi Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS) mencapai 27,99%.

Sementara itu berdasarkan hasil pemantauan Balai Besar POM Semarang pada tahun 2002, garam konsumsi yang memenuhi syarat kadar yodat masih rendah yaitu dibawah 30 %. Sedangkan menurut perhitungan BPS Jawa Tengah pada tahun 2001, persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang mengkonsumsi garam yodium dengan kadar cukup baru mencapai 55,65 %. Namun berdasarkan hasil pemantauan garam melalui anak SD tahun 2002 persentase garam beryodium dengan kadar cukup adalah 66,3 %.

Berkaitan dengan kebijakan dan manajemen bidang kesehatan saat ini telah tersusun rancangan komponen sistem kesehatan wilayah namun demikian rancangan tersebut masih perlu penyempurnaan. Disamping itu proses perencanaan bidang kesehatan dirasakan masih belum optimal

dikarenakan kurangnya tenaga dan ketrampilan petugas perencana bidang kesehatan. Demikian halnya mengenai pemanfaatan data dan informasi yang tersedia juga belum optimal, di sisi lain data/ informasi mengenai derajat kesehatan yang tersedia dirasakan masih kurang valid.

Permasalahan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah : (1) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan masih rendahnya kualitas lingkungan dan permukiman; (2) Kecenderungan meningkatnya beberapa penyakit menular dan tidak menular di beberapa daerah; (3) Belum optimalnya komitmen Kab./Kota, Lembaga Masyarakat dalam pemberantasan penyakit dan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana Alam; (4) Masih rendahnya ketrampilan petugas dalam rangka kewaspadaan, penanggulangan penyakit dan bencana alam; (5) Belum terpenuhinya standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSUD Pemerintah dan Swasta yang ditetapkan; (6) Belum optimalnya rujukan dan cakupan pelaporan di RS Swasta; (7) Masih rendah cakupan pembinaan mutu rumah sakit dalam mencapai akreditasi RS; (8) Belum optimalnya pengelolaan penyediaan obat di Kabupaten/Kota; (9) Masih rendahnya pengetahuan petugas dalam penggunaan obat nasional; (10) Masih kurangnya obat tradisional yang memenuhi standart sehingga belum dapat diterima pada pelayanan kesehatan formal; (11) masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba; (12) masih ditemukannya pelayanan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; (13) Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; (14) Belum memadainya manajemen pelayanan kesehatan dan laboratorium kesehatan, makanan/minuman; (15) Masih adanya penduduk penyandang masalah gizi; (16) Masih rendahnya mutu garam konsumsi dan cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang memenuhi syarat; (17) Belum mantapnya kebijakan dan manajemen bidang kesehatan.

Potensi yang tersedia untuk mendukung pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya jumlah sarana kesehatan masyarakat, yaitu seperti : Posyandu tercatat sebanyak 46.388 unit, Polindes sebanyak 4.424 unit, Puskesmas sebanyak 858 unit, Rumah Sakit Umum Pemerintah sebanyak 49 unit, Rumah Sakit Umum Swasta sebanyak 73 unit. Di bidang sarana industri kesehatan juga diharapkan dapat mendukung dalam pelayanan kesehatan, yaitu dengan tersedianya Apotik sebanyak 900 unit, Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebanyak 200 unit dan Gudang Farmasi sebanyak 35 unit.

Tenaga kesehatan yang tersedia, yaitu untuk tenaga Dokter Umum tercatat sebanyak 2.315 orang, Dokter Spesialis sebanyak 1.532 orang, Dokter Gigi sebanyak 697 orang, Apoteker sebanyak 635 orang, Bidan Desa 3.388 orang, Ahli Gizi sebanyak 451 orang, Analisa Laboratorium sebanyak 60 orang. Diharapkan potensi-potensi yang tersedia tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata demi mendukung Jawa Tengah Sehat 2010.

Kebijakan. Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan kesehatan di arahkan pada: (1) Peningkatan lingkungan sehat, perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan kesehatan; (2) Peningkatan upaya kesehatan; (3) Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat; (4) Peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan; (5) Peningkatan gizi masyarakat secara komprehensif; (6) Pemantapan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah : (1) Mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat dan mampu berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatannya; (2) Memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang berkualitas secara merata; (3) Menerapkan kebijakan dan manajemen pemberdayaan kesehatan.

Strategi. yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah : (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat; serta peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta; (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan, dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; (3) Peningkatan penanganan penyakit menular berbasis keluarga; (4) Peningkatan peran puskesmas sebagai tujuan awal pengobatan masyarakat; (5) Memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang tidak absah; (6) Pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) yang berkualitas; (7) Pengembangan tenaga kesehatan yang berpegang pada pengabdian dan etika profesi; (8) Penangan gizi masyarakat secara komprehensif; (9) Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, ikatan profesi, swasta dan lembaga donor dalam rangka perbaikan gizi masyarakat; (10) Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang sinergis dengan kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait dengan berbagai program.

Program yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah :

1) Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini untuk mewujudkan lingkungan hidup yang kondusif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat selain itu program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.

2) Upaya Pelayanan Kesehatan.

Program ini untuk meningkatkan pemerataan dan mutu upaya pelayanan kesehatan, termasuk laboratorium kesehatan, makanan/minuman yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh masyarakat, termasuk penduduk usia lanjut dan penderita penyakit tidak menular (jantung, diabetes mellitus, dll).

3) Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

Program ini untuk mengupayakan tersedianya pelayanan kefarmasian yang terjangkau, rasional dan berkesinambungan serta terlindunginya masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya. Program pengawasan obat juga mengupayakan pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) yang berkualitas.

4) Sumber Daya Kesehatan.

Program ini untuk mengupayakan tersedianya tenaga, termasuk tenaga kerja luar negeri, pembiayaan dan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, berkesinambungan, terjangkau dan tepat waktu.

5) Perbaikan Gizi Masyarakat.

Program ini untuk meningkatkan status gizi masyarakat dalam rangka mendukung intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

6) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Program ini untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Jawa Tengah Sehat 2010, sesuai dengan Misi pembangunan Jawa Tengah sebagai bagian komplementer dari upaya bersama segenap komponen bangsa dalam mendukung pembangunan kesehatan Nasional.

6. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.

a. Kesejahteraan Sosial.

Kondisi, Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai salah satu aspek strategis pembangunan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disamping itu juga dalam rangka mencegah timbulnya dampak sosial negatif, seperti : lemahnya ketahanan sosial, terjadinya disintegrasi sosial, melemahnya potensi sosial budaya dan identitas diri.

Pesatnya pembangunan secara tidak langsung juga berdampak terhadap cepat berkembang dan berubahnya tuntutan kebutuhan masyarakat. Dinamika yang demikian menjadikan fenomena sosial semakin kompleks, sehingga jumlah PMKS cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak hanya diasumsikan sebagai akibat kemiskinan maupun krisis multidimensi yang berkepanjangan, namun juga dimungkinkan karena faktor patologis dan non patologis.

Selanjutnya gambaran mengenai kondisi PMKS di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2002 tercatat anak balita terlantar 38.286 balita, anak terlantar 236.204 anak, anak yang menjadi korban kekerasan 3.297 anak, anak nakal 21.344 anak, anak jalanan 8.521 anak, wanita rawan sosial ekonomi 195.801 orang, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan 1.834 orang, lanjut usia terlantar 208.221 orang, lanjut usia korban kekerasan 354 orang, penyandang cacat bekas penyandang penyakit kronis 18.533 orang, tuna susila 8.728 orang, gelandangan 4.840 orang, bekas narapidana 16.641 orang, korban penyalahgunaan narkoba 9.889 orang, keluarga fakir miskin 1.829.089 KK, keluarga berumah tak layak huni 308.302 KK, keluarga yang bermasalah sosial psikologis 26.301 KK masyarakat terasing 3.682 orang, masyarakat yang tinggal di daerah rawan

bencana 158.973 orang dan korban bencana serta musibah lainnya sebanyak 75.391 orang.

Kondisi geografis Jawa Tengah yang terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan memiliki iklim tropis basah, seringkali menimbulkan kejadian bencana/bencana alam di berbagai daerah. Pada tahun 2002 telah terjadi bencana/bencana alam berupa banjir (107 kali), tanah longsor (71 kali), tanah ambles (4 kali), angin topan (104 kali), kebakaran (94 kali), gas beracun (1 kali). Kejadian bencana tersebut telah menimbulkan kerugian berupa korban manusia yaitu meninggal 38 orang, luka berat 13 orang dan luka ringan 31 orang. Adapun kerugian bangunan/rumah meliputi rumah roboh 854, rusak berat 1.056 dan rusak ringan 1.663. Jumlah taksiran kerugian total sebesar Rp. 209.7 milyar.

Permasalahan. Permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang masih dihadapi saat ini adalah : (1) Makin meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain kemiskinan, kecacatan, ketuna sosialan, keterlantaran dan korban bencana/bencana alam dan masih rendahnya pelayanan kesejahteraan bagi PMKS; (2) Belum memadainya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta; (3) Belum optimalnya manajemen penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (4) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta dunia usaha dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (5) Belum efektifnya penanganan bencana/bencana alam baik yang bersifat preventif, represif/tanggap darurat maupun rehabilitatif;

Potensi yang tersedia dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial adalah dengan terpenuhinya kualitas aparatur pemerintah termasuk pengelola panti sosial yang cukup baik dan

tersedianya jumlah panti sosial di Jawa Tengah saat ini yang terdiri dari panti sosial pemerintah tercatat sebanyak 52 panti (panti asuhan, panti karya/persinggahan, panti wredha, panti tuna laras, panti tuna netra dan rungu wicara, panti tuna grahita, panti karya wanita, panti pamardi putra/eks narkoba), panti sosial UPT Departemen Sosial sebanyak 5 panti (Purwokerto, Pati, Magelang, Surakarta dan Temanggung) dan panti sosial swasta sebanyak 319 panti. Meskipun jumlah panti sosial relatif cukup banyak tetapi jumlah panti yang ada belum mampu menangani populasi PMKS yang sangat besar.

Selain itu organisasi-organisasi sosial dan pekerja juga berperan penting dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu : Pekerja Sosial Masyarakat berjumlah 52.299, Karang Taruna 8.437, Organisasi Sosial 5.482, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 30.605 orang.

Keberadaan lembaga/organisasi sosial perlu ditumbuh kembangkan dan didayagunakan secara optimal sebagai mitra dalam upaya penanganan PMKS. Disamping itu keberadaan panti-panti sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat perlu didorong dan diupayakan mampu memberikan pelayanan secara profesional. Untuk dapat terciptanya panti sosial percontohan harus didorong dengan kriteria/standarisasi.

Untuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana/bencana alam yang dimiliki saat ini meliputi perahu jukung (1 unit), perahu karet (19 unit), mesin tempel (19 unit), pelampung/rompi (70 buah), tali luncur (dadung), dayung (21 buah), tenda (4 buah), mobil truk (5 unit). Disamping itu juga telah dibentuk Tim Perahu Karet dengan personil 30 orang.

Kebijakan, Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang ditempuh adalah : (1) Mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM dalam

rangka percepatan pelayanan sosial yang lebih adil dan merata, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; (2) Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial yang memadai; (3) Optimalisasi penanganan PMKS dengan mengedepankan potensi dan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan partisipasi masyarakat setempat; (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS (Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS (5) Mempercepat upaya penanggulangan akibat bencana/bencana alam;

Tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah : (1) Menyediakan pelayanan yang profesional terhadap PMKS; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial; (3) Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat mendorong PSKS dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat; (5) Menangani keadaan darurat kesejahteraan sosial akibat bencana/bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadinya bencana;

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah : (1) Meningkatkan kualitas SDM panti sehingga mampu membangun ketahanan sosial yang dapat memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap PMKS; (2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan; (3) Meningkatkan kemitraan dan jaringan kerja untuk menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pemerintah dan infrastruktur masyarakat dan dunia usaha; (4) Memberikan kesempatan dan menumbuh kembangkan peran masyarakat dan memfasilitasi PSKS

serta dunia usaha untuk turut serta dalam menangani PMKS. (5) meningkatkan kemandirian dalam mempercepat upaya pelayanan sosial dan optimalisasi penanganan korban bencana/bencana alam;

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah :

1) Pengembangan Kesejahteraan Sosial,

program ini untuk : (1) menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dunia usaha dan keikutsertaannya dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial; (2) meningkatkan kesejahteraan sosial para PMKS untuk hidup layak dan bermartabat.

2) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

program ini untuk : mengembalikan dan melindungi fungsi sosial bagi warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat.

3) Peningkatan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan,

program ini untuk : meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Sosial pemberdayaan organisasi sosial, PSKS, dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan fungsi dan perannya selaku mitra pemerintah, dalam berperanserta menangani PMKS.

4) Penanggulangan Bencana/Bencana Alam,

Program ini untuk : mewujudkan dan memulihkan kembali fungsi sosial bagi para korban bencana/bencana alam melalui berbagai bantuan dan penanganan/ penanggulangan.

b. Pemberdayaan Perempuan

Kondisi saat ini, Berdasarkan Susenas Tahun 2002, angka sementara jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 31.691.866 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.787.143 jiwa (49,81%)

dan perempuan sebanyak 15.904.723 jiwa (50,19%). Pada kenyataannya perempuan belum menerima manfaat pembangunan secara proporsional, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua indikator dalam *Human Development Index* (HDI), yaitu *Gender Related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Indeks Pembangunan Gender/Gender Related Development Index (GDI) Jawa Tengah pada tahun 1999 sebesar 57,4 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1996 yaitu sebesar 59,2. Secara nasional, GDI Jawa Tengah menempati ranking ke-10 pada tahun 1999, sedikit meningkat dibandingkan tahun 1996 yang menempati ranking 13 nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender/*Gender Empowering Measure* (GEM) menunjukkan peran serta aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. GEM menitik beratkan pada partisipasi perempuan dengan cara mengukur ketimpangan jender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indeks ini mengukur persentase wanita di parlemen, prosentase wanita di antara tenaga profesional, teknisi, pegawai dan manajer serta prosentase penghasilan wanita dibandingkan penghasilan laki-laki.

GEM Propinsi Jawa Tengah menduduki posisi yang tidak jauh berbeda dengan GDI. GEM Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1996 sebesar 60,5 dan pada tahun 1999 turun menjadi 51,2. Walaupun terjadi penurunan GEM namun ranking Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 1996 ranking GEM Jawa Tengah berada pada urutan keduabelas dari seluruh propinsi di Indonesia, sedangkan pada tahun 1999 menduduki urutan kesembilan.

Selain itu program pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun semakin banyak menjadi perhatian. Hal ini seiring dengan kondusifnya iklim yang mendukung perwujudan keadilan dan kesetaraan gender. Keadaan ini terlihat dengan semakin banyaknya

perempuan yang dapat menduduki posisi penting dalam proses pengambilan keputusan, namun demikian secara umum kondisi obyektif kualitas perempuan di Jawa Tengah saat ini masih cukup memprihatinkan. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari perbedaan angka buta huruf antara laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas, untuk laki-laki pada tahun 2000 sebesar 7,58 %, sedangkan buta huruf perempuan sebesar 17,51. Perbedaan cukup besar terjadi pada “rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan”, yaitu untuk laki-laki rata-rata lama sekolah 6,7 tahun, sedangkan perempuan 6,5 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan di bawah lima tahun masih banyak terjadi terutama di 12 kabupaten di Jawa Tengah. Angka *drop out* (DO) di Jawa Tengah pada tingkat SD untuk laki-laki 0,06% dan perempuan 4,04%, DO pada tingkat SMP tahun yang sama, untuk laki-laki sebesar 0,04% dan perempuan 2,46%, sedangkan DO di tingkat SMA laki-laki sebesar 0,02% dan perempuan 3,4%. Selain itu, ketidakadilan gender tidak lepas dari adanya teks-teks agama yang ditafsirkan berbias gender.

Kondisi kesehatan perempuan dapat dilihat dari tingkat kematian ibu hamil dan bersalin cukup tinggi. Pada Tahun 2001, kasus kematian ibu sebesar 665 kasus dengan kasus terbesar meninggal pada saat persalinan, yaitu 48,97 %. Kematian ibu pada saat persalinan dengan pertolongan non tenaga kesehatan juga masih cukup besar, yaitu 37,59 %. Data pada tahun 2002 menunjukkan bahwa angka kelahiran pertama yang ditolong tenaga medis cukup menggembirakan, yaitu ditolong oleh dokter sebesar 7,86 %, dan bidan 51 %, namun demikian pertolongan oleh tenaga non medis (dukun) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 40.01%.

Ketimpangan gender terjadi pula di sektor ketenagakerjaan dan ekonomi yang dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Tahun 2001, TPAK perempuan sebesar 56,37 %, sedangkan laki-laki 87,68 %. Selain itu, perempuan yang bekerja

belum dapat menjamin kesejahteraannya karena kenyataannya jumlah perempuan bekerja yang tidak dibayar cukup besar, yaitu 32,58 %, sedangkan laki-laki 10,75 %. Jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 12,72 % dari total rumah tangga di Jawa Tengah dan 37,80 % nya tidak pernah sekolah. Di sektor formal, menunjukkan semakin meningkatnya kecenderungan perlakuan ketidakadilan yang diterima pekerja dan masih lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja. Selain itu saat ini semakin banyak pengalihan proses produksi dari pabrik ke industri rumah tangga atau yang dikenal dengan *Putting Out System* (POS), artinya semua proses produksi dilakukan keluarga pekerja dan dikerjakan di rumah mereka. Sistem ini sangat merugikan pekerja karena mereka memberikan subsidi kepada pengusaha berupa tempat, transpot, listrik, air dan alat produksi, serta rendahnya upah yang diterima oleh pekerja.

Permasalahan. Permasalahan ketimpangan gender lain yang memprihatinkan adalah tindak kekerasan berbasis gender yang dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya dan korban terbesar adalah perempuan. Disisi lain sistem perlindungan bagi korban kekerasan belum efektif. Sampai pertengahan Tahun 2002 terjadi 60 kasus kekerasan dalam rumah tangga (*KDRT*) dan 78 kasus perkosaan yang tersebar di 23 Kabupaten / Kota. Bahkan pada tahun 2002 banyak terjadi kasus perkosaan beramai-ramai (*satu perempuan diperkosa dua hingga enam laki-laki*). Dari kasus perkosaan tersebut, lebih dari 60 % korban perkosaan adalah anak (*usia di bawah 18 tahun*). Permasalahan lain yang banyak ditemui adalah kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perkosaan menunjukkan belum optimalnya upaya hukum dan upaya lain untuk memperkecil atau memberantas kejahatan perkosaan.

Kondisi lain terkait keberadaan perempuan yang perlu dicermati adalah masih rendahnya kemampuan perempuan dalam pengambilan

keputusan strategis. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kuota minimum 30 % yang kemungkinannya terasa sulit untuk diwujudkan tidak saja dalam jajaran legislatif juga eksekutif dan yudikatif. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi karena rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUJ) oleh semua pihak, masih kurangnya dukungan data pilah gender dan kurangnya peraturan-peraturan daerah yang sensitif gender.

Melihat kondisi perempuan tersebut, maka beberapa permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam upaya pemberdayaan perempuan saat ini adalah : (1) **Lingkup Pendidikan**, meliputi : (a) kesenjangan terhadap akses pendidikan; (b) Belum tersedianya sistem pendidikan yang peka gender; (c) Masih biasanya pemahaman gender dalam pemahaman agama; (2) **Lingkup Kesehatan**, meliputi : (a) Kurangnya akses perempuan terhadap sarana dan prasarana kesehatan reproduksi yang memadai; (b) Rendahnya pemahaman terhadap Hak-hak dan kesehatan Reproduksi; (3) **Lingkup Ketenagakerjaan dan ekonomi**, meliputi : (a) Kurangnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor publik; (b) Rendahnya perlindungan terhadap pekerja migran; (c) Rendahnya akses perempuan terhadap informasi pasar kerja, permodalan dan jaringan kerja; (d) Rendahnya posisi tawar perempuan dalam sektor informal; (e) Rendahnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ; (f) Rendahnya pemahaman dan akses perempuan terhadap informasi mengenai prosedur serta mekanisme pengiriman TKI ke Luar Negeri; (4) **Lingkup Tindak Kekerasan terhadap perempuan**, meliputi : (a) Rendahnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan; (b) Tingginya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah domestik dan publik; (5) **Lingkup Kelembagaan**, meliputi : (a) Rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan; (b) Belum sepenuhnya peraturan daerah, kebijakan dan program pembangunan

responsif gender; (c) Belum sepenuhnya unit kerja, pengambil keputusan dan *stakeholders* memahami arti pentingnya pengarusutamaan gender; (d) Kurang mantapnya organisasi perempuan dan institusi-institusi pemberdayaan perempuan yang mampu mempresentasikan kebutuhan perempuan; (e) Masih kurangnya ketersediaan data pilah dan belum adanya sistem informasi gender untuk mendukung perencanaan dan evaluasi.

Kebijakan, Kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan di antaranya adalah : Kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan pada : (1) **Lingkup Pendidikan**, meliputi : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal; (2) **Lingkup Kesehatan**, meliputi : Peningkatan pemahaman, hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan; (3) **Lingkup Ketenagakerjaan dan ekonomi**, meliputi : (a) Peningkatan “*Affirmative Action*” (*program khusus*) untuk kemampuan kewirausahaan; (b) Peningkatan akses informasi yang seluas-luasnya baik informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan yang mampu menggerakkan perempuan kearah upaya peningkatan kualitas diri; (c) Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, termasuk pekerja migran; (4) **Lingkup Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**, meliputi : Pencegahan, pengurangan, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM untuk memperpendek rantai penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan perempuan; (5) **Lingkup Kelembagaan**, meliputi : (a) Peningkatan dan penguatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan; (b) Mewujudkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah, kebijakan pembangunan dan seluruh program pembangunan daerah; (c) Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender pada semua unit kerja, pengambil keputusan dan *stakeholders* untuk menumbuhkan kesadaran kritis

tentang keadilan dan kesetaraan gender; (d) Penguatan peran organisasi perempuan dan institusi-institusi pemberdayaan perempuan agar memiliki basis kompetensi yang makin terarah pada upaya peningkatan kualitas perempuan dan mendorong kearah terciptanya kesetaraan dan keadilan gender; (e) Penyediaan data pilah dan sistem informasi gender sebagai pendukung proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang berperspekif gender.

Tujuan, yang ingin dicapai adalah : (1) **Lingkup pendidikan**, meliputi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan; (2) **Lingkup Kesehatan**, meliputi : Membuka akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan memadai, pengetahuan serta kepekaan tentang Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi; (3) **Lingkup Ketenagakerjaan dan ekonomi**, meliputi : (a) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan; (b) Meningkatkan kemandirian perempuan melalui terbukanya akses informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan; (c) Meningkatkan perlindungan hukum. (4) **Lingkup Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**, meliputi : Mencegah , mengurangi dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan; (5) **Lingkup Kelembagaan**, meliputi : (a) Meningkatkan dan menguatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan; (b) Mewujudkan Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah dan program pembangunan daerah yang responsif gender; (c) Meningkatkan pemahaman pengarusutamaan gender pada semua unit kerja, pengambil keputusan dan stakeholders untuk menumbuhkan kesadaran kritis tentang keadilan dan kesetaraan gender; (d) Meningkatkan dan menguatkan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi perempuan dan institusi-institusi pemberdayaan perempuan; (e) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berperspektif gender.

Strategi, Strategi yang ditempuh dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah : (1) **Lingkup Pendidikan,** yaitu : Mendorong peningkatan kualitas SDM perempuan dibidang

pendidikan formal dan nonformal melalui “*affirmative action*” (*program khusus*) dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, termasuk pendidikan agama serta penelitian yang peka gender dan penguasaan teknologi; (2) **Lingkup Kesehatan,** yaitu : Meningkatkan akses perempuan pada pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan menghormati hak-hak reproduksi perempuan; (3) **Lingkup Ketenagakerjaan dan ekonomi,** yaitu : (a) Menumbuhkan akses perempuan untuk memperoleh informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi; (b) Mengembangkan kemitraan, jaringan kerja dan jaringan usaha dalam rangka peningkatan kegiatan usaha; (c) Perlindungan Hukum bagi pekerja perempuan, termasuk pekerja migran untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-haknya; (4) **Lingkup Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,** yaitu : (a) Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan; (b) Advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender; (c) Mengembangkan model-model penanganan bagi korban kekerasan berbasis gender; (d) Memantapkan fungsi Women Crisis Centre (WCC) dan penguatan mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender di masyarakat; (5) **Lingkup Kelembagaan,** yaitu : (a) Kampanye dan mengembangkan jaringan organisasi perempuan dalam rangka mendorong tercapainya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan secara mantap baik di jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif; (b) Mengintegrasikan perspektif gender kedalam Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintahan Daerah dan seluruh program pembangunan daerah; (c) Advokasi dalam upaya pengarusutamaan gender bagi semua unit kerja, pengambil keputusan dan *stakeholders*; (d) Meningkatkan dan menguatkan SDM

organisasi perempuan dan institusi-institusi pemberdayaan perempuan; (e) Mengupayakan ketersediaan data pilah dan sistem informasi gender dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang berperspektif gender.

Program, Program pemberdayaan perempuan adalah:

1) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program ini untuk meningkatkan kondisi kualitas kesejahteraan perempuan serta menjawab kebutuhan praktis perempuan.

2) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Program ini untuk melembagakan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, dalam rangka meningkatkan status kedudukan partisipasi perempuan dan menjawab kebutuhan strategis gender, dengan memperhatikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan masalah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

c. Anak dan Remaja.

Kondisi Saat ini, Pada dasarnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, pada saat janin dalam kandungan, dan dari unit yang terkecil yaitu keluarga. Oleh karena itu, perhatian kepada anak sejak dari dalam kandungan hingga remaja menjadi sangat penting dilakukan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi ideal seperti yang dimaksudkan dalam Undang–Undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pendidikan dimana Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah (TPAUS) terutama pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masih rendah, yaitu SLTP 78,40 % dan SLTA 40,21 %. Selain

itu, tingkat kematian bayi dan gizi buruk masih cukup tinggi, yang dapat dilihat dari tingginya Angka Kematian Bayi (*AKB*) tahun 2001 yaitu 36,67 per 1.000 kelahiran hidup, dan Berat Bayi Lahir Rendah (*BBLR*) tahun 2001 sebesar 4,29 per 1.000 kelahiran.

Disisi lain kemiskinan yang dihadapi para orang tua telah mendorong para orang tua mempekerjakan anak-anak mereka untuk mencari nafkah tambahan atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Tahun 2001 di Jawa Tengah terdapat 330.672 pekerja anak, yang merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi para majikan.

Suatu hal yang paling mengkhawatirkan adalah anak-anak, sangat rentan terhadap tindak kekerasan, seperti penganiayaan, perkosaan, eksploitasi seksual, penculikan dan perdagangan anak. Dampak adanya perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak, adalah meningkatnya jumlah anak penderita penyakit kelamin. Sampai pertengahan Tahun 2002 dari 135 kasus perkosaan yang terjadi di Jawa Tengah 62 % korban adalah anak-anak.

Rendahnya perlindungan anak, menempatkan posisi anak dan remaja menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksualitas, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya kasus perkosaan oleh keluarga (*incest*). Sampai pertengahan Tahun 2002 kasus perkosaan oleh ayah kandung 9 kasus (*10 korban*), kasus perkosaan oleh ayah tiri 5 kasus (*6 korban*).

Anak juga sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi hanya karena ketidakjelasan status dan identitasnya, sebagai akibat makin meningkatnya anak yang lahir diluar nikah dan nikah siri, seperti sulitnya anak mendapatkan akte kelahiran.

Permasalahan. Permasalahan dalam pembangunan anak dan remaja yang masih dihadapi saat ini adalah : (1) Tingginya tindak kekerasan terhadap anak; (2) Tingginya jumlah anak terlantar; (3) Rendahnya perlindungan status dan identitas anak; (4) Lemahnya

kapasitas dan mekanisme kelembagaan penanganan anak dan remaja, salah satunya ditandai dengan terbatasnya informasi penerapan perlindungan anak; (5) Banyaknya pekerja anak; (6) Sedikitnya lembaga-lembaga sosial, LSM yang tergerak untuk menangani anak dan remaja; (7) Makin maraknya peredaran narkoba dan meningkatnya seks komersial bagi anak.

Potensi yang tersedia dalam upaya mendukung peningkatan kualitas dan status anak dan remaja adalah tersedianya panti asuhan sejumlah 22 buah dan panti sosial anak sejumlah 3 buah. Disamping itu terdapat berbagai panti anak milik masyarakat, potensi yang lain adalah tingginya komitmen pemerintah dalam program wajib belajar.

Kebijakan, Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan anak dan remaja yang ditempuh adalah : (1) Pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak; (2) Penanganan anak dan remaja terlantar; (3) Perlindungan status dan identitas anak; (4) Perkuatan kelembagaan yang menangani anak dan remaja; (5) Perlindungan pekerja anak; (6) Mengembangkan partisipasi masyarakat, swasta, LSM, ormas untuk ikut serta dalam penanggulangan masalah anak dan remaja; (7) Penanganan kasus narkoba dan penderita PMS anak.

Tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan anak dan remaja adalah : (1) Meningkatkan perlindungan terhadap anak; (2) Memberikan kejelasan status dan identitas anak dan remaja; (3) Mengefektifkan penanganan anak dan remaja; (4) Menekan jumlah pekerja anak; (4) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah anak dan remaja; (5) Meningkatkan penanggulangan anak korban kekerasan, narkoba, penderita PMS dan HIV/AIDS;

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan anak dan remaja adalah : (1) *Law enforcement* terhadap tindak

kekerasan; (2) Peningkatan profesionalisme penanganan panti anak; (3) Fasilitasi perolehan status dan identitas anak; (4) Peningkatan SDM dan kapasitas kelembagaan penanganan anak dan remaja; (5) Penerapan peraturan perundangan tenaga kerja; (6) Mendorong partisipasi masyarakat dan memfasilitasi penguatan jaringan kerjasama pada lembaga/institusi swasta, LSM, Ormas yang menangani anak dan remaja; (7) Meningkatkan advokasi dan pelayanan anak korban kekerasan, narkoba, penderita PMKS dan HIV/AIDS.

Program, Program yang dilakukan adalah **Program Anak dan Remaja**, Program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

7. Agama.

Kondisi saat ini, Seiring makin disadarinya kebutuhan sentuhan agamis disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka makin disadari pula bahwa pembangunan bidang agama menjadi faktor yang sangat penting di dalam pembentukan masyarakat yang madani. Disisi lain disadari pula bahwa selama ini penanganan berbagai permasalahan terhadap berbagai sektor kehidupan dirasakan masih kurang, utamanya terhadap penghayatan dan pengamalannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, kemajemukan agama di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius karena potensial memicu konflik yang berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang berbasis agama masih dirasakan belum sesuai, tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, terbatasnya penyediaan prasarana/sarana pendidikan, rendahnya mutu, kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan serta terjadinya kurang relevansian (*missmatch*) antara tamatan pendidikan dengan kualifikasi/ standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan bidang agama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) Penghayatan dan pengamalan agama belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Belum optimalnya fungsi dan peran lembaga-lembaga keagamaan di bidang sosial dan kemasyarakatan; (3) Belum optimalnya pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan tradisional keagamaan dan tempat-tempat ibadah; (4) Kurang optimalnya pelayanan ibadah haji Jawa Tengah; (5) Kurangnya kualitas dan relevansi pendidikan formal/ informal keagamaan.

Potensi di bidang agama dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi bidang agama sebagai landasan moral - spritual dalam bidang keagamaan adalah : (1) Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam dengan kultur masyarakat yang agamis dengan tingkat toleransi yang baik sehingga mudah diarahkan dalam mewujudkan program-program pembangunan dalam bidang keagamaan; (2) Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan di Jawa Tengah sebanyak 125.695 unit terdiri Masjid sebanyak 35.199 unit, langgar sebanyak 87.523 unit ; gereja Kristen sebanyak 1.925 unit, Gereja Katolik sebanyak 608 unit, Pura Hindu sebanyak 168 unit; Vihara Budha sebanyak 274 unit. Yang dapat mendukung kegiatan keagamaan dan aktivitas keagamaan para penganutnya. (3) Tersedianya lembaga pendidikan formal keagamaan terdiri Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 3.738 unit dengan jumlah guru 25.422 orang dan murid sebanyak 521.550 orang. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.196 unit, jumlah guru sebanyak 25.716 orang dengan jumlah murid sebanyak 300.681 orang. Banyaknya Madrasah Aliyah sebanyak 425 unit, jumlah guru sebanyak 14.230 orang dan murid sebanyak 14.230 orang serta pendidikan tingkat perguruan tinggi keagamaan. Sedangkan potensi pendidikan non formal keagamaan dengan jumlah pondok pesantren

sebanyak 1.946 unit dengan jumlah Kyai sebanyak 3.024 orang dan Ustad sebanyak 14.158 orang dengan jumlah santri sebanyak 432.751 orang, dan pada tahun 2002 jemaah haji yang diberangkatkan mencapai 21 ribu orang.

Kebijakan. Kebijakan pembangunan keagamaan di Jawa Tengah diarahkan pada: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan; (2) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga keagamaan di bidang sosial dan kemasyarakatan; serta (3) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan formal/ informal keagamaan.

Tujuan. Tujuan pembangunan agama adalah : Semakin mantapnya fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta meningkatnya kerukunan hidup beragama.

Strategi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan agama di Jawa Tengah adalah : (1) Peningkatan pelayanan ritual keagamaan melalui peningkatan kualitas pelayanan haji serta fasilitasi kegiatan ritual keagamaan; (2) Pendayagunaan lembaga keagamaan; (3) Fasilitasi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan formal/ informal keagamaan.

Program. Program pembangunan agama yang akan dilaksanakan adalah:

1) Pelayanan Kehidupan Beragama,

Program ini untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah; dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji.

Program ini untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan calon haji dalam melaksanakan ibadah.

3) Pembinaan Pendidikan Agama

Program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

8. Aparatur Pemerintah Daerah.

Kondisi saat ini, Tuntutan masyarakat akan profesionalisme kinerja lembaga dan aparatur pemerintah daerah semakin besar dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan serta pembangunan yang partisipatif. Di sisi lain ketersediaan sarana prasarana pemerintahan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di daerah.

Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi bidang aparatur pemerintah daerah, adalah (1) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; (2) Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan fungsi pelayanan publik; (3) Masih belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan; (4) Masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan.

Potensi yang dimiliki bidang aparatur pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah, adalah : (1) Jumlah pegawai negeri sipil sampai dengan bulan Agustus 2003 sebanyak 19.892 Orang; dengan klasifikasi tingkat pendidikan formal sebagai berikut : SD sebanyak 1.893 orang; SLTP sebanyak 1.568 orang; SLTA sebanyak 8.822 orang; Diploma sebanyak 696 orang; Sarjana Muda sebanyak 1.811 orang; S1 sebanyak 4.514 orang; S2 sebanyak 586 orang dan S3 sebanyak 4 orang. (2) Tersedianya

SDM Aparatur yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan antara lain melalui Diklat Struktural (1998 s/d 2002) sejumlah 2.400 orang; Diklat Teknis (1998 s/d 2002) sejumlah 6.909 orang; dan Diklat Fungsional (1998 s/d 2002) sejumlah 6.066 orang; (3) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan, (1) Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Good Governance; (2) Peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung terwujudnya Good Governance.

Tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan aparatur pemerintah daerah, adalah : (1) Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan penataan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; (2) Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah untuk dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik secara optimal; (3) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan; (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengawasan guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan.

Strategi, Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah, adalah : (1) Mengkaji, mengevaluasi dan menata tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; (2) Melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah untuk dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik secara optimal melalui pendidikan dan pelatihan; (3) Mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan sistem

manajemen pemerintahan dan pembangunan; (4) mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengawasan guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN; (5) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah, adalah :

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Program ini untuk menciptakan dan menyempurnakan kembali struktur kelembagaan perangkat daerah yang efektif serta efisien dan ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan serta hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.

Program ini untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal.

3) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Program ini untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, pengembangan akses informasi komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Program ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistim informasi manajemen berbasis komputer

(computerize), pengadaan sarana kantor pemerintahan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah.

9. Pemberdayaan Masyarakat.

Kondisi Saat ini, Pelaksanaan pembangunan daerah selama ini dirasakan masih belum memberikan kesempatan secara optimal kepada masyarakat untuk berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hal tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya fungsi kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya masyarakat.

Melalui program pemberdayaan masyarakat telah berhasil dilaksanakan kegiatan program yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Beberapa contoh diantaranya adalah pada tahun 2002, kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEP-Masy) telah berhasil melatih sebanyak 330 orang pengelola dan anggota kelompok usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal usaha sebanyak 60 unit di 12 kabupaten, disamping telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam swadaya masyarakat sebesar Rp. 292.583.817.000,-. Dalam rangka menggairahkan dan menumbuhkembangkan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) telah dilakukan orientasi bagi pengelola LPM di 13 kabupaten/kota dan pemberian bantuan modal. Kemudian terkait dengan usaha pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) telah berhasil dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka sosialisasi rekayasa teknologi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi perlu upaya peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui penguatan lembaga komunikasi masyarakat. Disamping itu pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat belum mampu menyentuh kebutuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal.

Permasalahan. Permasalahan pemberdayaan masyarakat yang masih dihadapi saat ini adalah : (1) Masih rendahnya peran masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pembangunan; (2) Masih tingginya angka kemiskinan; (3) Keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; (4) Belum optimalnya pembagian wewenang dan sumber daya dari pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah (5) Masih lemahnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat (6) Belum mantapnya pola pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Potensi yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya jumlah lembaga keswadayaan masyarakat, organisasi yang berafiliasi pada pemberdayaan masyarakat serta kader penggerak pembangunan. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat tersebut adalah : Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) sebanyak 8.198 unit, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebanyak 6.552 unit, Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 7.871 unit, Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 1.999 unit, Pasar Desa sebanyak 8.198 unit, Ponpes sebanyak 1.532 unit, Kader Pembangunan Desa (KPD) sebanyak 42.460, Posyantekdes sebanyak 563 unit, TP PKK sebanyak 8.552 orang.

Kebijakan. Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat yang ditempuh adalah : (1) Mengoptimalkan kapasitas lembaga masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (2) Pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG); (3) Mengoptimalkan fungsi lembaga ekonomi masyarakat; (4) Meningkatkan akses informasi dan komunikasi lembaga komunikasi masyarakat; (5) Memantapkan perencanaan program pemberdayaan masyarakat.

Tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah : (1) Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat termasuk lembaga ekonomi masyarakat sehingga mampu mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (2) Meningkatkan kemampuan & ketrampilan masyarakat untuk bisa hidup mandiri; (3) Memperkuat eksistensi lembaga komunikasi masyarakat; (4) Memantapkan program pemberdayaan masyarakat.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah : (1) Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik melalui lembaga masyarakat yang ada; (2) Mengaplikasikan teknologi tepat guna sebagai wahana pemasyarakatan kemampuan dan ketrampilan; (3) Mengoptimalkan fungsi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai institusi penjaga ketahanan pangan; (4) Meningkatkan kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dan Pelaku Usaha Ekonomi; ; (5) memfasilitasi berfungsinya lembaga komunikasi masyarakat; (6) Peningkatan kualitas SDM lembaga pemberdayaan masyarakat.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah :

1) Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.

Program ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi, memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Program ini untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan.

3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Program ini untuk mengembangkan lembaga ekonomi masyarakat, meningkatkan akses informasi komunikasi dan eksistensi lembaga komunikasi masyarakat.

10. Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kondisi Saat ini, Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah yang diijalakan sejak tahun 2001, telah membawa perubahan sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektifitas pelaksanaannya bagi percepatan pembangunan dan kemandirian daerah.

Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi bidang otonomi daerah, adalah : (1) Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan otonomi daerah; (2) Munculnya egoisme otonomi daerah yang berdampak pada konflik kepentingan antar daerah mengenai pengelolaan potensi daerah; (3) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Penggantian Anggota DPRD; (4) Belum efektifnya kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Potensi yang dimiliki bidang otonomi daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi di daerah, adalah (1) Terlaksananya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) Mantapnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (3) Tersedianya sumberdaya yang relatif memadai guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan, Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan otonomi daerah adalah peningkatan pelaksanaan otonomi

daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berkesinambungan.

Tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan otonomi daerah, adalah : (1) Meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah; (2) Meningkatkan fasilitasi, mediasi dan sosialisasi hakekat otonomi daerah kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat di daerah; (3) Meningkatkan koordinasi secara terpadu dalam pelaksanaan proses penyelesaian administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Penggantian Anggota DPRD; (4) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan otonomi daerah, adalah : (1) Mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah; (2) Melakukan fasilitasi dan mediasi tentang prosedur, mekanisme kerja dalam pelaksanaan otonomi daerah pada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas daerah; (3) Melakukan koordinasi secara terpadu dalam pelaksanaan proses penyelesaian administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Penggantian Anggota DPRD; (4) Mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan otonomi daerah, adalah :

1) Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Program ini untuk memantapkan dan meningkatkan efektifitas serta optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan seluruh potensi daerah.

2) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Program ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang menyangkut prosedur, mekanisme kerja, struktur organisasi, hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

3) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Program ini untuk meningkatkan kerjasama antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kondisi saat ini. Pembangunan bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya memiliki dua dimensi yang saling terkait, pertama IPTEK sebagai sarana dalam mempercepat tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan serta sebagai sasaran pembangunan guna meningkatkan kemandirian penguasaan IPTEK. Perkembangan hasil – hasil penelitian bisa didayagunakan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi, industri dan dunia usaha. Namun hal tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan. Hal ini dikarenakan pembangunan bidang IPTEK masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain : (1) Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK belum dioptimalkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan stakeholders lainnya; (2) Kegiatan lembaga-lembaga penelitian/para peneliti masih merupakan kegiatan penelitian untuk memenuhi agenda dan kepentingan internal masing-masing; (3) Kerjasama jaringan penelitian antar lembaga-lembaga penelitian belum efektif; (4) Kualitas hasil penelitian dan pengembangan belum berdaya saing; (5) Pengembangan IPTEK belum tersosialisasi dan terfokus; (6) Masih

banyak anggota masyarakat IPTEK dan dunia usaha belum sadar akan pentingnya HaKI.

Kebijakan. Kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Tengah diarahkan pada: (1) Melakukan sinkronisasi koordinasi dan kerjasama antar peneliti, serta antara peneliti dengan pemakai hasil penelitian; (2) Meningkatkan investasi dan kerjasama antar lembaga penelitian sebagai upaya pendayagunaan produk penelitian dan pengembangan IPTEK; (3) Mendayagunaan Jaringan penelitian Melalui forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka kerjasama informasi hasil penelitian; (4) Mendorong terbentuknya kemitraan sinergi antar pelaku IPTEK dan dunia Usaha; (5) Memfasilitasi penelitian yang berdampak langsung pada penanganan permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

Tujuan. Mendayagunakan sumberdaya IPTEK sebagai upaya meningkatkan produktifitas masyarakat serta memecahkan permasalahan – permasalahan baik pembangunan dan kemasyarakatan.

Strategi. Untuk mencapai tujuan pembangunan IPTEK tersebut digunakan strategi antara lain: (1) Meningkatkan peran IPTEK dan Litbang dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas kegiatan Iptek dan Litbang guna mendukung pengembangan produksi dan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) Meningkatkan keterpaduan kegiatan dan interaksi dengan semua stake holders termasuk dunia usaha serta sistem informasi dan manajemen Iptek; (3) Meningkatkan kemampuan jaringan Iptek dan Penelitian serta fasilitas jaringan, kerjasama dan kualitas kegiatan (4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Iptek dan Litbang di daerah serta kualitas hasil penelitian; (5) Meningkatkan kualitas sumber daya Iptek dan Litbang di Daerah; (6) Mensosialisasikan dan memfasilitasi upaya perlindungan HaKI.

Program. Program pembangunan IPTEK antara lain:

1) Pengembangan Sumberdaya IPTEK

Program ini untuk memungkinkan terjadinya penyuburan dalam usaha meningkatkan penguasaan penelitian dasar dan penelitian terapan, pengembangan rekayasa dan pengembangan teknik budidaya;

2) Penelitian dan Pengembangan

Program ini untuk mendorong penyediaan produk IPTEK yang berkualitas baik dari segi lingkungan strategis, ilmiah maupun tingkat penerapannya ke dalam pengambilan keputusan dan kehidupan dunia usaha;

3) Pengembangan sistem informasi manajemen IPTEK

Program ini untuk meningkatkan interaksi yang tinggi antara agenda riset dari lembaga penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha;

4) Program Perlindungan HaKI

Program ini untuk memfasilitasi kepada para penemu teknologi dan inovasi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas kekayaan intelektual atas hasil penemuan dan inovasinya.

C. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur.

Kebijakan diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata sesuai dengan karakteristik wilayah berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah :

1. Mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah terisolir, perbatasan, kurang berkembang dan kawasan strategis regional maupun nasional

2. Mempercepat realisasi pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan perpanjangan landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang serta penyempurnaan fasilitas terminal Bandara Adi Sumarmo Surakarta
3. Meningkatkan penanganan daerah-daerah potensi rawan bencana alam dan melakukan deteksi dini, utamanya pada kawasan permukiman, industri dan pertanian.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
5. Meningkatkan penanganan kerusakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan melalui sektor-sektor pendukung yang meliputi :

1. Perhubungan.

Kondisi saat ini. Perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*public services*), penunjang kegiatan ekonomi daerah dan salah satu potensi pendapatan daerah.

Perhubungan sesuai dengan media yang dilaluinya dikelompokkan menjadi perhubungan darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, meteorologi dan SAR, dimana kondisi dan potensi dari perhubungan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

Perhubungan Darat. (1) Jaringan Transportasi Jalan. Panjang jalan di Jawa Tengah 26.263 km terdiri atas 1.215 km jalan nasional, 2.589 km jalan Propinsi dan 22.459 km jalan Kabupaten/Kota. Jalan tersebut dilengkapi 17 jembatan timbang dengan sarana dan prasarananya yang belum optimal (baru 5 jembatan timbang yang sudah menggunakan komputerisasi). Angkutan jalan masih mendominasi

pergerakan penumpang dan barang sehingga dengan kondisi tersebut tingkat kerusakan jalan relatif tetap masih tinggi. Adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan volume / kapasitas jalan dengan pertumbuhan volume kendaraan beserta beban muatannya dan masih terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang, menyebabkan relatif masih tingginya tingkat kecelakaan dan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas jalan. (2) Jaringan Transportasi Jalan Rel. Panjang jaringan jalan rel secara keseluruhan 1.518 km, terbagi atas 894 km (58,89%) jaringan jalan rel operasi dan 624 km (41,11%) jaringan jalan rel tidak operasi. Jaringan jalan rel operasi didukung oleh tipe rel R 54/50 sepanjang 22% dan R 38/42 sepanjang 78%. Jaringan jalan rel operasi tersebut sebagian besar (79%) masih berbantal kayu, sedangkan sisanya (21%) sudah berbantal beton. Dengan kondisi demikian terasa masih kurang dapat mengikuti dinamika perkembangan pembangunan daerah baik tingkat keterjangkauan maupun tingkat pelayanannya; (3) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan yang melayani angkutan lintas propinsi berada di Majingklak Cilacap dan penyeberangan lintas dalam kabupaten di Karimunjawa –Jepara. Penyeberangan Karimunjawa – Jepara masih memerlukan perhatian untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan pariwisata Karimunjawa. Untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi yang sudah dirintis persiapannya, perlu dilakukan penataan khususnya pada penyeberangan Semarang (Kendal) – Kumai.

Perhubungan Laut. Jawa Tengah memiliki 2 (dua) pelabuhan Internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, 1 (satu) Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Juwana dan 6 (enam) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Brebes, Tegal, Batang, Jepara, Karimunjawa dan Rembang. Pelabuhan regional ini menurut rencana kewenangan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada Propinsi Jawa Tengah. Namun demikian, untuk pelabuhan Tegal

karena masih dikelola oleh PT. Pelindo III maka belum termasuk Pelabuhan Regional yang akan diserahkan kepada Propinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini potensi tersebut masih belum optimal dimanfaatkan, disamping tingkat keselamatan pelayaran dan keamanan perairan untuk transportasi laut masih relatif rendah.

Perhubungan Udara. Terdapat 2 (dua) bandar udara (bandara) yaitu Bandara Ahmad Yani di Semarang sebagai Bandara Domestik dan Bandara Adi Sumarmo di Surakarta sebagai Bandara Internasional Bukan Pusat Penyebaran serta 2 (dua) bandara lainnya, yaitu Bandara Tunggul Wulung di Cilacap dan Bandara Dewadaru di Karimunjawa yang merupakan bandara bukan pusat penyebaran. Kondisi saat ini adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta keselamatan penerbangan yang relatif tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan penumpang, teknologi, dinamika perkembangan dan standard pelayanan terutama pada Bandara Adi Sumarmo di Surakarta dan Bandara Ahmad Yani di Semarang yang memerlukan perpanjangan landasan pacunya.

Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan Search and Rescue (SAR). Kondisi Pos di Jawa Tengah saat ini meliputi jumlah fasilitas layanan pos tidak bergerak yaitu 661 unit dan fasilitas layanan pos bergerak yaitu 7.603 unit, sedangkan untuk layanan jasa titipan yaitu 398 unit dan asosiasi filateli beranggotakan 368.000 orang. Operasionalisasi pelayanan pos dan jasa titipan masih terdapat kecenderungan mengabaikan ketentuan pos dan jasa titipan. Kondisi telekomunikasi di Jawa Tengah saat ini meliputi 606.522 SST untuk telepon tetap dan 1.090.415 SST untuk telepon seluler yang diperlengkapi dengan Base Transmition Station (BTS) sejumlah 600 buah dengan operator sebanyak 5 buah. Sedangkan pengguna frekuensi sebanyak 29.307 unit dan operator instalator kabel rumah tangga/gedung sebanyak 129 buah, jumlah wartel 18.914 unit dengan kapasitas 23.000 SST dan jumlah warnet sebanyak 350 unit serta jumlah telepon umum 4.523 buah. Para

pengguna frekuensi ilegal cenderung meningkat yang mengakibatkan terjadinya interferensi/gangguan frekuensi legal. Disamping itu pembangunan jaringan telepon tetap belum sepenuhnya menyentuh daerah perdesaan dan terisolir. Terdapat 4 (empat) stasiun meteorologi meliputi stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang, stasiun meteorologi maritim di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal. Guna memberikan pelayanan informasi iklim dan cuaca di wilayah Surakarta dan sekitarnya maka diharapkan dapat didirikan UPT Meteorologi di Bandara Adi Sumarmo Surakarta. Fungsi stasiun meteorologi sangat diperlukan untuk publikasi informasi iklim dan cuaca bagi kepentingan penerbangan, pelayaran, pertanian dan antisipasi bencana banjir. SAR propinsi Jawa Tengah sebagai unsur fasilitator dan koordinator potensi SAR dituntut kesiagaan dan kecermatannya dalam memberikan pertolongan dan pencarian korban kecelakaan dan bencana alam.

Permasalahan. Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah (1) Masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena ke-tidakseimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalu lintas/beban kendaraan serta terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang; (2) Kurang terarah dan terpadunya pembangunan dan pengembangan perhubungan darat, laut dan udara untuk mendukung dan berperan dalam pengembangan kawasan/potensi strategis/unggulan daerah; (3) Belum optimalnya kinerja perhubungan darat, laut dan udara sebagai pelayanan masyarakat (*public services*) terutama yang berkenaan dengan angkutan dan kualitasnya; (4) Operasionalisasi pos, telekomunikasi masih mengabaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan belum menjangkau seluruh daerah; (5) Pelayanan meteorologi dan SAR belum optimal.

Kebijakan, pembangunan perhubungan diarahkan pada: (1) Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan serta peranan dalam mendukung pengembangan potensi-potensi unggulan daerah secara merata, seimbang dan serasi berdasarkan pada Rencana Tata Ruang dan dinamika perkembangan masyarakat dan daerah guna meningkatkan kompetensi dan kemandirian Propinsi Jawa Tengah. (2) Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan berserta kelengkapan pendukung pelaksanaannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*) sejalan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi serta memperhatikan keterjangkauan masyarakat kalangan menengah kebawah.

Tujuan, yang ingin dicapai adalah : (1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang, barang dan jasa; (2) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan jasa transportasi darat, laut, udara dan pos, telekomunikasi, meteorologi dan SAR kepada masyarakat; (3) Meningkatkan produktifitas kinerja operasional dan potensi termasuk untuk mendukung PAD.

Strategi, yang ditempuh adalah : (1) Peningkatan peran dan fungsi jembatan timbang sesuai Perda No.4 Tahun 2001; (2) Peningkatan jangkauan, kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan penumpang kereta api secara bertahap terutama jarak pendek serta angkutan petikemas; (3) Peningkatan pelayanan KA lintas Utara dan Selatan dengan *double track*; (4) Peningkatan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan terutama Karimunjawa-Jepara dan Semarang (Kendal)-Kumai; (5) Peningkatan dan pengembangan fasilitas Bandara terutama Ahmad Yani Semarang dan Adi Sumarmo Surakarta; (6) Pengembangan fasilitas prasarana pelabuhan laut di Brebes, Tegal, Batang, Jepara, Karimunjawa dan Rembang; (7) Peningkatan fasilitas keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran dan

penerbangan; (8) Peningkatan dan optimalisasi peraturan penunjang potensi termasuk untuk pendapatan daerah; (9) Pemerataan dan peningkatan pelayanan jasa pos, telekomunikasi, meteorologi dan SAR; (10) Peningkatan dan optimalisasi sumber daya secara sinergi baik masyarakat, Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Program. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program yang dilaksanakan adalah :

1) Pengembangan Perhubungan Darat;

Program ini untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat serta memadukan moda-moda transportasi lainnya guna membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu termasuk perlengkapan jalan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal.

2) Pengembangan Perhubungan Laut;

Program ini untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan laut serta memadukan moda-moda transportasi lainnya sehingga membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal.

3) Pengembangan Perhubungan Udara;

Program ini untuk mendukung sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan udara serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar pulau yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal.

4) Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR.

Program ini untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan Bidang Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal.

5) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Program ini untuk memberikan arahan dan strategi bagi penyusunan kebijakan pembangunan perhubungan secara berkesinambungan baik darat, laut, maupun udara sehingga terwujud sistem transportasi yang handal, terpadu, efisien, berkemampuan tinggi dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat.

2. Sumber Daya Air dan Irigasi.

Kondisi saat ini. Air dan sumber daya air mempunyai nilai yang sangat strategis, karena diperlukan guna memenuhi berbagai keperluan seperti : menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengembangan permukiman, industri, pariwisata, kelistrikan dan lain sebagainya.

Prasarana dan sarana sumber daya air yang dikelola Pemerintah (di luar yang dikelola masyarakat/desa) di Propinsi Jawa Tengah : (a) sungai 1.321 buah sepanjang \pm 15.052,70 km dengan tanggul banjir sepanjang \pm 1.129 km; (b) waduk besar, waduk alam, waduk kecil sebanyak 39 buah; (c) embung atau waduk lapangan sebanyak 172 buah; (d) bendung sebanyak 1.273 buah terdiri dari berbagai tipe; (e) jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan irigasi sebanyak 5.437 buah dan saluran irigasi sepanjang 580,36 km; (f) prasarana penunjang pengelolaan pengairan yang mendukung penyediaan data sumber daya air meliputi jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas komunikasi.

Permasalahan. Permasalahan sumber daya air adalah terganggunya ketersediaan sumber daya air yang meliputi antara lain: (1) Menurunnya fungsi sarana dan prasarana layanan air irigasi; (2) Menurunnya kualitas air; (3) Berkurangnya lahan daerah resapan air

akibat perubahan tata guna lahan; (4) Belum optimalnya keterpaduan pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu wilayah sungai sebagai suatu satuan wilayah pengembangan; (5) Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air, sumber-sumber air akibat perilaku pemanfaatan lahan di daerah hulu yang kurang terkendali; dan (6) Terancamnya kelestarian fungsi bangunan pengairan sebagai akibat kurang terkendalinya pengambilan bahan galian Gol. C.

Potensi sumber daya air permukaan yang ada di Jawa Tengah sebesar : 57,87 milyar m³, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 37,92 milyar m³ (65,53%) dan yang belum dimanfaatkan dan terbuang ke laut sebesar 19,95 milyar m³ (34,37 %). Kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sumber daya air saat ini terdiri dari : 1) Kondisi waduk secara umum sebesar 63 %; 2) Kondisi fisik sungai secara umum masih dapat di nilai cukup baik sebagai wadah-wadah air guna melakukan fungsi mengalirkan air menuju ke laut, meski belum seluruhnya dapat menampung debit dengan periode ulang tertentu dari daerah aliran sungai; 3). Kondisi bangunan air menunjukkan trend baik sebesar 63,40 %. 4). Dalam hal kinerja saluran pembawa, 62,42 % dalam kondisi baik.

Kebijakan, Dalam upaya mewujudkan pendayagunaan sumberdaya air secara optimal guna menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengembangan permukiman, industri, pariwisata dan kelistrikan secara terintegrasi dan berkelanjutan ditempuh kebijakan untuk mengelola sumber daya air dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu wilayah sungai sebagai satuan wilayah pengembangan.

Pemikiran tersebut mendasari bahwa sungai mulai dari mata airnya, daerah pengalirannya sampai ke muara merupakan satu kesatuan, sehingga harus dikelola secara terpadu, dengan prinsip *one river, one*

plan, one integrated management dengan langkah-langkah yang mencakup : (1) pemantapan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air secara efektif dan efisien melalui kerjasama berbagai pihak terkait; (2) peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi; (3) optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi; (4) pemantapan *master plan* dan program pengembangan sumber daya air secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan; (5) pemantapan kualitas dan kuantitas jaringan stasiun dan data hidrologi, serta sumber daya air lainnya untuk pengembangan data dasar perencanaan yang handal; (6) Pengelolaan sumber daya air melalui korporasi secara bertahap; (7) perlindungan kawasan strategis dan sentra produksi dari ancaman banjir dan kekeringan;

Tujuan, Tujuan pembangunan bidang sumberdaya air dan irigasi adalah untuk: (1) menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air; (2) menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai (DAS); (3) mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna dan antar penggunaan; (4) mengoptimalkan sumber daya air yang ada; (5) mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah; (6) meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya air sebagai ekosistem daerah, dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, potensi rekreasi, dan nilai-nilai keseimbangan ekologis yang kesemuanya menjadi cerminan keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh; (7) mengurangi dampak negatif akibat banjir dan kekeringan.

Strategi, Untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya air tersebut di tempuh beberapa strategi sebagai berikut : (1) Mendukung upaya mewujudkan kemandirian dibidang pertanian dengan meningkatkan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang otonom,

mandiri, dan mengakar di masyarakat; (2) Meningkatkan penyediaan air baku dan produktivitas prasarananya untuk memenuhi kebutuhan air bagi hajat hidup masyarakat; (3) Melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air dan sumber-sumber air melalui swadaya dan pemahaman, sehingga secara bertahap dapat merubah peran pemerintah dari penyedia menjadi fasilitator; (4) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi; (5) Meningkatkan peran serta semua pihak yang terkait dengan pengguna sumber daya air dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya air; (6) Memantapkan kualitas dan kuantitas jaringan stasiun dan data hidrologi, serta sumber daya air lainnya untuk pengembangan data dasar perencanaan yang handal; (7) Pengelolaan sumber daya air melalui korporasi secara bertahap; (8) Melindungi kawasan strategis dan sentra produksi pertanian terhadap bahaya banjir dan kekeringan.

Program, Untuk mencapai tujuan pembangunan sumber daya air dan irigasi tersebut ditempuh melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

1) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya;

Program ini untuk mendukung upaya mewujudkan kemandirian di bidang pertanian dengan meningkatkan peran serta P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

2) Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku;

Program ini untuk meningkatkan penyediaan air baku dan produktivitas prasarananya untuk memenuhi kebutuhan air bagi hajat hidup masyarakat.

3) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya;

Program ini untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya air dan konservasi guna mensejahterakan masyarakat.

4) Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Program ini untuk melestarikan kondisi dan fungsi sumber air sekaligus menunjang daya dukung lingkungannya serta meningkatkan nilai manfaat sumber air sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

3. Prasarana Jalan.

Kondisi saat ini. Panjang jalan yang ada 26.263 km terdiri atas 1.215 km jalan nasional, 2.589 km jalan propinsi dan 22.459 km jalan Kabupaten/Kota. Kondisi fisik jalan berstatus propinsi yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Propinsi Jawa Tengah direncanakan sampai dengan akhir tahun 2003 mempunyai kondisi baik sepanjang 1.735 Km (67 %), sedang 751 Km (29%) dan rusak 103 Km (4%); sedangkan pertumbuhan lalu lintas pertahun rata-rata diprediksikan 7 s/d 10 % dengan teknologi maju dan volume angkut yang semakin besar, sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung jalan.

Permasalahan. Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah (1) Menurunnya kinerja pelayanan prasarana jalan akibat meningkatnya pertumbuhan lalu lintas; (2) Masih adanya ruas jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan standard; (3) Kondisi geografis yang kurang menguntungkan.

Kebijakan, yang ditetapkan adalah : (1) Meningkatkan kondisi prasarana jalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Kabupaten/Kota dan dinamika perkembangannya; (2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan; (3) Mengupayakan

peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan; (4) Meningkatkan keterpaduan penanganan jalan dan jembatan antara pemerintah pusat, propinsi dan Kab/Kota.

Tujuan, yang ingin dicapai adalah : (1) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan; (2) Mendukung pengembangan / pembangunan Kota-kota dan kawasan strategis daerah; (3) Memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa.

Strategi, yang ditempuh adalah: (1) Memelihara secara rutin/periodik jalan dan jembatan Propinsi serta menyiapkan Pra kajian untuk percepatan pembangunan jalan Tol; (2) Meningkatkan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan Propinsi guna menunjang pengembangan wilayah, Kota dan kawasan strategis.

Program Untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, ditempuh melalui program :

1) Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;

Program ini untuk mempertahankan prasarana jalan dan jembatan yang ada agar tetap dalam kondisi yang memadai guna melayani arus lalu lintas.

2) Peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Program ini untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan yang tingkat kerusakannya lebih luas dan atau meningkatkan kapasitasnya.

4. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan

a. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kondisi saat ini, Wilayah Propinsi Jawa Tengah seluas 32.254 km² memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang tinggi dan lingkungan hidup yang bervariasi. Data tahun 2001 menunjukkan

bahwa sumberdaya hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 220.000 hektar, hutan negara 649.934 hektar, yang terdiri hutan lindung seluas 73.478 hektar, hutan produksi seluas 465.452 hektar, hutan produksi terbatas seluas 107.543 hektar, serta kawasan suaka alam seluas 3.462 hektar. Lahan kritis di luar kawasan hutan pada enam DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas masih seluas 962.337 hektar. Terdapat 30 CAT (Cekungan air bawah tanah) dengan potensi cadangan ABT (air bawah tanah) sebanyak 12.268.523.000 m³. Konsumsi air bersih rumah tangga dan industri dari ABT untuk sekitar 1.489.069.200 m³/tahun.

Volume sampah rumah tangga sebanyak 3.166.218,78 ton/tahun. Limbah cair domestik sebesar 732.959,5 m³/tahun, beban pencemaran BOD (*Biological Oxygen Demand*) sebanyak 312.194,5 ton/tahun, dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) sebanyak 710.950,5 ton/tahun.

Pencemaran udara dari sumber bergerak berupa debu sebesar 17.247,4 ton/tahun, beban pencemaran SO₂ sebanyak 91.662,8 ton/tahun, CO sebanyak 1.307.684,3 ton/tahun, dan CO₂ sebanyak 124.91.160 ton/tahun. usaha industri dari 644.196 unit menjadi 644.218 telah menghasilkan air limbah sebanyak 2.034.552,5 m³/tahun, dengan beban pencemaran BOD sebesar 2.544.294 ton/tahun, dan COD sebanyak 1.070.950,5 ton/tahun.

Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak berupa debu sebesar 230.927,6 ton/tahun, beban pencemaran SO₂ sebanyak 2.504.200 ton/tahun, dan CO sebanyak 5.373,1 ton/tahun. Produksi limbah industri dengan kategori B3 (bahan berbahaya dan beracun) berupa limbah padat sebanyak 115.365 ton/ tahun, limbah cair sebanyak 26.038.926 ton/tahun, dan bahan baku B3 sebanyak 30.584 ton/tahun.

Permasalahan. yang dihadapi adalah: (1) Meningkatnya kerusakan berbagai ekosistem baik wilayah daratan maupun perairan seperti DAS sebagai pengatur tata air dan habitat flora dan fauna sehingga menimbulkan masalah banjir dan longsor; (2) Meningkatnya kerusakan fungsi kawasan lindung akibat perubahan peruntukan dan penjarahan, seperti Taman Nasional, cagar alam, hutan lindung, ekosistem mangrove dan terumbu karang, situs budaya, bantaran sungai dan sempadan pantai; (3) Menurunnya kualitas lingkungan perairan (sungai, waduk, rawa, telaga, estuaria dan pantai) dan tanah sebagai akibat peningkatan pencemaran dan sedimentasi yang bersumber dari: kegiatan industri, rumah tangga, rumah sakit dan pertanian; (4) Menurunnya kualitas udara pada kawasan kota akibat peningkatan emisi gas buang dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya ruang terbuka hijau; (5) Kurang diadopsinya teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi, produksi bersih/ramah lingkungan dan pengolahan limbah; (6) Meningkatnya kejadian banjir, erosi, tanah longsor dan sedimentasi; (7) Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup Jawa Tengah secara terpadu; (8) Kurang optimalnya kerjasama antar lembaga dan antar daerah akibat kerancuan pengaturan tentang peran, fungsi dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup; (9) Kurang memadainya landasan dan penegakan hukum dan peraturan, serta profesionalisme aparat/kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) belum efektif; (10) Semakin kompleks dan terbukanya konflik atau sengketa lingkungan antara swasta dengan masyarakat, dan antar daerah karena lemahnya pengetahuan, kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan; (11) Kurang memadainya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mudah diakses masyarakat untuk

mendukung pengelolaan lingkungan secara terpadu, simultan dan sinergis; dan (12) Kurangnya komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam membiayai pemulihan kerusakan/ pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai jenis kegiatan.

Kebijakan, dalam mengatasi permasalahan adalah: (1) pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan; (2) pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah dan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah; (3) peningkatan upaya rehabilitasi/pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak; (4) penguasaan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan hidup; (5) pengembangan upaya pelestarian kawasan lindung dan peningkatan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat; (6) pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenanga daerah; (7) peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM aparatur dalam pengelolaan lingkungan; (8) peningkatan peranserta masyarakat dan mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan melibatkan dan kerjasama kemitraan berbagai pihak; (9) pengembangan basis data informasi lingkungan yang memadai dan mudah diakses masyarakat; dan (10) peningkatan perhatian dan komitmen berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan, yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatkan upaya pengendalian, rehabilitasi, konservasi dan preservasi sumberdaya hayati, air, tanah, hutan dan ekosistemnya agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung kehidupan dan penghidupan; (2) meningkatkan upaya pemantauan, pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan daya tampung/dukung lingkungan yang menjadi

ruang bagi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat pada lingkungan perkotaan, lingkungan permukiman dan lahan-lahan budidaya; (3) meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparat/petugas/kelembagaan, peranserta/partisipasi masyarakat, dan kerjasama kemitraan antar pihak dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan didalam kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab dan atau pada obyek yang terkena dampaknya, terutama pencemaran udara, limbah padat, limbah cair dan limbah B3; (5) mengembangkan/menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, menegakkan hukum lingkungan, serta memfasilitasi penanganan sengketa lingkungan; dan (6) membangun basis data informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memadai serta mudah diakses masyarakat, swasta, dan lembaga pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi, yang ditempuh adalah: (1) Penserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan; (2) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah dan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah; (3) Rehabilitasi dan pemulihan fungsi lingkungan; (4) Peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan hidup; (5) Pelestarian fungsi kawasan lindung dan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat; (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup; (7) Peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat, serta mediasi dalam penanganan masalah lingkungan melalui kerjasama kemitraan berbagai pihak; (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas data/informasi lingkungan yang

memadai dan mudah diakses masyarakat; dan (9) Menginternalkan (memasukkan) anggaran biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam biaya perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Program, untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1) Pengelolaan lingkungan alam

Program ini untuk meningkatkan upaya pengendalian, rehabilitasi, konservasi dan preservasi sumberdaya hayati, air, tanah, hutan dan ekosistemnya agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung kehidupan dan penghidupan.

2) Pengelolaan lingkungan buatan

Program ini untuk meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan dan daya tampung/dukung lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan – lahan budidaya.

3) Pengelolaan lingkungan sosial

Program ini untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparat/petugas, peran serta/pertisipasi masyarakat, dan kerja sama kemitraan antar pihak dalam memadukan dan mensinerjikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam kegiatan pembangunan di Jawa Tengah.

4) Pengendalian pencemaran lingkungan

Program ini untuk meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab dan atau obyek terkena dampaknya, terutama pencemaran udara limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

5) Penegakan hukum lingkungan

Program ini untuk mengembangkan/menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta memfasilitasi penyelesaian/penanganan sengketa lingkungan.

6) Pengembangan basis data lingkungan

Program ini untuk membangun basis data (database) informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai serta mudah diakses masyarakat, swasta, dan lembaga pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

b. Sumber Daya Kelautan :

Kondisi saat ini, Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 17 diantaranya terdapat di wilayah pesisir, yang terdiri dari 426 desa yang terbagi menjadi 331 desa di pantai utara dan 95 desa di pantai selatan. Secara geografis memiliki garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Wilayah pantai Jawa Tengah terdapat berbagai potensi sumberdaya kelautan yang sangat bervariasi, baik jenis organisme laut ekonomis penting seperti ikan udang, dan kerang, maupun ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan estuaria.

Permasalahan yang dihadapi, yakni: (1) Belum tersedianya basis data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan, pengawasan dan usaha rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan; (2) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan estuaria sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan (*spawning ground/nursery ground*) ikan dan organisme laut penting lainnya di Kepulauan Karimunjawa, kawasan pantai utara, dan

kawasan pantai selatan; (3) Rusaknya sarana budidaya/pertambakan terutama di pantai utara akibat dari sistem budidaya yang selama ini digunakan serta kualitas perairan yang kurang mendukung; (4) Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pesisir/pantai di pantai utara yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, industri maupun pertanian; (5) Menurunnya potensi perikanan di laut Jawa akibat dari penangkapan berlebih, sehingga semakin menurunkan pendapatan nelayan; (6) Kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar program yang terkait dengan masalah kelautan maupun antar daerah; (7) Kurang memadainya sarana prasarana sosial ekonomi masyarakat pesisir pada kawasan sentra pengembangan pesisir dan Kepulauan Karimunjawa; (8) Belum optimalnya pendayagunaan potensi pengembangan perikanan laut di pantai selatan Jawa Tengah; (9) Rendahnya kemampuan lingkungan dan ekosistem habitat vital untuk mendukung kegiatan budidaya pada kawasan pesisir/pantai dan pulau-pulau kecil; (10) Belum terpadunya perencanaan dan optimalnya pembangunan kawasan Kepulauan Karimunjawa; (11) Terbatasnya perangkat hukum, pedoman pengelolaan dan sarana prasarana pendukung pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan secara lestari dan berkelanjutan; (12) Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai; (13) Kurangnya kegiatan Ristek kelautan dan rendahnya penguasaan iptek kelautan untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan (14) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan.

Kebijakan, yang ditetapkan adalah: (1) membangun basis data potensi sumberdaya kelautan dan kerusakan yang ada serta membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumber daya kelautan; (2) memulihkan kerusakan sumberdaya dan

melestarikan kualitas lingkungan dan ekosistem vital, melalui usaha minimalisasi tingkat pencemaran untuk mendukung kegiatan perikanan (penangkapan, budidaya, pasca panen) pada kawasan pesisir/pantai, laut dan pulau-pulau kecil; (3) menyeimbangkan antara potensi sumberdaya yang ada dengan tingkat pemanfaatannya; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian aparat dan peranserta masyarakat pesisir/nelayan dalam pemanfaatan iptek, sarana prasarana pendukung, maupun penguatan kelembagaan masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya kelautan; (5) menyempurnakan/mengembangkan perangkat hukum dan mengembangkan pedoman sebagai pijakan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan; dan (6) mendayagunakan dan mengembangkan potensi pelabuhan ikan/TPI/penyeberangan dan lingkungan alam pantai sebagai sentra-sentra/titik-titik penggerak pengembangan ekonomi di kawasan pesisir.

Tujuan, yang ingin dicapai adalah: (1) membangun basis data informasi sumberdaya kelautan yang memadai dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan; (2) meningkatkan upaya pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan dalam upaya mengendalikan, mencegah dan memulihkan kerusakan wilayah pesisir dan laut; (3) menumbuhkan pusat-pusat pengembangan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis sumberdaya kelautan, sesuai dengan rencana tata ruang, daya dukung/tampung dan tata guna kawasan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir; (4) memberdayakan potensi sumberdaya (alam, jasa lingkungan, dan masyarakat) di pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya; (5) meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan mengembangkan jenis komoditas ikan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan pasar internasional, melalui pengembangan kegiatan budidaya diwilayah pesisir dan di laut; (6)

mengembangkan/menyempurnakan perangkat hukum, kemampuan aparat/ petugas, sarana prasarana pendukung, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan; (7) meningkatkan kegiatan riset/kajian kelautan dan pendayagunaan teknologi tepat guna pengelolaan potensi sumberdaya kelautan untuk mendukung pengembangan iptek dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan; (8) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparat/petugas, dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah, serta kemampuan masyarakat pesisir dalam mengelola potensi sumberdaya laut dan pesisir; dan (9) meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, dan partisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Strategi, yang ditempuh adalah: (1) Peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan untuk pengembangan basis data dan mendukung pelayanan masyarakat; (2) Penataan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk melindungi kelestarian fungsi ekosistem habitat vital pesisir, serta mencegah konflik kepentingan antar sektor dan antar daerah; (3) Pendayagunaan potensi lingkungan dan sarana prasarana di kawasan pesisir sebagai titik-titik penggerak pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) Peningkatan sistem pengaturan, dan pengawasan sumberdaya kelautan; (5) Meningkatkan kualitas SDM aparat, kapasitas kelembagaan serta kerjasama antar sektor dalam pengelolaan sumberdaya kelautan; dan (6) Pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program, yang dilaksanakan adalah:

1) Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan

Program ini untuk membangun basis data informasi dan evaluasi sumber daya kelautan yang memadai untuk mendukung pendayagunaan sumberdaya kelautan.

2) Pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan

Program ini untuk meningkatkan upaya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan untuk mencegah, mengendalikan dan memulihkan kerusakan ekosistem pantai.

3) Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi pesisir

Program ini untuk menumbuhkan pusat-pusat pengembangan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis sumberdaya kelautan, sesuai tata ruang, daya dukung/tampung dan tata guna kawasan.

4) Pemberdayaan pulau-pulau kecil

Program ini untuk memberdayakan potensi sumber daya (alam, jasa lingkungan, dan penduduk) di pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya.

5) Pengembangan usaha perikanan laut

Program ini untuk meningkatkan populasi ikan dan daya saing komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional.

6) Peningkatan sistem pengawasan bidang kelautan

Program ini untuk mengembangkan/menyempurnakan perangkat hukum, kemampuan aparat/petugas sarana dan prasarana pendukung dan peranserta masyarakat dalam pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan.

7) Pengembangan riset dan teknologi kelautan

Program ini untuk meningkatkan kegiatan risert/kajian dan pendayagunaan teknologi tepat-guna pengelolaan potensi sumber daya kelautan untuk mendukung pengembangan lptek, dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan.

8) Pengembangan SDM dan kelembagaan bidang kelautan

Program ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparat/petugas dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah, serta kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumberdaya laut.

9) Pemberdayaan masyarakat pesisir

Program ini untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya kelautan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

5. Penataan Ruang, Pertanahan dan Pembangunan Perwilayahan.

a. Penataan Ruang dan Pertanahan

Kondisi saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, telah mengalami evaluasi dan revisi, ini mengingat jangka waktu dan perkembangan yang terjadi, sehingga mengharuskan untuk segera dilakukan revisi PERDA RTRW Kabupaten/Kota. Namun demikian dalam implementasinya, RTRW Kabupaten/Kota yang merupakan derivat atau penjabaran dari RTRWP Jawa Tengah masih memerlukan peningkatan dan pematapan dalam proses penataan ruang, termasuk penerapan kebijakan insentif dan disinsentif yang berlangsung belum optimal, disamping belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

RTRWP Jawa Tengah merupakan matra ruang pelaksanaan pembangunan, masih diperlukan adanya penjabaran-penjabaran untuk memudahkan dalam implementasinya, seperti Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sub Regional, Penataan dan Pengelolaan Status Kepemilikan Tanah, serta Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan. Permasalahan yang masih dijumpai : (1) Belum seluruh kawasan strategis memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; (2) Belum efektif dan efisiennya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang karena kurangnya pemahaman masyarakat umum dan aparat pemerintah dalam hal penataan ruang; (3) Belum efektifnya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam memfasilitasi permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (4) Belum terwujudnya atau terbangunnya kesepahaman tentang arti pentingnya tata ruang sebagai salah satu acuan pelaksanaan pembangunan; (5) Meningkatnya dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serta rendahnya pemahaman dan kejelasan terhadap hukum/peraturan pertanahan; (6) Masih banyaknya bidang-bidang tanah yang belum disertifikatkan; (7) Masih kurangnya peta dasar pendaftaran tanah yang diperlukan dalam pemetaan bidang tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan; (8). Masih diperlukannya titik ikat dalam penentuan dan rekonstruksi koordinat bidang tanah; (9) Masih terbatasnya informasi mengenai penguasaan tanah perdesaan; (10) Belum memadainya informasi geografi dalam bentuk digital yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan secara cepat, tepat, efisien, dan efektif serta mudah dalam pembaharuannya; (11) Belum tertibnya penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian maupun perumahan; (12) Masih terbatasnya jumlah PPAT; (13) Masih banyaknya kasus/sengketa tanah karena terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan; (14) Belum tertibnya penguasaan dan kepemilikan tanah; (15) Kurang terkendalinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian; (16) Belum optimalnya kemampuan SDM bidang pertanahan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kebijakan, yang ditetapkan adalah : (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya rencana tata ruang

sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan; (2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana tata ruang baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Propinsi; (3) Meningkatkan kinerja kapasitas kelembagaan penataan ruang; (4) Menginventarisir dan memetakan status kepemilikan dan penggunaan tanah; (5) Menyusun rencana tata ruang kawasan strategis sub regional sebagai penjabaran dari RTRW Propinsi Jawa Tengah

Tujuan. yang ingin dicapai adalah : (1) Meningkatkan penyelenggaraan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan tertib berdasar rencana tata ruang yang menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan; (2) Mendorong pengelolaan pertanahan melalui pengaturan , penatagunaan, penguasaan dan pelayanan di Kabupaten/kota yang adil dan tertib dengan mengutamakan hak-hak masyarakat; (3) Memfasilitasi kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan penataan ruang

Strategi. yang ditempuh adalah (1) Memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian Rencana Tata Ruang kawasan-kawasan strategis; (2) Mengusahakan tersediannya data dan informasi serta memantapkan teknologi sistem informasi dalam penataan ruang dan pertanahan; Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang; (3) Meningkatkan kinerja TKPRD; (4) Meningkatkan kapasitas kelanbagaan penataan ruang; (5) Menyebarluaskan serta melaksanakan peraturan-peraturan penataan ruang; (6) Menyelenggarakan penyediaan informasi pertanahan bagi masyarakat dan investasi pembangunan; (7) Meningkatkan pengaturan dan penataan serta pengendalian mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah; (8) Melaksanakan dan menjabarkan reformasi kebijakan peraturan perundangan di bidang pertanahan sesuai kewenangan; (9) Meningkatkan penyelesaian sengketa dan permasalahan pertanahan; (10)

Mengusahakan tersedianya data dan informasi serta memantapkan teknologi sistem informasi dalam penataan ruang; (11) Mengupayakan pengembangan dan penguatan kelembagaan pelayanan dan pengelolaan pertanahan;

Program. Program yang dilaksanakan dalam pembangunan tata ruang adalah:

1) Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.

Program ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan tersedianya rencana tata ruang propinsi dan kawasan- kawasan strategis.

2) Peningkatan kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang.

Program ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan propinsi serta memfasilitasi Kab/Kota dalam upaya keterpaduan penataan ruang pada kawasan strategis.

3) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan Dalam Penataan Ruang.

Program ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterlibatan para pihak (*stakeholder*) dalam penataan ruang.

4) Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota.

Program ini untuk mendorong optimalisasi penataan dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah di Lintas Kab/Kota.

b. Pembangunan Perwilayahan

Kondisi saat ini, Pembangunan dengan pola pendekatan perwilayahan, merupakan upaya untuk meningkatkan keterpaduan

sektoral, spasial dan lintas pelaku pembangunan di dalam suatu wilayah dengan mendayagunakan kespesifikan potensi lokal. Mengingat kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang relatif berbeda antar daerah satu dengan lainnya, maka dalam pembangunan perwilayahan diperlukan adanya kerjasama sinergis antar daerah yang terkait dalam lingkup spasial geografis, dalam berbagai aktivitas pembangunan, baik pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang saling menguntungkan.

Strategi kebijakan pembangunan wilayah di Jawa Tengah didasarkan pada pengembangan beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis pertumbuhan dan potensi unggulan, yang apabila dikembangkan mampu menunjang pertumbuhan daerah yang berdampak baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Disamping itu juga yang memiliki nilai strategis untuk konservasi alam dan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan, serta kawasan perbatasan yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan antar propinsi ataupun antar Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan perwilayahan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang yang tersusun dalam bentuk rencana pengelolaan/pengembangan wilayah, merupakan instrumen untuk meningkatkan pembangunan secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi antara wilayah/kawasan. Oleh karena itu, konsepsi rencana pengelolaan/penataan kawasan yang merupakan wujud dari pembangunan perwilayahan telah dilakukan pada beberapa kawasan yang mempunyai nilai strategis dan mendesak untuk segera ditangani. Yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam implementasinya, agar terwujud keterpaduan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan secara terpadu, dengan mendasarkan pada hasil kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan, termasuk penyediaan

sarana dan prasarana pendukungnya, seperti air bersih, transportasi, fasilitas permukiman dan sarana kegiatan ekonomi.

Permasalahan. Permasalahan yang masih dijumpai : (1) Adanya kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar desa meliputi belum optimalnya pemanfaatan atau pemberdayaan potensi wilayah yang merupakan keunggulan daya saing wilayah; (2) Kurangnya sinkronisasi dan integrasi pengembangan wilayah melalui kerjasama sinergis strategis antar Kab/Kota dan antara Kab/Kota dengan Propinsi; (3) Masih banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian di perkotaan dan perdesaan; (4) Masih kurangnya sarana dan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan wilayah;

Kebijakan, yang ditetapkan adalah : (1) Mendukung dan meningkatkan pembangunan yang menitikberatkan pada sinergitas antara pertumbuhan dan pemerataan; (2) Mendukung dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan wilayah; (3) Memberdayakan potensi wilayah sebagai percepatan daya dukung pembangunan perwilayahan dengan tetap mempertahankan ciri khas/khusus; (4) Mendukung dan meningkatkan penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan, terutama penanganan permukiman padat dan kumuh serta masyarakat miskin perkotaan

Tujuan, yang ingin dicapai adalah (1) Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang sinergis dan interaksi lintas sektor, lintas wilayah, lintas stakeholder berbasis dan berfokus pada potensi unggulan ekonomi, wilayah dalam kerangka pembangunan perwilayahan fungsional; (2) Meningkatkan peran serta iklim kerjasama antar sektor pembangunan, antar propinsi/ kawasan/ kabupaten/kota dan antar stakeholder

Strategi, yang ditetapkan adalah : (1) Mendorong dan meningkatkan terwujudnya pembangunan perwilayahan fungsional; (2) Mendukung dan mendorong kerjasama antar Kab/Kota dan antara Propinsi dengan Kab/Kota dalam pengelolaan pembangunan perwilayahan; (3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah; (4) Mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan pedesaan

Program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan wilayah, adalah :

1) Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan.

Program ini untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha pada sentra – sentra produksi yang ada dan atau potensial baru serta mengoptimalkan dan mengembangkan perencanaan pengelolaannya.

2) Peningkatan Keterpaduan dan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan.

Program ini untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pelaku pembangunan dalam keterpaduan kerjasama dan peran serta pada pengelolaan pembangunan perwilayahan antar sektor pembangunan, antar propinsi/kabupaten/kota dan antar stakeholder.

3) Pemantapan , Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah.

Program ini untuk memantapkan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah mendukung potensi unggulan wilayah pada titik – titik potensial terutama sentra – sentra pertumbuhan ekonomi.

4) Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Program ini untuk mendukung dan memfasilitasi penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan oleh kabupaten/kota dalam upaya pencapaian suatu sistem wilayah.

D. Kebijakan & Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi saat ini, Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar masing-masing daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara efisien. Dana bantuan Pusat kepada Daerah diwujudkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bantuan lain yang sah. Besarnya pendapatan daerah (2002) sebesar Rp. 2.580.967.044.410.000,00, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp. 1.242.709.462.374.000,00, dan bagian dana perimbangan sebesar Rp. 717.960.514.585,00, sisa anggaran tahun yang lalu sebesar Rp. 426.091.818.451,00 dan Lain-lain penerimaan sebesar Rp. 194.205.249.000,00. Sedangkan besarnya dana anggaran pembangunan diketahui sebesar Rp. 869.915.874.377,00 meningkat sebesar 136,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Asset-asset daerah belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD.

Permasalahan, Ketidakseimbangan antara beban tugas-tugas pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah memerlukan instrumen kebijakan penyusunan skala prioritas kegiatan dengan pemanfaatan keuangan daerah yang efektif, efisien dan produktif. Oleh karena itu seluruh sumber pendapatan daerah termasuk aset milik daerah

perlu dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah adalah : (1) terbatasnya sumber pendapatan daerah; (2) pendayagunaan aset daerah belum optimal; (3) pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kebijakan, Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya melalui kebijakan : (1) peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan melalui : penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah; pendayagunaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan; intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; (2) pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset daerah diarahkan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan pendapatan daerah; (3) belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tujuan, Pengelolaan keuangan daerah untuk : (1) meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari obyek-obyek baru dan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan dana penyeimbang guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan; (2) meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi pendapatan daerah; (3) mencapai keluaran yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan.

Strategi, dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui strategi (1) peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahun diharapkan selalu meningkat, sehingga diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada; (2) aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Propinsi, untuk itu diperlukan inventarisasi terhadap aset-aset yang tersebar pada Badan/Dinas/Kantor serta Unit Kerja diseluruh Jawa Tengah. Selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset daerah yang

produktif maupun yang tidak produktif; (3) pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran kinerja secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga terwujudnya kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Program ; Program pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1) Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Program ini bertujuan untuk melestarikan obyek-obyek pendapatan yang sudah ada dan menambah sumber pendapatan baru dari sektor redistribusi dan penerimaan lain-lain yang memungkinkan dapat digali lebih maksimal.

2) Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Program ini bertujuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru guna menambah penerimaan daerah.

3) Inventarisasi Aset-Aset Daerah

Program ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi aset daerah guna memberikan kontribusi yang proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

4) Pendayagunaan Aset Daerah Secara Produktif.

Program ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan aset daerah yang lebih efisien dan efektif.

5) Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
P E N U T U P

Rencana Strategis Jawa Tengah tahun 2003 – 2008 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap Badan/Dinas dan Kantor satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pembangunan. Renstra dapat sebagai acuan bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam partisipasinya dan memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.

Upaya percepatan laju pembangunan di Propinsi Jawa Tengah dalam era otonomi daerah akan sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka pengelolaan program-program pembangunan.

Hasil-hasil pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suasana demokratis, tenteram dan aman.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2008

D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	PROGRAM	SASARAN 2004-2008	UNIT KERJA PENGAMPU	
					UNIT PENGAM PU UTAMA	INSTANSI TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah	1. Intensifikasi sumber Pendapatan Daerah.	1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah dari obyek-obyek baru.	DIPENDA	Badan/Dinas/ Kantor/Unit Kerja Terkait
2.	Belum optimalnya pendayagunaan Aset Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah	1. Inventarisasi Aset - aset Daerah. 2. Identifikasi terhadap Asset Daerah.	2. Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Meningkatnya penerimaan dana Daerah	DIPENDA	Badan/Dinas/ Kantor/Unit Kerja Terkait
3.	Belum efektif dan efisiennya pendayagunaan belanja Daerah	Pembelanjaan keuangan Daerah dengan prinsip anggaran kinerja	3. Optimalisasi pengelolaan asset-aset Daerah. 4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan Daerah.	3. Meningkatnya efisiensi asset Daerah 4. Tercapainya pengelolaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip anggaran kinerja	KPBD BAPPEDA Biro Keuangan BAWASDA	Badan/Dinas/ Kantor/Unit Kerja Terkait Badan/Dinas/ Kantor/Unit Kerja terkait

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO